



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUBUNGAN SURIAH-LEBANON:
STUDI TERHADAP REVOLUSI CEDAR DI LEBANON
DAN IMPLIKASINYA PADA POLITIK SURIAH DI LEBANON
TAHUN 2005 - 2010**

TESIS

NUNU AHMAD AN-NAHIDL

NPM: 0806450911

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JUNI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUBUNGAN SURIAH-LEBANON:
STUDI TERHADAP REVOLUSI CEDAR DI LEBANON
DAN IMPLIKASINYA PADA POLITIK SURIAH DI LEBANON
TAHUN 2005 - 2010**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang
Politik dan Hubungan Internasional
Pada Program Studi Timur-tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

NUNU AHMAD AN-NAHIDL

NPM: 0806450911

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

JAKARTA

JUNI 2011

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nunu Ahmad An-Nahidl
NPM : 0806450911
Kekhususan : Politik dan Hubungan Internasional
di Timur-Tengah
Judul Tesis : Hubungan Suriah-Lebanon: Studi terhadap
Revolusi Cedar di Lebanon dan Implikasinya
pada Politik Suriah di Lebanon Tahun 2005-2010

Disetujui : 15 Juni 2011

Pembimbing Tesis,

Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
semua sumber data yang dikutip dan dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Nunu Ahmad An-Nahidl

NPM : 0806450911

Tanda-tangan :

Tanggal : 15 Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Nunu Ahmad An-Nahidl

NPM : 0806450911

Program Studi : Timur-Tengah dan Islam

Judul Tesis : Hubungan Suriah-Lebanon: Studi terhadap Revolusi Cedar
di Lebanon dan Implikasinya pada Politik Suriah di Lebanon
Tahun 2005-2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Timur-Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si (.....)

Pembimbing : Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D (.....)

Penguji : Achmad Ramzy Tadjoeidin, MPA (.....)

Pembaca Ahli : Dr. Hendra Kurniawan, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt atas lindungan dan karunia-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Timur-Tengah dan Islam, kekhususan Politik dan Hubungan Internasional di Timur-Tengah - Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan atas penulisan tesis ini. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- (1) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, selaku Ketua Program Studi Timur-Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (2) Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si selaku ketua dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
- (4) Ahmad Ramzy Tadjoeidin, MPA selaku penguji dan Dr. Hendra Kurniawan, M.Si selaku pembaca ahli (*reader*) yang telah memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penelitian ini menemukan konteksnya.
- (5) Dr. H.M. Amin Haedari, M.Pd selaku Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI yang telah memberikan keleluasaan waktu untuk "meninggalkan" sejenak tugas-tugas kantor dan seluruh teman-teman peneliti di Lt. 19 Gd. Thamrin sebagai teman diskusi yang sehat.
- (6) Kedua orang tua; Drs K.H. Hafizh Utsman (abi) dan Hj. Rt. E. Hasanah, S.Ag (umi), atas segala do'a dan dorongan yang diberikan, dan kedua putra/i tercinta; Ahmad Nabil Aulawi (5 th) dan Nala Qurratal Ain (3 th) yang selalu setia menghibur dengan celotehannya.
- (7) Seluruh staf pengajar kekhususan PHI yang telah men-*transfer* ilmu hingga tesis ini terwujud, dan staf sekretariat PSTTI yang telah banyak membantu melayani kebutuhan administrasi.

Semoga Allah swt membalas segala amal kebaikan semuanya, *jazaakumullah ahsanal jaza'a*, dan kiranya tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu ke depan. Semoga.

Jakarta, 15 Juni 2011

Nunu Ahmad An-Nahidl

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nunu Ahmad An-Nahidl
NPM : 0806450911
Kekhususan : Politik dan Hubungan Internasional di Timur-Tengah
Program Studi : Timur-Tengah dan Islam
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Hubungan Suriah-Lebanon: Studi terhadap Revolusi Cedar
di Lebanon dan Implikasinya pada Politik Suriah di Lebanon Tahun
2005-2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis./pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 15 Juni 2010
Yang menyatakan,

Nunu Ahmad An-Nahidl
0806450911

ABSTRAK

Nama : Nunu Ahmad An-Nahidl
Program Studi : Timur-Tengah dan Islam
Judul : Hubungan Suriah-Lebanon: Studi terhadap Revolusi Cedar di Lebanon dan Implikasinya pada Politik Suriah di Lebanon Tahun 2005-2010

Tesis ini membahas Revolusi Cedar di Lebanon dan implikasinya pada politik Suriah di Lebanon tahun 2005-2010, dan merupakan penelitian kualitatif non-interaktif (*non interactive inquiry*) atau penelitian analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Revolusi Cedar di Lebanon tahun 2005 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap politik Lebanon pada saatnya dan perkembangan sesudahnya. Revolusi Cedar dibentuk oleh situasi sosial dan politik Lebanon yang berakar sejak tahun 1980-an, yaitu ketika mulai tumbuh kesadaran dari sebagian besar rakyat Lebanon terhadap pentingnya perubahan di dalam iklim politik Lebanon. Kesadaran ini semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat ke arah penolakan terhadap intervensi Suriah dalam politik Lebanon. Penolakan semakin mengemuka sejak awal tahun 2000-an ketika terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu Israel menarik mundur kekuatan militernya dari Lebanon Selatan, suksesi kepemimpinan Suriah dari Hafez al-Asad kepada Basyar al-Asad, diterbitkannya Resolusi 1559 oleh Dewan Keamanan PBB, dan yang terakhir adalah peristiwa pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 14 Februari 2005. Peristiwa terakhir inilah yang memantik kemarahan rakyat Lebanon dan mendorong demonstrasi di seluruh kawasan dengan tuntutan utama agar Suriah secepat mungkin meninggalkan Lebanon. Aksi-aksi rakyat Lebanon inilah yang diidentifikasi sebagai Revolusi Cedar.

Revolusi Cedar memperoleh dukungan luas dari dunia internasional dan telah berhasil memaksa Suriah menarik mundur kekuatan militer dan intelijennya dari Lebanon pada akhir April 2005, selain melahirkan Koalisi 14 Maret pada Pemilu Parlemen 2005 dan 2010. Namun demikian, Revolusi Cedar tidak mampu mendorong sebuah sistem politik yang stabil dengan ciri-ciri pemerintahan yang kuat. Persoalan politik domestik yang tidak kunjung reda menyebabkan pemerintahan rapuh dan tidak *legitimate*, karena pemerintahan tidak berpijak di atas masyarakat sipil yang terpadu dan kuat. Orientasi politik, sikap dan tujuan warga Lebanon dari berbagai latar yang berbeda, telah menjadi faktor dominan yang menyebabkan negara dan pemerintahan tidak memperoleh legitimasi yang kuat. Padahal suatu sistem dibutuhkan untuk terlihat absah di depan warganya. Legitimasi akan sulit diperoleh manakala budaya politik Lebanon tidak mampu mendasari suatu sistem pemerintahan. Budaya politik Lebanon belum menjadi penghubung antara perilaku individu dan perilaku sistem.

Kata kunci: Revolusi Cedar, implikasi politik, intervensi Suriah, Koalisi 14 Maret, budaya politik.

ABSTRACT

Name : Nunu Ahmad An-Nahidl
Study Program : The Middle East and Islam
Title : Syria – Lebanon Relation: A Study on the Cedar
Revolution in Lebanon and its Impacts on Syria's
Politics in Lebanon 2005-2010

This thesis discusses the Cedar Revolution in Lebanon and its impacts on Syria's politics in Lebanon at 2005-2010, and it is a non-interactive inquiry, or an analytical research. The outcome of the research explains that the 2005 Cedar Revolution has been a significant effect on politics in Lebanon during the time it was happening and in its development afterwards. The Cedar Revolution was shaped by social and political situation in Lebanon that had rooted since the 1980s, with the growing awareness of the majority of the Lebanese people on the importance of change in their country's political climate. The awareness grew more widespread within various spectrum of the society, narrowing to rejection of Syria's intervention in politics in Lebanon. The rejection have increasingly surfaced since the early 2000s with the occurrence of several important events, such as Israel's withdrawal of its military force from South Lebanon, the succession of leadership in Syria from Hafez al-Asad to Basyar al-Asad, the issuance of UN Resolution 1559, and the assassination of former Prime Minister of Lebanon, Rafik Hariri, on 14 February 2005. The latter event triggered the Lebanese people's anger and led people from all over the region to rally, demanding that Syria leave their country at once. Such action by the people of Lebanon is identified as the Cedar Revolution.

The Cedar Revolution gained such large international that Syria was finally forced to withdraw its military and intelligence power from Lebanon at the end of April 2005, which led to the establishment of the March 14 Coalition in the Parliamentary Election in 2005 and 2010. However, the Cedar Revolution failed to lead to a stable political system with the characteristics of a strong government. Continuous domestic political problems have made the government vulnerable and illegitimate because it is not based on the foundation of a strong and unified civilian society. The political attitude, orientation, and goals of the people of Lebanon who come from various different backgrounds has become a dominant factor that has caused the government's lack of strong legitimacy. Whereas it is necessary for the system to be legitimate in its people's eyes. Legitimacy will be difficult to reach when Lebanon's political culture fails to base its government system. The Lebanese political culture has yet to become a link between the behavior of the individuals and that of the system.

Key words: Cedar Revolution, political impact, Syrian intervention, March 14 Coalition, political culture.

الخلاصة

الإسم الكامل : نونو احمد الناهض
القسم : الشرق الأوسط والإسلام
الموضوع : العلاقة بين سورية ولبنان: دراسة تحليلية عن الانتفاضة الاستقلالية في لبنان وأثرها في موقف سياسة سورية بلبنان.

وهذه الرسالة تبحث عن الانتفاضة الاستقلالية في لبنان وأثرها في موقف سياسة سورية بلبنان، والمنهج الذي يسلكه الباحث في هذه الرسالة هو المنهج الكيفي غير المتبادل أو ما يسمى بالبحث التحليلي. وهذه الرسالة تبين أن الانتفاضة الاستقلالية المندلعة في لبنان سنة 2005 تعطي أثرا ملحوظا عن موقف سياسة لبنان في ذلك الوقت والذي جاء من بعد. وتلك الانتفاضة تتبلور بسبب الوضع الاجتماعي والسياسي بلبنان والتي تغرس جذورها منذ ثمانينات، وهي السنة التي يعلو فيها الوعي السياسي لمعظم المجتمع اللبناني عن أهمية التجديد للسياسة الداخلية. وهذا الوعي يعم المجتمع اللبناني في جميع نواحي الحياة الاجتماعية وتهدف غايته إلى الرفض عن تدخل سورية في سياسة لبنان. ويتجلى هذا الرفض منذ أن طلع فجر سنة ألفين مقترنا بوقوع الأحداث الهامة المتنوعة، منها انسحاب إسرائيل على قوتها العسكرية من لبنان الجنوبية، وتحول رئاسة سورية من حافظ الأسد إلى بشار الأسد، وصدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة المرقم 1559، وحادثة مقتل رفيق الحريري -رئيس الوزراء السابق- في 14 فبراير 2005. وهذا الأخير هو الذي يثير غضبان المجتمع اللبناني والمظاهرات في كافة أنحاء المناطق اللبنانية، طالبا على انسحاب سورية من لبنان بأسرع وقت ممكن. وهذه الحركات هي التي تنسمى بالانتفاضة الاستقلالية. وهذه الانتفاضة تنال دعامة عامة من المجتمع العالمي والتي تجعل سورية تحت ضغوط قوية للسحب على قوتها العسكرية والجسائية من لبنان في آخر أبريل 2005، كما أنها تؤلّد ائتلاف 14 مارس في الانتخاب العام لمجلس النواب والمنعقد في 2005. وبعد نهاية هذه الثورة تقلّت تدخل سورية في ميدان السياسة اللبنانية. ولكن سورية تشعر إلى الحاجة لبناء الشبكة السياسية مع "حزب الله" في لبنان نظرا لامتلاكه زمام الائتلاف لـ 8 مارس، وهو الائتلاف الذي يدعم سياسة سورية. وهذا لأن التفتيش الذي أجري تحت إشراف الأمم المتحدة عن مقتل رفيق الحريري سوف يشير اتهامه إلى سورية، مع أنها تحتاج إلى حماية كبرائها من المحكمة، لذلك جعلت سورية "حزب الله" حزبا مؤتلفا في لبنان.

مفتاح الكلمات: الانتفاضة الاستقلالية، أثرها في السياسة، تدخل سورية، ائتلاف 14

مارس

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
AT-TAJRID	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan Tesis	9
BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 Budaya Politik Pluralistik	13
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya	16
2.3 Kerangka Konseptual	18
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	20
3.2 Paradigma Penelitian	20
3.3 Jenis dan Metode Penelitian	21
3.4 Unit Analisis	22
3.5 Sumber dan Karakteristik Data	23
3.6 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Validasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data	24
3.8 Analisis Data	24
BAB 4 REALITAS POLITIK LEBANON SEBAGAI FAKTOR PENDORONG LAHIRNYA REVOLUSI CEDAR	

4.1	Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat Sipil Lebanon	26
4.2	Penarikan Mundur Militer Israel dari Lebanon Selatan	31
4.3	Suksesi Kepemimpinan Suriah	32
4.4	Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559	36
4.5	Pembunuhan Mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri	39

BAB 5 REVOLUSI CEDAR DAN IMPLIKASINYA PADA POLITIK SURIAH DI LEBANON TAHUN 2005-2010

5.1	Revolusi Cedar : Definisi Istilah dan Pengertian	47
5.2	Fokus dan Tujuan Revolusi Cedar	49
5.3	Bentuk-bentuk Aksi dan Polarisasi Sikap antara Pro dan Kontra	50
5.4	Dukungan Dunia Arab dan Internasional	55
5.5	Penarikan Mundur Militer dan Agen Intelijen Suriah dari Lebanon	56
5.6	Pemilu Parlemen Tanpa Campur Tangan Suriah	62
5.7	Posisi Suriah di tengah Penyelidikan Kasus Pembunuhan Rafik Hariri	70
5.8	Politik Lebanon dan Politik Suriah di Lebanon Pasca Revolusi Cedar	80

BAB 6 PENUTUP

6.1	Kesimpulan	92
6.2	Saran	94
6.3	Saran untuk Penelitian Selanjutnya	95

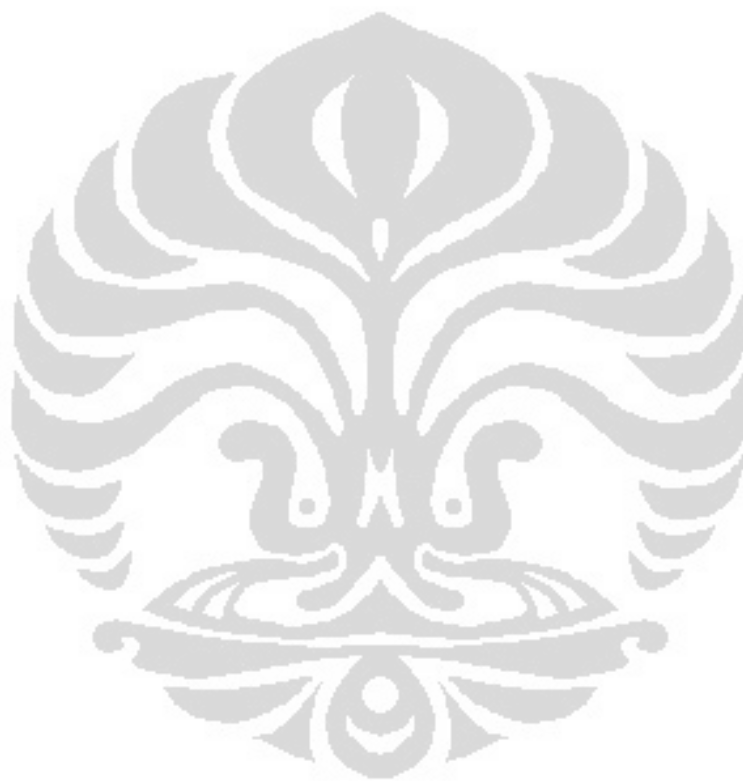
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

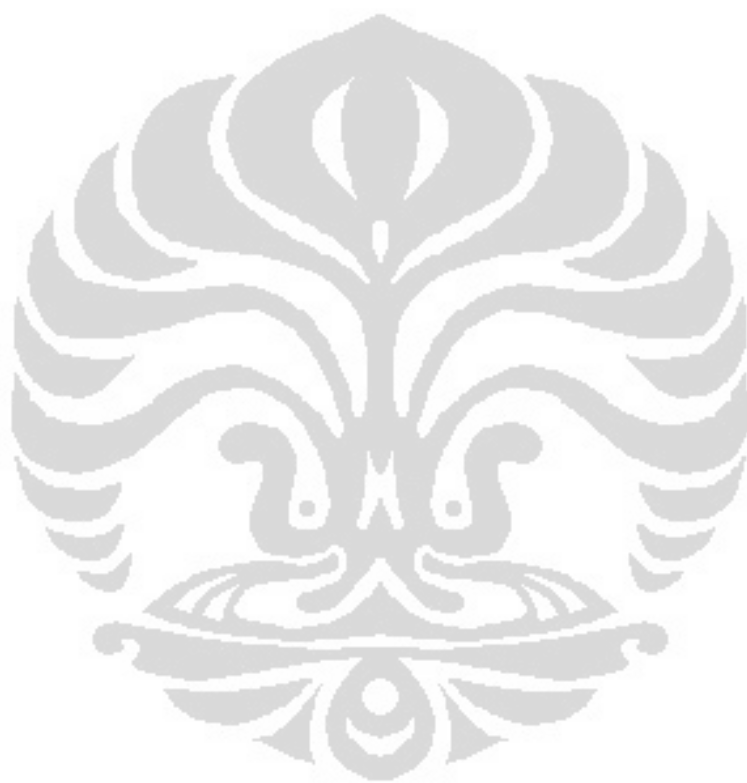
DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	Unit Analisis Penelitian	23
Tabel 2.3	Hubungan Masalah Penelitian dan Logika Penelitian	25
Tabel 3.5	Hasil Pemilu Majelis Nasional Lebanon, 29 Mei s.d 27 Juni 2005	65
Tabel 5.5	Hasil Pemilu Majelis Nasional Lebanon, 7 Juni 2009	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Lebanon	1
2. Peta Suriah	2
3. Konstitusi Lebanon	3
4. Resolusi DK PBB 1559	14
5. Kesepakatan Taif 1989 terkait Suriah	15
6. Laporan Tim Pencari Fakta PBB atas Kasus Hariri	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persinggungan Suriah dengan Lebanon sudah dimulai cukup lama dari sisi waktu, juga telah menyisakan sekian banyak benih persoalan sejak dari hulu sejarah pertalian hubungan kedua negara tersebut.¹ Perkembangan tersebut dapat diamati dengan melihat dinamika politik Lebanon yang terus bergejolak, baik pada tataran internal dengan sekian banyak persoalan politik domestiknya, maupun tataran eksternal, yaitu manakala Lebanon bersentuhan dengan kepentingan politik regional Timur-tengah atau dalam kaitan kajian ini adalah sejarah panjang politik Suriah di Lebanon. Sebagai langkah awal, telaah terhadap persoalan tersebut dapat ditelusuri antara lain dengan mencermati terlebih dahulu latar historis sosial dan politik Lebanon itu sendiri, kemudian berupaya menemukan alasan-alasan secara umum yang melatarbelakangi peran politik Suriah di Lebanon selama hampir tiga dekade, dan pada gilirannya memahami posisi Revolusi Cedar di Lebanon tahun 2005 yang berimplikasi kepada peran politik tersebut. Secara khusus, implikasi Revolusi Cedar akan ditelaah dalam rentang waktu 2005-2010, atau lima tahun pertama setelah peristiwa tersebut meletus.

¹ Perancis menduduki Suriah tahun 1920 dan memberikan empat bagian besar dari negara tersebut kepada sebuah negara yang baru dibentuknya; Lebanon, sebuah negeri di kawasan mediterania timur. Saat Perancis meninggalkan Suriah 26 tahun kemudian, para ahli hukum Suriah mengklaim bahwa pembagian itu batal demi hukum dan tidak berlaku mmmlagi. Dikatakan bahwa perbatasan Suriah dengan Lebanon, Palestina, dan Yordania hanyalah "buatan" belaka. Suriah tidak dikonsultasikan tentang penyesuaian kawasan tahun 1920 dan sepenuhnya merupakan gagasan Jenderal Perancis, Henri Gouraud. Ketika kemerdekaan dari Perancis didiskusikan tahun 1936, tim negosiasi Suriah belum mengemukakan isu distrik tambahan kepada Lebanon, karena percaya bahwa suatu hari nanti, mereka akan kembali bersatu dengan seluruh Lebanon, berangkat dari keyakinan bahwa perbatasan Lebanon adalah artifisial karena dipaksakan kepada Suriah. Lihat: Sami Moubayed. 15 July 2008. "Suriah and Lebanon, more than just Neighbours," dalam <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=23530&lan=en&sid=1&sp=0>.

William Thomson mencatat bahwa agama dan sekte di Lebanon, paling tidak, sebanyak 18 kelompok yang diakui negara: "Mereka memiliki satu negara yang sama tetapi dengan sedikit sekali rasa persaudaraan. Tentang sekte-sekte Muslim, ia menulis: Orang-orang Sunni "menyingkirkan" orang-orang Syiah, "keduanya membenci" kaum Druze, dan ketiganya "membenci" kaum Alawi. Tentang orang-orang Kristen, ia mengatakan "kaum Maronit tak punya kasih sayang pada siapa pun, dan pada gilirannya, tidak disukai oleh semua." Ortodoks Yunani "tidak betah" dengan Katolik Yunani, dan "semua tak menyukai orang-orang Yahudi." "Mereka tak pernah bersatu dan karenanya akan terus lemah. Tak mampu mengatur diri sendiri, dan rawan terhadap penindasan orang asing." (Blanford, 2009).

Dalam perkembangannya kemudian, masing-masing kelompok yang berseberangan tersebut tak jarang berubah aliansi, menyatu untuk sebuah kepentingan tertentu dan berpisah bahkan bertentangan untuk kepentingan yang lain sesuai dengan peta politik Lebanon yang sangat dinamis dan terus berubah. Namun dalam hal ini, analisis Thomson tersebut dapat dipastikan sebagai pengamatan yang sangat mungkin masih relevan bahkan hingga saat sekarang, meski rekaman sejarah tentang sosiologi masyarakat Lebanon tersebut ditulisnya ratusan tahun yang silam, yaitu pada 1870 dalam *The Land and the Book*; sebuah catatan perjalanannya sebagai seorang misionaris di kawasan Levant (Asia Barat Daya).

Faktanya, Lebanon adalah sebuah mosaik masyarakat sektarian, di mana tokoh agama sangat ditaati rakyat. Meskipun kadangkala terwujud kerjasama di antara berbagai kelompok, namun pada praktiknya, para pemimpin kelompok cenderung menolak bekerjasama dalam pengertian yang utuh. Pasalnya, agama dan kelompok aliran tetap menjadi identitas terpenting bagi kebanyakan orang Lebanon, dan masing-masing kelompok aliran dan agama tersebut mengklaim apa yang mereka anggap paling benar untuk negaranya.

Keragaman populasi Lebanon sudah unik di dunia Arab sejak berdirinya negara tersebut. Populasi Kristen yang besar membuat Lebanon satu-satunya negara Arab di mana kekuasaan didominasi oleh Kristen, meski Muslim masih

memiliki tuas kekuasaan yang memadai untuk mencegah pemerintah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kepentingan mereka.

Pada pertengahan 1970-an, demografis berubah dan perubahan politik regional menciptakan kerenggangan antara pembagian kekuasaan yang aktual, dan susunan politik yang asli tak lagi mewakili kepentingan semua pihak. Setelah 15 tahun mengalami perang saudara; Perjanjian Taif 1989 menciptakan kesejajaran antara Muslim dan Kristen, menandai redistribusi kekuasaan yang menyakitkan bagi komunitas dominan Kristen, tapi penting untuk perdamaian. Sejak Taif, celah baru telah tercipta. Namun, kali ini ketidakseimbangan kekuasaan krusial bukan antara Muslim dan Kristen, tapi antara Sunni dan Syiah. Sunni selama ini selalu mendominasi politik Muslim, seperti Kristen mendominasi politik nasional sebelum Taif. Seiring waktu, keseimbangan demografis dan politik telah berubah menjadi lebih condong ke Syiah, tapi tidak ada penyesuaian dalam distribusi kekuasaan dalam pemerintahan (Bannerman, 2008).

Saat ini, Kristen dan Sunni memiliki kekuasaan untuk menghadang tindakan pemerintah, tapi Syiah tidak memiliki perlindungan seperti itu. Umat Kristen mengontrol kepresidenan dan memerintahkan tentara, sementara Sunni mengangkat perdana menteri dan memerintah pasukan keamanan internal. Kedua kelompok itu memiliki hak menolak dalam parlemen dan kabinet; sebuah otoritas politik yang belakangan baru dimiliki Syiah. Sebaliknya, Syiah tidak memiliki posisi kontrol dalam cabang eksekutif Lebanon dan harus mengandalkan pada juru bicara parlemen dan milisi untuk melindungi kepentingan mereka.

Dalam perspektif politik, polarisasi tersebut telah mengakibatkan meningkatnya kecenderungan politik konsensual di antara para pemimpin politiknya. Hal ini juga semakin menajamkan hadirnya politik sektarian, baik secara ideologis maupun praktis. Padahal Kesepakatan Taif 1989 yang mengakhiri perang saudara selama 15 tahun di Lebanon dan kini menjadi bagian dari Konstitusi Lebanon, telah menyerukan diakhirinya pemerintahan sektarian atau pemerintahan “komunitas.” Konstitusi Lebanon [pasal 95 paragraf 2] menetapkan suatu masa peralihan di mana “kelompok-kelompok sektarian terwakili secara adil dan wajar dalam formasi Kabinet.” Dengan demikian, setiap pemerintahan harus merepresentasikan empat kelompok aliran utama, yakni Syiah,

Sunni, Druze dan Kristen, meskipun mereka tidak memiliki agenda politik yang sama.²

Konsekuensinya, semua keputusan politik bisa dinegosiasikan atau bahkan ditawarkan, dan diatur dengan kompromi. Kondisi tersebut mengantarkan kepada suatu kondisi dimana pemerintah Lebanon tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dan berujung kepada menipisnya kemungkinan reformasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Faktanya, kinerja pemerintah seringkali disibukkan dan dibatasi lebih kepada manajemen krisis dalam waktu yang cukup lama dan untuk yang ke sekian kali dengan sekian banyak persoalan sosial dan politik yang datang silih berganti.

Sebagai imbasnya, sejarah Lebanon acapkali diwarnai oleh kekacauan politik yang terus menerus menimpa rakyat Lebanon, sekaligus mengorbankan sekian banyak para tokoh politiknya. Pembunuhan yang tak terungkap baik motif maupun pelakunya secara jelas merupakan fenomena biasa dalam iklim politik Lebanon. Para pejabat yang sedang berkuasa, politisi atau mereka yang berpengaruh secara ekonomi, banyak di antara mereka yang telah menjadi korban pembunuhan politik. Terlepas dari latar belakang agama, kelompok atau afiliasi politiknya. Orang-orang berpengaruh tersebut mengalami nasib yang sama, yaitu melepas nyawanya di tangan orang-orang bersenjata, “kecelakaan” mobil atau ledakan yang hebat.

Dinamika sosial, politik dan pemerintahan Lebanon yang cenderung tidak stabil, sekaligus ketidakmampuan berbagai kekuatan politik dan elemen masyarakat membangun kesepakatan bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan politik internal, tampaknya telah memberikan ruang bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan politik secara signifikan. Dalam kondisi politik demikian, masyarakat Lebanon memanfaatkan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan persoalannya. Tegasnya, meminta bantuan pihak eksternal dengan seluruh kekuatan instrumennya sudah merupakan adat kebiasaan yang menjadi ciri politik Lebanon. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menyeimbangkan

² Kesepakatan Taif 1989 dihasilkan dari sebuah pertemuan rekonsiliasi nasional yang dilaksanakan pada 22 Oktober di Taif di bawah pengawasan Saudi Arabia dan Suriah. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengakhiri perang saudara di Lebanon, menegaskan otoritas Lebanon di Lebanon Selatan yang kemudian diduduki Israel dan melegitimasi pendudukan Suriah di Lebanon. Lihat: <http://www.mideastweb.org/taif.htm>.

kembali kekuatan internal Lebanon yang terguncang (Maria-Rita Kassis, 2011). Atas alasan kebutuhan demikian pula, peran politik Suriah di Lebanon memperoleh momentumnya. Suriah menancapkan pengaruhnya secara signifikan selama hampir tiga dekade untuk sebuah tugas yang disebutnya sebagai “atas permintaan Lebanon itu sendiri.” Suriah melihat peluang untuk mengelola sedemikian rupa ketergantungan Lebanon dengan pihak lain dalam menuntaskan persoalan internal mereka, khususnya pada aspek politik. Di sisi lain, Suriah sendiri memiliki keterkaitan historis dengan Lebanon terkait perbatasan wilayah yang dianggap masih menyisakan persoalan serius bagi pihak Suriah. Maka dapat dipahami, jika sebelumnya ada faktor lain dalam hubungan Suriah-Lebanon, dimana Suriah juga benar-benar memiliki banyak kepentingan di dalamnya.

Kedekatan Suriah dengan Lebanon tampil lebih intens sejak pecahnya perang saudara di Lebanon sepanjang 1975-1990 yang mengakibatkan negara kehilangan kontrol keamanan, dan Suriah berperan penting membantu Lebanon memulihkan keadaan pasca perang. Suriah mengerahkan kekuatan militernya sebanyak hampir 40.000 pasukan untuk memastikan peran politik Suriah di Lebanon berjalan efektif. Dalam periode pasca perang itu, Suriah menjalankan kontrol keamanan, menangani pelayanan sosial dan persoalan ekonomi (Salem, 2008). Meskipun Kesepakatan Thaif 1989 antara lain menyerukan terhadap penarikan pasukan asing dari Lebanon, namun kehadiran Suriah di Lebanon tetap berlanjut atas persetujuan secara diam-diam dari pemerintahan George W Bush dengan alasan untuk menjaga stabilitas dalam negeri Lebanon.

Intervensi Suriah terhadap Lebanon bahkan diyakini mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara. Pada tanggal 20 Mei 1991, pemerintah Suriah dan wakilnya di Lebanon menandatangani “*Perjanjian Persaudaraan, Kerjasama, dan Koordinasi*” antara kedua negara “untuk mencapai tingkat tertinggi kerjasama dan koordinasi di semua aspek; keamanan politik, ekonomi, budaya, ilmiah, dan bidang lainnya... [dan untuk] memperluas dan memperkuat kepentingan bersama, sebagai penegasan atas hubungan persaudaraan dan jaminan atas tujuan bersama.” Pada tanggal 1 September 1991, “*Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Lebanon-Suriah*” meligitimasi dominasi militer dan dinas keamanan Suriah di Lebanon. Dua tahun kemudian, sebuah “*Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi*

Ekonomi dan Sosial" mengukuhkan sebuah program integrasi ekonomi yang dalam prakteknya hanya memposisikan Lebanon sebagai outlet bagi barang-barang Suriah dan tenaga kerja Suriah di Lebanon (Rubin, 2005).

Selama hampir tiga dekade, tentu bukan waktu yang pendek bagi Suriah untuk dapat mengatur sekaligus mengarahkan sejumlah kebijakan politik yang harus diikuti dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Lebanon. Otoritas Suriah atas Lebanon diasumsikan telah menggugat kemandirian dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara meyakinkan. Lebanon sebagai negara yang merdeka dan berdaulat bukan hal yang tidak mungkin, justeru telah kehilangan unsur-unsur kekuatan nasionalnya secara massif, baik pada aspek sosial, ekonomi, militer dan politik (J. Morgenthau, 2010). Sementara di pihak lain, Suriah tampak seolah-olah meneguhkan dirinya sebagai “aktor penyelamat” atas problem politik domestik Lebanon yang laten akibat perang saudara yang tidak kunjung reda. Suriah menjalankan perannya secara sistematis dengan seluruh instrumen politik yang dimilikinya. Ia dapat tampil lebih meyakinkan karena pernah memperoleh legitimasi yang kuat dari Amerika Serikat untuk melanjutkan otoritasnya atas politik Lebanon. Dalam pandangan dunia Arab pun, Suriah merupakan pionir yang tak terbantahkan karena ia dipandang sebagai satu-satunya negara Arab yang konsisten melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel di wilayah-wilayah Arab. Dengan demikian, pada batas-batas tertentu, sesungguhnya Suriah telah memperoleh keuntungan politik yang sangat signifikan dalam percaturan politik kawasan.

Jika pada rentang waktu 24 tahun pertama, Presiden Hafez al-Asad yang mengawal politisasi Lebanon oleh Suriah, dimana ia menginisiasinya pada tahun 1976 dan mengendalikannya hingga akhir hayatnya tahun 2000, maka lima tahun terakhir (2000-2005) atau lima tahun sebelum Suriah menghentikan peran politiknya di Lebanon selama hampir tiga dekade (1976-2005), peran politik Suriah di Lebanon berada di bawah komando Presiden Basyar al-Asad, putra dan pengganti Hafez al-Asad. Pada rentang waktu lima tahun terakhir inilah, terdapat sejumlah momentum politik yang sangat penting dalam catatan sejarah panjang politisasi Lebanon oleh Suriah, khususnya yang berkaitan dengan tumbuhnya

kesadaran masyarakat sipil Lebanon secara massif dan signifikan yang berakibat kepada desakan kuat agar Suriah meninggalkan Lebanon.

Revolusi Cedar sebagai gerakan perubahan terutama pada aspek politik Lebanon, lahir pada awal tahun 2005 dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap iklim politik Lebanon dan perkembangan sesudahnya. Gerakan perubahan tersebut bukanlah peristiwa tunggal yang terpisah dari situasi sosial dan politik Lebanon sebelumnya. Bahkan, sesungguhnya Revolusi Cedar lahir dan dibentuk oleh berbagai momentum politik Lebanon yang melatarbelakanginya dan berakar sejak tahun 1980-an, yaitu manakala mulai tumbuh sikap dan kesadaran di antara sebagian besar rakyat Lebanon terhadap pentingnya perubahan di dalam iklim politik Lebanon. Sikap dan kesadaran ini semakin menguat dan meluas di berbagai lapisan masyarakat dan tampil mengemuka sejak awal tahun 2000-an ketika terdapat sejumlah momentum politik Lebanon yang diyakini menjadi pendorong secara sistematis dan saling berkelindan antara satu dengan yang lain ke arah titik fokus yang sama, yaitu mendorong rezim Suriah untuk pergi dan meninggalkan Lebanon.

Keinginan kuat untuk lahirnya perubahan di Lebanon dengan menantang hegemoni Suriah secara terbuka, ditunjukkan oleh ribuan mahasiswa di seluruh Lebanon. Mereka ikut berpartisipasi dalam aksi protes besar-besaran terhadap pendudukan Suriah di Lebanon. Kelompok hak asasi manusia Lebanon telah meluncurkan kampanye publik yang dinamis tentang isu-isu sensitif seperti penahanan ilegal terhadap ratusan warga Lebanon di penjara Suriah yang sebelumnya seringkali hanya mungkin dibahas dalam forum-forum terbatas dan tersembunyi. Demikian pula halnya, keberanian yang ditunjukkan jurnalis terkemuka, Gibran Tuani dan Samir Frangieh yang telah mencoba menghancurkan dinding kesunyian dan rasa takut yang sangat mencemaskan bagi para awak media massa Lebanon.

Berbagai momentum politik tersebut telah membangkitkan harapan-harapan baru sekaligus kesadaran di tengah masyarakat Lebanon atas pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan bernegara serta perubahan situasi dan kondisi, baik pada tataran sosial maupun politik di seluruh kawasan Lebanon. Meluasnya semangat perubahan di kalangan rakyat Lebanon diyakini merupakan faktor

pendorong yang sangat signifikan ke arah lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon tahun 2005. Tumbuh kesadaran kolektif yang memposisikan realitas politik Lebanon pada saat itu sebagai alasan bagi rakyat Lebanon untuk menggugat signifikansi kehadiran Suriah di belahan wilayah mereka. Banyak pihak yang beranggapan bahwa Suriah telah jauh kehilangan relevansi untuk tetap melanjutkan peran politiknya secara signifikan.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap adanya perubahan situasi dan kondisi, tidak saja membuka jalan dan sekaligus memberikan dorongan kepada lahirnya gerakan reformasi dan demokratisasi di Lebanon, melainkan juga telah memfasilitasi kerjasama di antara berbagai kelompok yang selama ini berseberangan, baik secara ideologi, politik maupun kepentingan, yaitu kelompok Kristen dan beberapa kelompok-kelompok Muslim Sunni dan Syiah untuk bersatu padu ke arah tujuan yang sama, yaitu menyuarakan gerakan pro-demokrasi di Lebanon dan menyusun kekuatan politik yang efektif untuk menentang pendudukan rezim Suriah.

Tawaran Presiden Suriah Basyar al-Asad dalam pidato pengukuhan pada musim panas tahun 2000 tentang pembaruan hubungan Suriah-Lebanon bak adik-kakak antara dua negara Arab dengan cara memperkenalkan perubahan yang dibatasi hanya mengkooptasi oposisi, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara, nyatanya tak lebih dari upaya menjamin kelangsungan sang diktator muda untuk melanjutkan obsesi almarhum ayahnya mengatur urusan politik dalam negeri Lebanon.

Sesungguhnya, Suriah sendiri tampak dilanda kekhawatiran besar sebelumnya, manakala demokratisasi di berbagai tempat semisal di Irak atau di wilayah lain secara keseluruhan akan memberikan tekanan besar kepada penghentian kediktatoran Ba'ats dan sekaligus memberikan dorongan kepada lahirnya semangat reformasi di Lebanon. Karena itu, Revolusi Cedar di Lebanon yang dipicu utamanya oleh peristiwa pembunuhan Rafik Hariri dan telah membangkitkan protes rakyat Lebanon secara luas, justeru telah menjadi bumerang bagi Suriah. Pasca peristiwa tersebut, rakyat Lebanon mengadakan rapat umum pro-demokrasi terbesar yang pernah ada di Timur Tengah, sehingga menarik perhatian seluruh dunia atas tujuan mereka. Pada gilirannya, peristiwa

itu pun telah melahirkan tekanan besar dari berbagai pihak, termasuk derasnya tekanan dunia Internasional kepada rezim Suriah untuk menarik diri dan meninggalkan Lebanon pada April 2005.

Dalam penelitian ini, hubungan Suriah-Lebanon akan dianalisis dengan upaya mencermati lebih dalam terhadap peristiwa Revolusi Cedar yang terjadi pada tahun 2005 di Lebanon dan berimplikasi kepada peran politik Suriah di Lebanon. Dalam hal ini, penelitian akan membatasi kajiannya kepada masalah apa saja Revolusi Cedar berimplikasi kepada politik Suriah selama lima tahun pertama setelah peristiwa tersebut meletus, yaitu 2005-2010. Rentang waktu lima tahun pertama tersebut, diharapkan akan memberikan gambaran yang cukup untuk mengidentifikasi implikasi Revolusi Cedar dalam konteks hubungan Suriah-Lebanon secara luas.

1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran Revolusi Cedar di Lebanon tahun 2005, dan bagaimana pula ia berimplikasi kepada politik Suriah di Lebanon tahun 2005-2010 dalam konteks hubungan Suriah-Lebanon secara luas.

Untuk lebih mempertajam dan memberi arah terhadap analisis atas rumusan masalah tadi, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana realitas politik Lebanon menjadi faktor pendorong ke arah lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon?
- b. Apa yang menjadi tujuan Revolusi Cedar, aksi politik apa yang dilakukan dan bagaimana respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar?
- c. Bagaimana dan dalam hal apa saja Revolusi Cedar berimplikasi kepada peran politik Suriah di Lebanon?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui:

- a. Faktor pendorong lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon;
- b. Tujuan Revolusi Cedar, aksi politik yang dilakukan dan respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar?
- c. Implikasi Revolusi Cedar terhadap politik Suriah di Lebanon.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang hubungan Suriah-Lebanon: studi terhadap Revolusi Cedar di Lebanon dan implikasinya pada politik Suriah di Lebanon diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

- a. Secara teoretis-akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan studi politik di Timur-tengah, khususnya tentang Revolusi Cedar di Lebanon dan implikasinya terhadap politik Suriah di Lebanon dalam konteks hubungan Suriah-Lebanon untuk menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil tema penelitian yang berbeda.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami berbagai realitas politik Lebanon yang menjadi faktor pendorong ke arah lahirnya Revolusi Cedar, dimana ia secara jelas memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap politik Suriah di Lebanon yang telah berlangsung hampir tiga dekade sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembagian bab dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan yang diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang masalah. Bahwa Lebanon merupakan mosaik masyarakat sektarian, di mana pengaruh tokoh agama dari masing-masing kelompok Sunni, Syiah, Druze, Kristen dan lainnya sangat dominan. Para pemimpin kelompok cenderung berseberangan baik secara sosial maupun politik dan menolak bekerjasama dalam pengertian yang utuh bahkan untuk kepentingan bersama sekalipun. Mereka jauh lebih mendahulukan identitas agama dan kelompok alirannya. Demikian halnya tindakan-tindakan politik mereka yang cenderung tidak mengokohkan bangunan stabilitas politik dan pemerintahan, bahkan justru memberikan ruang bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan politik secara signifikan. Dalam posisi demikian, Suriah melihat peluang tersebut dan mengelola sedemikian rupa ketergantungan Lebanon dengan pihak lain dalam menuntaskan persoalan internal mereka, dimana ia menancapkan pengaruhnya secara signifikan selama hampir

tiga dekade. Selanjutnya, perubahan kondisi sosial politik Lebanon secara signifikan ditandai dengan lahirnya Revolusi Cedar tahun 2005 yang berimplikasi kepada politik Suriah di Lebanon tahun 2005-2010. Maka perumusan masalah dan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana realitas politik Lebanon menjadi faktor pendorong ke arah lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon? Apa yang menjadi tujuan Revolusi Cedar, aksi politik apa yang dilakukan dan bagaimana respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar? Bagaimana dan dalam hal apa saja Revolusi Cedar berimplikasi kepada politik Suriah di Lebanon?

Selanjutnya dalam pendahuluan diangkat tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor pendorong lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon, tujuan Revolusi Cedar, aksi politik yang dilakukan dan respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar, serta implikasi Revolusi Cedar terhadap politik Suriah di Lebanon.

Pada bab 1 juga dimuat tentang manfaat dari penelitian ini, baik dari sisi teoretis akademis maupun dari sisi praktis. Secara teoretis-akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan studi politik di Timur-tengah, khususnya tentang implikasi politik Revolusi Cedar di Lebanon terhadap peran politik Suriah di Lebanon dalam konteks hubungan Suriah-Lebanon untuk menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil tema penelitian yang berbeda. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami berbagai realitas politik Lebanon yang menjadi faktor pendorong ke arah lahirnya Revolusi Cedar, dimana ia secara jelas memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap peran politik Suriah di Lebanon yang telah berlangsung hampir tiga dekade sebelumnya.

Bab 2 memuat landasan teori penelitian yang mencakup: budaya politik pluralistik dan hegemoni politik. Selanjutnya, dalam bab ini juga dibahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian, serta kerangka konseptual penelitian.

Bab 3 menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pembahasan dalam bab ini mengenai metodologi penelitian difokuskan pada uraian dan penjelasan tentang macam atau sifat penelitian, metode penelitian, unit analisis, metode

pengumpulan data, validasi dan pemeriksaan keabsahan data, serta analisis data kasus.

Bab 4 merupakan *entry point* bagi bahasan utama yang akan dikaji pada bab lima. Bab ini akan menggambarkan sejumlah realitas politik Lebanon yang menjadi faktor pendorong ke arah lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon. Bab ini mengawali pembahasannya dengan menjelaskan persoalan tumbuhnya kesadaran masyarakat sipil Lebanon. Kemudian, membahas penarikan mundur militer Israel dari Lebanon Selatan, dan dilanjutkan dengan bahasan tentang suksesi kepemimpinan Suriah tahun 2000 yang berakibat kepada peralihan kendali politisasi Lebanon oleh Suriah dari Hafez al-Assad ke Basyar al-Assad, dan bahasan tentang terbitnya Resolusi DK PBB 1559. Bahasan yang terakhir dan dianggap sebagai momentum utama pendorong terjadinya Revolusi Cedar di Lebanon, yaitu peristiwa pembunuhan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri.

Bab 5 merupakan pokok atau kajian utama dalam penelitian ini, yaitu membahas tentang Revolusi Cedar dan implikasi politik bagi Suriah. Bagian pertama, pembahasannya akan diawali dengan menjelaskan definisi istilah dan pengertian serta fokus dan tujuan Revolusi Cedar. Dilanjutkan dengan kajian atas bentuk-bentuk aksi dan polarisasi sikap kekuatan politik Lebanon antara pro dan kontra terhadap tuntutan Revolusi Cedar. Kemudian membahas dukungan dunia Arab dan internasional terhadap Revolusi Cedar. Selanjutnya, membahas beberapa implikasi politik Revolusi Cedar terhadap politik Suriah di Lebanon, yaitu penarikan mundur militer dan agen intelijen Suriah dari Lebanon, pemilu parlemen bebas dan demokratis tanpa campur tangan Suriah, posisi Suriah di antara penyelidikan kasus pembunuhan mantan Perdana Menteri Rafik Hariri, dan yang terakhir adalah masalah politik Suriah di Lebanon pasca Revolusi Cedar.

Sebagai bagian penutup, bab 6 memuat kesimpulan, saran, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya, memuat saran operasional yang dihasilkan dari penelitian berdasarkan kesimpulan penelitian. Saran yang terakhir diberikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Budaya Politik Pluralistik

Ilmu budaya politik awalnya hadir lewat konseptualisasi dan studi-studi budaya sendiri. Maknanya kebanyakan berasal dari penggunaan budaya dalam pengertian antropologi, hingga kemudian seorang sosiolog, Edward Shils (1961), sebagaimana dijelaskan Chilcote (2007) mengarahkannya kepada suatu orde masyarakat baru, masyarakat massa yang telah muncul di Amerika Serikat dan kebanyakan Eropa Barat sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pertumbuhan masyarakat massa ini diinterpretasi oleh Shils diiringi oleh penurunan budaya superior atau penyempurnaan budaya. Masyarakat massa cenderung merangkul budaya yang lebih berkelas menengah dan brutal. Konsep budaya Shils dapat disebut humanistik karena ia memilih berbagai kegiatan manusia dan menganggapnya sebagai budaya. Sementara antropolog cenderung tidak memilih-milih dan memandang budaya sebagai warisan sosial secara utuh. Dengan demikian, maka kelompok humanis bisa berpendapat bahwa beberapa orang lebih berbudaya dari yang lain, sebagaimana beberapa masyarakat budayanya lebih kaya daripada yang lain. Pandangan normatif dan evaluatif ini memperoleh kritik, karena penegasan semacam ini dinilai bersifat etnosentris.

Lebih lanjut Chilcote (2007) menjelaskan bahwa antropolog Alfred Kroeber dan sosiolog Talcott Parsons mengindikasikan kesepakatan mereka tentang konsep-konsep budaya dan masyarakat yang dapat dibedakan. Dengan mengakui bahwa di masa lalu para antropolog menggunakan “budaya” dan sosiolog menggunakan “masyarakat” sebagai pengertian yang secara sederhana ekuivalen dalam membedakan keturunan sosial dari keturunan biologis. Parsons mengidentifikasi tiga hal umum dalam teori antropologi budaya. *Pertama*, budaya tersalurkan berupa warisan atau tradisi sosial. *Kedua*, budaya harus dipelajari karena ia bukanlah perwujudan yang ada dengan sendirinya pada manusia. *Ketiga*,

budaya dirasakan bersama karena ia adalah produk interaksi manusia. Parson menggariskan budaya dalam pengertian tiga kategori fungsional atau sistem-sistem dasar, yaitu sistem-sistem keyakinan atau kognitif, sistem-sistem simbol ekspresif atau *cathetic*, dan sistem-sistem orientasi nilai atau evaluatif. Dari sinilah Parsons mengakui bahwa keyakinan-keyakinan, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai adalah relevan dengan suatu analisis tentang masyarakat. Parsons menganggap budaya terdiri dari sistem-sistem dengan organisasi internalnya. Dengan demikian, sistem-sistem budaya memiliki otonomi dalam tingkat tertentu.

Dalam ilmu politik, terdapat suatu upaya substansial untuk memandang budaya dalam konteks politik. Gabriel Almond dan Sidney Verba (1984) lebih menyukai budaya politik ketimbang karakter nasional, karena istilah tersebut memungkinkan mereka menggunakan kerangka kerja konseptual antropologi, sosiologi dan psikologi sekaligus.

Dalil-dalil konseptual budaya politik yang dapat diterima diidentifikasi secara jernih oleh Almond dan Verba (1984), yaitu:

1. *Keluhuran dan tanggung jawab sipil*. Yaitu suatu kepedulian tradisional ilmu politik dengan tema-tema klasik, terutama apa yang disebut bangsa Yunani sebagai keluhuran sipil (*civic virtue*). Dalam dunia kontemporer, budaya sipil akan mencerminkan ciri-ciri kepribadian demokratis, yaitu sikap hangat terhadap orang lain, berbagi nilai dengan sesama, dan lainnya.
2. *Demokrasi partisipatif dan pluralistik*. Budaya politik bersifat demokratis dan didalikan pada toleransi kemerdekaan individual dan pemerintah melalui sebuah konsensus.
3. *Orde melalui birokrasi rasional*. Yaitu suatu doktrin dan praktek suatu birokrasi rasional sebagai satu instrumen kekuatan politik demokrasi.
4. *Stabilitas melalui modernisasi*. Bahwa kondisi ekonomi dan sosial yang stabil berhubungan dengan indeks modernisasi, seperti derajat industrialisasi dan urbanisasi, tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan.

Dalam kaitan ini, dijelaskan bahwa budaya politik memberikan suatu batas-batas subyektif politik yang teratur yang diketemukan dalam dua tingkat: Pertama, bagi individu, budaya politik memberikan panduan kontrol perilaku politik yang efektif. Kedua, bagi kolektivitas, ia memberikan satu struktur sistematis nilai-nilai

dan pertimbangan-pertimbangan rasional yang memastikan koherensi kinerja institusi dan organisasi (Chilcote, 2007, h. 303).

Sementara bagi Gabriel Almond, budaya politik adalah pola-pola khusus orientasi tindakan politik yang mendasari suatu sistem pemerintahan. Artinya, pendekatan budaya politik menegaskan bahwa suatu sistem perlu terlihat absah (*legitimate*) di depan para warganya agar bisa tetap berlangsung. Baik Almond maupun Verba menolak gagasan bahwa perilaku politik paling tepat bila dijelaskan menurut pilihan rasional dari para aktor individu. Sebaliknya yang mendasari keberhasilan suatu masyarakat sipil adalah nilai inti bersama dan rasa percaya sosial antara individu dan insitusi politik. Inilah yang dimaksud bahwa budaya politik merupakan perantara penting antara masyarakat sipil dan negara. Budaya politik menyediakan penghubung antara perilaku individu dan perilaku sistem.

Diskursus tentang pentingnya budaya sipil dalam konteks budaya politik pluralistik –sebagaimana menjadi dalil konseptual kedua bagi Almond dan Verba–, dikuatkan secara operasional oleh Mohtar Mas'ood. Menurutnya, paling tidak, terdapat lima prasyarat konsolidasi menuju demokrasi, yaitu a) sistem politik yang memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik; b) ada kesepakatan mengenai aturan main politik dan semua pihak mematuinya; c) pihak-pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah; d) kemiskinan di kalangan masyarakat dapat diminimalkan; dan e) perpecahan etnik, kultural dan religiusnya tidak mendalam dan dapat dikompromikan (Mas'ood, 2001, h. xxii-xxiii).

Artinya, sebuah sistem pemerintahan yang stabil perlu berpijak di atas masyarakat sipil yang terpadu dan kuat. Dalam pengertian ini, masyarakat sipil bukan hanya bersandar pada kerangka hukum dan politik yang diberikan oleh negara, melainkan juga pada orientasi politik, sikap dan tujuan warga negaranya. Seringkali diasumsikan bahwa yang membuat demokrasi liberal menjadi pemerintahan yang begitu menarik adalah karena tatanan perilaku politik bersama, kewarhanegaraan universal dan penghargaan atas demokrasi yang representatif. Negara-negara yang tidak mampu mengembangkan topangan kultural demikian bagi demokrasi akan rentan terhadap otoritarianisme. Artinya, budaya sipil yang

mapan dicirikan oleh adanya keseimbangan antara rasa hormat warga negara kepada otoritas yang mapan di satu sisi dan keinginan mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses politik di sisi lainnya (Faulks, 2010, h. 167).

Beberapa kondisi yang diyakini bisa memperkuat budaya politik pluralistik, yaitu: a) wawasan kebangsaan yang tidak mematikan pluralisme, b) budaya multikultural yang kuat, c) penyelenggara birokrasi pemerintahan yang terbuka, d) generasi yang mewarisi budaya positif untuk pluralisme politik, dan e) komunitas agama yang toleran dan kohesif (Maliki, 2010, h. 179).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang Lebanon. Antara lain, Abdullah Zulkifli (2008) yang mengkaji tentang *Resolusi Konflik dalam Perang Saudara Lebanon 1975-1990. Studi Kasus Perjanjian Taif 1989*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perang saudara Lebanon yang terjadi tahun 1975-1990 adalah konflik internal yang muncul akibat gejolak politik regional dan perubahan demografi sebuah negeri yang rawan dengan konflik sektarian. Walaupun Lebanon dalam konstitusinya telah menyatakan diri sebagai bagian dari Arab dan akan netral dalam setiap konflik regional, pada kenyataannya kelompok-kelompok keagamaan di Lebanon dengan milisinya masing-masing tidak bisa diam saja melihat gejolak politik regional. Sistem sektarianisme (confessionalism) sebagai resolusi konflik yang membagi kekuasaan dan mengakomodir kepentingan berdasarkan kelompok-kelompok keagamaan telah dilakukan sejak Lebanon merdeka tahun 1946 dan berkembang seiring dengan perubahan politik dan demografi. Namun ketika menghadapi kekerasan di lapangan, konsep ini tidak berdaya. Tidak sedikit kelompok-kelompok dalam Lebanon yang ingin menghapuskan konsep ini dan memenangkan kepentingan kelompoknya. Ditambah dengan keterlibatan negara-negara tetangga membuat perang saudara ini akhirnya berlangsung terus-menerus selama lebih 15 tahun.

Upaya mediasi yang melibatkan PBB, Liga Arab, negara-negara tetangga telah dilakukan. Pada tahun 1989 dilangsungkan pertemuan di Taif dan menghasilkan *Perjanjian Taif* yang menjadi dasar bagi resolusi konflik dan rekonsiliasi Lebanon. Perjanjian Taif baru benar-benar bisa diimplementasikan

tahun 1990 dan masih menyisakan sejumlah persoalan, antara lain masalah pendudukan Israel, milisi Hizbullah, peran Suriah, dan de-konfessionalisme yaitu penghapusan sistem pembagian kekuasaan berdasarkan keagamaan yang dipandang tidak demokratis.

Penelitian lain dilakukan Mohammad Riza Widyarsa (2007) tentang *Pola Patron-Client Dalam Gerakan Politik Masyarakat Arab: Studi Kasus Zaim Di Lebanon (1943-2006)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola patron-client dapat tetap berjalan di Lebanon karena pola ini adalah sebuah pola yang 'nail'. Pola patron-client dapat memasuki dan 'berasimilasi' dengan sistem republik. Zuama' juga dipandang sebagai pengikat sebuah komunitas, tidak hanya sekedar pemimpin komunitas. Sistem *patriarchal* yang telah membudaya di Lebanon selama berabad-abad juga menjadi penyebab mengapa pola patron-client tetap berjalan di Lebanon. Zuama' dipandang sebagai sang ayah dan *provider*, yang otoritasnya tidak dapat diganggu gugat oleh komunitas. Namun dengan berjalannya waktu, kekuasaan zuama' tergeser dengan naiknya pamor politisi-politisi non-zuama', khususnya dari warga Syiah. Hal ini dikarenakan zuama' tidak dapat memberikan sesuatu kepada komunitas, khususnya warga Syiah.

Sementara beberapa penelitian lainnya yang berkaitan dengan wilayah Lebanon namun sesungguhnya lebih memokus kepada perkembangan gerakan Hizbullah yang berada di Lebanon. Misalnya penelitian Pebri Edy (2008) tentang *Aktualisasi Gerakan Islam Politik Dalam Krisis Politik Di Lebanon (Studi Kasus Kemenangan Hizbullah Atas Israel Pada Perang 2006)*, penelitian Fahmi Salsabila (2008) tentang *Geopolitik Dalam Konflik Regional (Studi Kasus Kepentingan Nasional Iran Dalam Kelompok Hizbullah)*, penelitian Friane Aurora (2010) tentang *Gerakan Politik Kelompok Muslim Syiah di Lebanon (Studi Kasus Transformasi Hizbullah Dari Gerakan Perlawanan Menjadi Partai politik Tahun 1992-2009)*, dan penelitian Ali Rido (2010) tentang *Pengaruh Gerakan Hizbullah Terhadap Persatuan Umat Dan Kebangkitan Islam Di Tengah Konflik Sektarian Di Lebanon*.

Demikian halnya, buku yang ditulis oleh Mayor Ari Yulianto (2010) tentang *Lebanon: Pra dan Pasca Perang 34 Hari Israel vs Hizbullah*. Buku yang diterbitkan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama ini lebih merupakan catatan

pengalaman penulis sebagai staf *Intelligent Assessment UNIFILL* saat menyaksikan langsung konflik laten Israel vs Hizbullah di wilayah perbatasan.

Jika diamati, penelitian yang disebutkan pertama di atas membatasi kajiannya kepada Perjanjian Taif 1989 sebagai salah satu resolusi konflik dalam perang saudara Lebanon 1975-1990. Sementara penelitian kedua mencoba memetakan tipologi kepemimpinan masyarakat yang telah membudaya di Lebanon selama berabad-abad. Penelitian-penelitian yang disebutkan sesudahnya lebih memokus kepada gerakan Hizbullah. Seluruh penelitian tersebut tidak membahas tentang perkembangan mutakhir sosial politik Lebanon era perubahan yang diawali pada awal tahun 2000-an dan mencapai puncaknya pada tahun 2005. Kajian tentang Revolusi Cedar dan implikasinya pada politik Suriah di Lebanon sebagaimana dibahas dalam penelitian ini pada gilirannya dapat menggambarkan bagaimana rakyat Lebanon berupaya mengkonstruksi kembali kekuatan nasionalnya, sebagai tuntutan sebuah era perubahan yang ditandai dengan bangkitnya Revolusi Cedar dan keluarnya Suriah dari wilayah Lebanon, sebagai indikator utama. Pada posisi inilah kiranya penelitian ini dipandang urgen dan relevan.

2.3 Kerangka Konseptual

Hubungan Suriah-Lebanon pasca meletusnya konflik sosial dan politik di Lebanon era 1970-an lebih didominasi oleh peran politik Suriah di Lebanon. Suriah mendapatkan legitimasi yang cukup kokoh, termasuk persetujuan Amerika Serikat untuk menjalankan peran politiknya secara signifikan sejak tahun 1976.

Kondisi Lebanon yang tidak stabil dipicu oleh perang saudara yang tak kunjung reda sehingga membuat rapuh bangunan politik dan pemerintahan. Suriah tampak memanfaatkan momentum tersebut secara meyakinkan. Selama di Lebanon, politik Suriah mendominasi seluruh aspek kehidupan bernegara, meliputi kehidupan sosial, ekonomi dan politik Lebanon, dan memberikan implikasi politik bagi Lebanon dan Suriah itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, tumbuh harapan dan sekaligus kesadaran di tengah masyarakat Lebanon atas pentingnya perubahan kehidupan baik pada tataran sosial maupun politik di seluruh kawasan Lebanon. Kebutuhan terhadap

perubahan, tidak saja membuka jalan bagi lahirnya gerakan reformasi dan demokratisasi di Lebanon, melainkan juga telah memfasilitasi kerjasama di antara berbagai kelompok yang selama ini berseberangan, baik secara ideologi, politik maupun kepentingan untuk bersatu padu ke arah tujuan yang sama, yaitu menyuarkan gerakan pro-demokrasi di Lebanon dan menyusun kekuatan politik yang efektif untuk menentang pendudukan rezim Suriah di Lebanon. Puncaknya, gerakan tersebut memperoleh momentum saat gejolak politik Lebanon semakin memanas menyusul terbunuhnya mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 14 Februari 2005. Pasca peristiwa tersebut, rakyat Lebanon mengadakan rapat umum pro-demokrasi yang terbesar yang pernah ada di Timur Tengah dan memperoleh dukungan yang luas berbagai pihak termasuk dunia Internasional.

Gerakan yang diidentifikasi sebagai Revolusi Cedar itu menyuarkan kebebasan dengan tujuan utama menuntut Suriah agar segera meninggalkan Lebanon. Pada akhirnya, Suriah bersedia mengakhiri peran politiknya secara langsung di Lebanon seiring kekuatan militer Suriah meninggalkan Lebanon pada akhir April 2005. Pasca Revolusi Cedar, rakyat Lebanon melangsungkan pemilihan umum pertama tanpa campur tangan Suriah. Namun demikian, Suriah tetap mengawal kepentingan politiknya di Lebanon dengan cara membangun jaringan politik dengan Hizbullah, termasuk dalam rangka menghadapi tuntutan Lebanon atas penyelidikan pelaku pembunuhan atas Rafik Hariri, dimana Suriah diduga terlibat di dalamnya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan tesis ini ruang lingkup penelitian yang akan dibahas adalah masalah hubungan Suriah-Lebanon. Secara khusus, bahasannya akan dibatasi pada; *Pertama*, faktor pendorong lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon. *Kedua*, tujuan Revolusi Cedar, aksi politik yang dilakukan dan respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar. *Ketiga*, implikasi Revolusi Cedar terhadap peran politik Suriah di Lebanon.

Adapun batasan waktu yang akan diteliti adalah sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, yaitu masa lima tahun pertama setelah Syria mengakhiri peran politiknya di Lebanon secara langsung selama hampir tiga dekade (1976-2005). Batasan waktu tersebut dipilih dengan beberapa alasan. *Pertama*, dari sisi praksis, batasan waktu lima tahun akan lebih memudahkan penulis menganalisis masalah sehingga masing-masing bahasan diharapkan akan lebih terkon trol secara utuh. *Kedua*, dari sisi substansi, waktu lima tahun pertama merupakan masa transisi peralihan kondisi dari suasana politik yang penuh tekanan dan ketergantungan kepada pihak lain, berganti ke dalam suasana politik keterbukaan dimana rakyat Lebanon berupaya menyelenggarakan birokrasi pemerintahan atas kehendak dan pilihannya sendiri. *Ketiga*, pada lima tahun pertama sarat dengan tarik-menarik kepentingan di antara berbagai kelompok di Lebanon dan Suriah, menyusul rencana Komisi Internasional PBB atas kasus pembunuhan Rafiq Hariri, merilis hasil penyelidikannya selama lima tahun.

3.2 Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang, baik dalam tindakan keseharian maupun dalam penelitian ilmiah. Tegasnya, paradigma adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir; yaitu ontologi, epistemologi dan metodologi. Paradigma memuat

pandangan-pandangan awal yang membedakan, memperjelas dan mempertajam orientasi berpikir seseorang. Dengan demikian, paradigma membawa konsekuensi praktis bagi perilaku, cara berpikir, interpretasi dan kebijakan dalam pemilihan masalah. Pada dasarnya, paradigma memberikan representasi dasar yang sederhana dari suatu pandangan yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil keputusan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, dimana ia berupaya memberikan tafsiran yang rinci atas *setting* kehidupan keseharian, sesuai dengan alasan dan tujuan penelitian ini, yaitu berupaya memahami dan mendalami masalah bagaimana sesungguhnya realitas politik Lebanon yang menjadi faktor pendorong ke arah lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon, lalu apa yang menjadi tujuan Revolusi Cedar, aksi politik apa yang dilakukan dan bagaimana respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar, kemudian bagaimana dan dalam hal apa saja Revolusi Cedar berimplikasi kepada politik Suriah di Lebanon.

3.3 Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bersifat induktif dimana peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi (Syaodih, 2005).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh, tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2006). Dengan demikian, karakteristik penelitian ini adalah: a) dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan dalam hal ini, peneliti adalah instrumen kunci; b) lebih bersifat deskriptif dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada angka; c) lebih

menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*; d) melakukan analisis data secara induktif; dan e) lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati (Sugiono, 2008).

Digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah sesuai dengan karakteristik masalah dan pertanyaan penelitian serta pernyataan maksud-tujuan dilakukannya penelitian yang secara jelas mengungkapkan asumsi-asumsi paradigma kualitatif. Sebagai penelitian yang berangkat dari filsafat konstruktivisme, maka ia memandang kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial.

Selanjutnya, sesuai dengan jenisnya, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif non-interaktif (*non interactive inquiry*) atau penelitian analitis, dimana peneliti mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Dalam hal ini, peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati.

Minimal ada tiga macam penelitian analitis atau studi non-interaktif, yaitu analisis konsep, historis dan kebijakan. Analisis konsep merupakan kajian atau analisis terhadap konsep-konsep penting yang diinterpretasikan pengguna secara beragam. Analisis historis menganalisis, antara lain data kegiatan, peristiwa, program dan kebijakan. Sementara analisis kebijakan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan tertentu. Pengkajian diarahkan untuk menemukan kedudukan, makna, keterkaitan antar dokumen, dampak dan konsekuensi atas kebijakan tersebut (Sugiono, 2008). Sesuai dengan data dokumen yang dikumpulkan, maka pada prakteknya, analisis data akan dilakukan terhadap ketiga jenis analisis tersebut.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam pengumpulan data kualitatif dapat berupa perseorangan atau kelompok. Unit analisis terkait dengan obyek masalah penelitian. Obyek masalah yang dijadikan unit analisis adalah suatu hal yang spesifik dan penting. Unit analisis penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1:
Unit Analisis Penelitian

Obyek Masalah	Hubungan Suriah-Lebanon
Unit Analisis	Revolusi Cedar dan implikasinya pada politik Suriah di Lebanon
Sub-unit Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendorong lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon; 2. Tujuan Revolusi Cedar, aksi politik yang dilakukan dan respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar; 3. Implikasi Revolusi Cedar terhadap politik Suriah di Lebanon.

3.5 Sumber dan Karakteristik Data

Sesuai dengan jenisnya sebagai penelitian kualitatif non-interaktif (*non interactive inquiry*), maka sumber data penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau sumber tertulis berupa sumber buku dan majalah ilmiah, arsip dan dokumen resmi.

Adapun data dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih kepada data dokumen eksternal, yaitu data dokumen yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, bulletin, jurnal, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada publik. Beberapa jenis dokumen yang dijadikan pertimbangan dalam penelitian, yaitu: a) surat, memorandum dan pengumuman resmi, b) agenda, kesimpulan pertemuan, dan laporan peristiwa lainnya, c) dokumen administratif, proposal, laporan kemajuan dan dokumen intern lainnya, d) penelitian atau evaluasi resmi pada situs yang sama, dan e) kliping baru dan artikel di media massa.

3.6 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, maka instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber/ informan

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atas berbagai materi yang relevan dengan tema kajian. Dengan demikian, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada dokumen dan rekaman arsip. Studi dokumen dan arsip dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap data-data.

3.7 Validasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti akan melakukan proses validasi dan pemeriksaan keabsahan data. Proses validasi data akan dilakukan dengan cara menentukan kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mengacu kepada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan data, yaitu: a) standar kredibilitas. Teknik pemeriksaan datanya dilakukan dengan pengecekan yang melibatkan teman sejawat melalui diskusi, melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data; b) standar transferabilitas. Teknik pemeriksaan datanya dilakukan dengan berdasarkan hasil penilaian para pembaca laporan hasil penelitian; c) standar dependabilitas. Teknik pemeriksaan datanya dilakukan dengan cara audit dependabilitas itu sendiri melalui review terhadap seluruh hasil penelitian; dan d) standar confirmabilitas. Teknik pemeriksaan datanya dilakukan dengan memfokuskan pemeriksaan kepada kualitas dan kepastian hasil penelitian (Kanto, 2003, h. 59-62).

3.8 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, proses analisis data penelitian bersifat *induktif*. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Sugiono, 2008). Secara umum, proses analisis data penelitian ini mencakup: pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja, sebagaimana menjadi kriteria teknis analisis komparatif konstan (*constant comparative analysis*).

Pada prakteknya, proses analisis data dilakukan dengan cara:

- a) Mencatat hasil pengumpulan data lapangan dan memberinya kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
- b) Mengumpulkan, memilah-milah mana yang penting dan akan dipelajari, mengklasifikasikan, mensintesiskan, menyusun ke dalam pola, membuat ikhtisyar dan membuat indeksinya;
- c) Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Dari gambaran metodologi di atas, maka gambaran bagaimana hubungan masalah penelitian dengan logika penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2 :

Hubungan Masalah Penelitian dan Logika Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Deskripsi Masalah	Data yang Diperlukan	Sumber Data	Pengumpulan Data	Analisis Data
Bagaimana realitas politik Lebanon menjadi faktor pendorong ke arah lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon?	Mengetahui faktor pendorong lahirnya Revolusi Cedar di Lebanon	Informasi tentang politik Lebanon yang menjadi pendorong lahirnya Revolusi Cedar	Dokumen	Studi Dokumen	Analisis komparatif konstan
Apa yang menjadi tujuan Revolusi Cedar, aksi politik apa yang dilakukan dan bagaimana respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tujuan Revolusi Cedar 2. Mengetahui aksi politik yang dilakukan dalam Revolusi Cedar 3. Mengetahui respon rakyat Lebanon terhadap Revolusi Cedar 	Informasi menyeluruh tentang Revolusi Cedar	Dokumen	Studi Dokumen	Analisis komparatif konstan
Bagaimana dan dalam hal apa saja Revolusi Cedar berimplikasi kepada politik Suriah di Lebanon?	Mengetahui implikasi Revolusi Cedar terhadap politik Suriah di Lebanon	Informasi ttg implikasi Revolusi Cedar pada politik Suriah di Lebanon	Dokumen	Studi Dokumen	Analisis komparatif konstan

BAB 4
REALITAS POLITIK LEBANON SEBAGAI FAKTOR PENDORONG
LAHIRNYA REVOLUSI CEDAR DI LEBANON

4.1 Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat Sipil Lebanon

Bangkitnya kekuatan sipil Lebanon melawan pendudukan Suriah di atas tanah air mereka dapat diidentifikasi dalam beberapa contoh, yaitu aksi para jurnalis, meningkatnya keterlibatan umat muslim Lebanon dan sikap oposan kelompok Kiri. *Pertama*, adalah Gibran Tueni, seorang editor surat kabar Lebanon *an-Nahar* yang menerbitkan "sebuah surat terbuka pada 23 Maret 2000 kepada Basyar al-Asad selaku pewaris rezim Suriah dan menyerukan agar Suriah segera menarik pasukannya dari seluruh kawasan Lebanon." (Pipes, 2000, h. 21-27). Disusul Aliah 'al-Sulh, putri mantan Perdana Menteri Lebanon, Riyadh al-Sulh yang menulis sebuah editorial yang sangat kritis terhadap Suriah di harian yang sama pada Maret 2001 (*An-Nahar* Beirut, 20/03/2001). Keduanya, mencoba memecahkan tabu yang tidak mustahil membahayakan kehidupan siapapun yang mencoba melakukannya. Namun keberanian para jurnalis ini telah melandasi begitu kuatnya kebutuhan terhadap perubahan, sehingga apa yang dilakukannya justeru membuka jalan bagi aliran editorial dalam berbagai publikasi lainnya dengan misi yang serupa. Selanjutnya, sebagaimana sudah dapat diduga sebelumnya, keberanian Gibran Tueni harus ia tebus dengan harga yang sangat mahal. Ia tewas dalam sebuah peristiwa peledakan bom yang –lagi-lagi– tidak akan pernah bisa diungkap siapa pelakunya.

Kedua, sejak awal tahun 1990-an, hampir semua elit politik dan tokoh muslim Lebanon melontarkan kritik secara tidak langsung terhadap pendudukan Suriah. Misalnya, dalam sebuah debat parlemen di televisi tentang kehadiran Suriah di Lebanon, mantan Perdana Menteri Lebanon dan anggota parlemen Sunni Umar Karami mengusulkan diadakannya semacam kongres nasional yang secara khusus membahas persoalan tersebut. Anggota parlemen dan pemimpin

Druze Walid Jumblatt mengkritisi masalah gangguan Suriah terhadap urusan politik dalam negeri Lebanon. Ia menyerukan kepada Damaskus untuk meninjau kembali penempatan pasukannya di kawasan. Najib Miqati, seorang politisi Sunni terkemuka dari Tripoli dan mantan juru bicara parlemen Husayn al-Husayni yang juga seorang politisi senior Syiah, telah menyatakan sentimen yang sama. Husayni mempertanyakan perkembangan hubungan Lebanon-Suriah, mengingat ia memiliki andil saat memimpin penandatanganan Perjanjian Thaif 1989, dimana ia duduk sebagai juru bicara parlemen (Gambill, 2001, h. 41-49).

Dari sisi yang lain, sikap oposan ini dapat mencerminkan fakta bahwa di bawah pendudukan Suriah, kalangan muslim Lebanon tampak lebih merasakan situasi kehidupan yang lebih sulit ketimbang orang-orang Kristen. Sebagai contoh, sebagian besar warga Lebanon yang diculik oleh pasukan Suriah sepanjang perang sipil dan sesudahnya adalah mereka yang beridentitas muslim. Faktanya, bahwa pasukan Suriah memang dikerahkan dalam jumlah besar di wilayah-wilayah muslim Lebanon selama dua puluh lima tahun terakhir. Hal ini didukung pula oleh data empiris bahwa hanya segelintir saja dari 121 tahanan yang dirilis oleh Suriah pada Maret 1998 adalah beragama Kristen. Sebagian besar tahanan dari empat puluh enam orang yang dirilis pada bulan November 2000 juga Muslim. Penculikan dan pembunuhan ulama Kristen oleh pasukan Suriah atau milisi yang berafiliasi kepada Suriah relatif tidak umum, sementara tokoh dan ulama muslim yang dipandang vokal sering menjadi sasaran. Selain itu, tokoh-tokoh muslim yang menyerukan penarikan Suriah juga diklaim sebagai kelompok ekstrim. Mantan Mufti Lebanon Khalid Sheikh Hasan dibunuh pada Mei 1990 setelah menentang Suriah. Nasib serupa menimpa dua anggota parlemen muslim Sunni yang secara eksplisit mengutuk pendudukan Suriah. Nazim Qadri dibunuh dua hari sebelum Konferensi Thaif 1989 setelah menyerukan penarikan Suriah. Seminggu kemudian, Abd al-Majid ar-Rifa'i yang mengutuk pendudukan dari luar negeri, memandang tanpa daya ketika dua ratus pengikutnya di Tripoli ditangkap oleh intelijen Suriah (Gambill, 2001, h. 41-49). Fakta ini jelas mengesampingkan sedikit tokoh politik dan pemimpin muslim yang pro-pendudukan Suriah sebagai cerminan realitas politik kekuasaan, dan tidak mewakili keinginan penduduk muslim Lebanon pada umumnya.

Ketiga, oposisi terbuka terhadap kehadiran Suriah di Lebanon juga tidak hanya ditunjukkan oleh kelompok-kelompok sektarian, melainkan mulai menyebar ke seluruh spektrum ideologis, dalam hal ini kelompok Kiri. Ilustrasi paling dramatis dari kecenderungan ini adalah pemberontakan di dalam Partai Komunis Lebanon (LCP) oleh faksi pembangkang yang dipimpin oleh Elias 'Atallah, dimana ia menyerukan kepada penilaian kembali hubungan Lebanon dengan Suriah. Dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan oleh pers Lebanon pada September 2000, ia mengutuk dampak ekonomi yang merugikan akibat pendudukan Suriah. Di Hari Kemerdekaan Lebanon, November 2000, kelompok mahasiswa Kiri bergabung dengan FNC dalam mengorganisir demonstrasi besar-besaran di luar Museum Nasional untuk memprotes kehadiran Suriah (Gambill, 2001, h. 41-49). George Hawi, mantan Sekretaris Jenderal LCP, mendirikan Kelompok Konsultatif Nasional pada 2001 dengan didukung oleh politisi Kristen konservatif, seperti Amin Gemayel dan Nayla Mouawad, dengan tujuan menekan Presiden Emile Lahoud untuk menangani isu-isu hubungan bilateral Suriah-Lebanon (*The Daily Star* Beirut, 25/01/2000).

Damaskus dan pemerintahan pro-Suriah di Lebanon memberikan reaksi terhadap gelombang oposisi terbuka pada otoritas Suriah dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda. Sejak April 2000, puluhan aktivis mahasiswa terluka atau dikenakan penahanan oleh pasukan keamanan Lebanon. Pada 8 Desember, jurnalis *an-Nahar* Adnan Sya'ban ditangkap setelah menulis sebuah artikel yang mengkritik Deputy Kepala Intelijen Militer Suriah di Lebanon, Rustum Ghazali (Gambill, 2001, h. 41-49). Tindakan ini bagaimanapun semakin membangkitkan semangat perdebatan tentang kehadiran Suriah di tengah masyarakat sipil Lebanon. Mereka yang berpartisipasi membangun kesadaran jelas menghadapi resiko yang tidak kecil, namun faktanya selalu ada yang melakukan dan menciptakan efek bola salju, sehingga mendorong yang lainnya melakukan hal serupa.

Dalam sebuah konferensi pada 14-15 November yang diselenggarakan oleh Gerakan Budaya Antelias, para pembicara memfokuskan bahasannya terutama perihal tanggung jawab dan pendekatan yang lemah yang ditunjukkan oleh pemerintah Lebanon dalam hubungannya dengan Damaskus, khususnya di bidang

ekonomi. Konferensi ini seolah-olah dirancang untuk membahas langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan Lebanon-Suriah. Kehadiran agen intelijen di antara para peserta konferensi tidak menyurutkan semangat para peserta untuk berdiskusi secara lepas. Sekretaris Umum Gerakan Budaya, Isam Khalifa bahkan sempat menyindir agen intelijen dengan mengatakan kepada para peserta bahwa "materi diskusi konferensi telah direkam dengan baik oleh mereka, dan karena itu akan segera sampai dengan cepat ke rezim yang sedang berkuasa." (*The Daily Star* Beirut, 16/12/2000).

Strategi lain yang digunakan Suriah adalah dengan mengizinkan kembalinya permusuhan Hizbullah dengan Israel. Cara ini diambil dengan tujuan mengalihkan perhatian rakyat Lebanon kepada musuh bersama, yaitu pihak Zionis dengan mengangkat kembali isu pendudukan Israel atas wilayah Lebanon, yaitu wilayah Sheba. Seperti biasa, Presiden Lebanon Emile Lahoud mempertegas bahwa kritik terhadap Suriah adalah "diarahkan oleh pihak luar negeri." Namun tampaknya, cara ini tidak berpengaruh maksimal. Publik tidak memberikan respon yang signifikan tentang sengketa Sheba. Bahkan sebaliknya, strategi Suriah menjadi bumerang karena dapat dibaca dengan mudah. Editorial media berbahasa Inggris *Daily Star* menulis dalam bahwa operasi Hizbullah dua hari sebelumnya di Lebanon Selatan adalah "untuk mengalihkan perhatian dari isu kehadiran Suriah." (*The Daily Star* Beirut, 18/11/2000).

Suriah juga sangat mahir menekan mobilisasi gerakan pembangkang dengan cara mengooptasi elit-elit politik Lebanon sehingga mereka bersedia mengorbankan cita-cita dan harapannya. Akibatnya, selama sepuluh tahun terakhir, gerakan oposisi terhadap otoritas Suriah di Lebanon tidak cukup terorganisir dan sebagian besar tanpa pemimpin. Namun, situasi berubah di tahun 2000-an. Tueni dan generasi baru oposisi justeru mengambil langkah yang lebih berani untuk menyampaikan kritikan tajam terhadap pendudukan Suriah. Mereka semakin yakin bahwa patron Suriah atas Lebanon tidak akan menjamin terhadap politik Lebanon di masa yang akan datang.

Selanjutnya, Basyar berusaha untuk mencairkan pengaruh kampanye anti-Suriah dengan menawarkan kepada politisi Kristen untuk kembali masuk ke dalam kehidupan politik Lebanon. Namun, hal ini benar-benar menjadi

bumerang. Misalnya, mantan Presiden Amin Gemayel diizinkan untuk kembali ke Lebanon pada Juli 2004 dengan harapan ada konsesi agar ia menahan diri untuk tidak secara terbuka menyerang pendudukan Suriah. Gemayel awalnya bertahan, namun tujuh bulan kemudian ia berubah. Pada bulan Februari 2005, Gemayel menjadi berita utama saat memberikan kuliah di Universitas Amerika Lebanon ia menyatakan bahwa "Lebanon diduduki dan Lebanon telah dicuri." (*An-Nahar* Beirut, 27/02/2001). Politisi Kristen lain yang sebelumnya dilarang berkiprah di dunia politik juga diizinkan untuk bergabung dalam koalisi Pemilu yang dikelola Suriah untuk memenangkan kursi parlemen. Namun, seperti halnya Gemayel, mereka telah menunjukkan tanda-tanda sedikit penghormatan kepada kesepakatan yang dibuat oleh Damaskus.

Taktik lain yang dilakukan Basyar adalah membebaskan ujian masuk bagi calon mahasiswa di perguruan tinggi dan merilis empat puluh enam tahanan Lebanon dari penjara. Pada bulan Januari 2005, Sekretaris Jenderal Komite Tinggi Suriah-Lebanon mengumumkan bahwa Damaskus bersedia untuk membahas cara mengatur kehadiran pekerja Suriah di Lebanon (*Tisreen* Damaskus, 13/01/2001). Selain itu, untuk mengurangi visibilitas pasukan Suriah, Damaskus mengevakuasi beberapa pos pemeriksaan di sekitar Beirut. Suriah juga meninggalkan pos pemeriksaan al-Jubbeh Hadath di Distrik Bishari. Lebih penting lagi, elit Suriah juga mengisyaratkan pemindahan pasukan Suriah ke Lembah Beka'a di Lebanon Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan Thaif 1989 (*An-Nahar* Beirut, 11/11/2000).

Di tengah tarik-ulur berbagai pola pendekatan yang dilakukan pihak Suriah, secara simbolis, gambar-gambar Hafez al-Asad dan Basyar tetap di mana-mana. Secara substantif, kehadiran militer Suriah di Lebanon juga tidak berkurang. Tentara dan agen intelijen Suriah terus melakukan tugasnya di setiap pos pemeriksaan di sepanjang jalan raya utama, di pintu masuk ke pusat-pusat perkotaan, dan di sekitar kantor departemen pemerintahan. Tampaknya, keengganan para penguasa Suriah untuk melepaskan diri dari Lebanon tidak begitu mengejutkan. Miliaran dolar setiap tahun yang diperoleh Suriah adalah berasal dari pendudukan. Aspek penting lainnya adalah bahwa Suriah merasa perlu melakukan kontrol militer atas Lebanon sekaligus mencegah tentara

Lebanon mengerahkan kekuatan di sepanjang perbatasan wilayah selatan yang ditinggalkan pasukan Israel pada bulan Mei.

4.2 Penarikan Mundur Militer Israel dari Lebanon Selatan

Pada tanggal 24 Mei tahun 2000, Israel menarik mundur pasukan militernya dari Lebanon Selatan. Tampaknya, akhir dari pendudukan Israel setelah selama delapan belas tahun menguasai Lebanon juga mempengaruhi pandangan banyak pihak khususnya rakyat Lebanon atas relevansi kehadiran Suriah di Lebanon. Di satu sisi, kepergian Israel juga telah mengurangi biaya pendudukan Suriah, karena dengan demikian, berarti Suriah tidak lagi mensponsori kelompok paramiliter Lebanon dalam konteks perlawanan terhadap Israel. Banyak pihak di Lebanon mengharapkan tekanan Amerika Serikat dan dunia Internasional atas penarikan mundur militer Suriah dari Lebanon, seiring terwujudnya penarikan mundur militer Israel dari kawasan Lebanon.

Mantan Menlu AS Madeleine Albright menyampaikan komentarnya pada bulan Juni 2000 bahwa "ia sangat berharap Lebanon akan mulai mengarahkan kekuatan keamanannya ke Lebanon Selatan dan Lebanon akan mengambil kendali secara penuh atas wilayah mereka sendiri, sementara semua pasukan asing meninggalkan wilayah tersebut." Komentar ini diwartakan secara luas di media massa Lebanon (Gambill, 2001, h. 41-49). Di sisi lain, butir Resolusi Dewan Keamanan PBB 520 yang menyebutkan tuntutan "penarikan mundur semua pasukan non-Lebanon" tampak menjadi pokok editorial surat kabar anti Suriah, menjadi tema demonstrasi kalangan mahasiswa dan dipidatikan oleh sejumlah figur oposisi di berbagai tempat. Resolusi Dewan Keamanan PBB 520 diadopsi pada 17 September 1982, setelah pembunuhan Presiden Lebanon Bashir Gemayel. Resolusi menuntut Israel agar segera mundur dari Lebanon dan bahwa kedaulatan Lebanon harus dihormati dalam rangka memulihkan pemerintahan yang stabil di Lebanon. Resolusi juga meminta Israel untuk mengembalikan daerah yang didudukinya sebelum 15 September 1982, sebagai langkah pertama menuju implementasi resolusi secara penuh.

Di samping itu, maka tema pendudukan Israel pun tidak lagi menjadi isu relevan yang bisa ditawarkan oleh rezim Lebanon pro-Suriah untuk menyalurkan

ekspresi nasionalisme rakyatnya. Dalam iklim politik otoriter yang telah berlaku di Lebanon selama sepuluh tahun terakhir, maka ungkapan protes atas pendudukan Israel adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan bagi rakyat Lebanon untuk mengartikulasikan secara terbuka perasaan khawatir dan marah rakyat Lebanon atas hilangnya kedaulatan negara mereka. Saat militer Israel pergi, Suriah jelas menjadi target dari kemarahan tersebut.

4.3 Suksesi Kepemimpinan Suriah

Awal Juni tahun 2000, kurang dari tiga minggu setelah penarikan Israel Mei 2000 dari Lebanon Selatan, Presiden Suriah Hafez al-Asad wafat dan digantikan oleh Basyar al-Asad, putra kedua dalam keluarga Asad. Banyak pihak meyakini bahwa sesungguhnya Basyar bukanlah sosok yang dinominasikan sebagai pelanjut kekuasaan Asad. Orang yang disiapkan sang ayah untuk melanjutkan tampuk kepemimpinannya adalah putra pertamanya, Basil al-Asad. Basil tergolong perwira militer yang cemerlang dan penuh karisma di antara pasukan elite Suriah. Namun demikian, karir Basil tidak berumur panjang saat ia harus mengalami kecelakaan mobil dalam sebuah perjalanan darat menuju bandara di Damaskus tahun 1994. Banyak rumor politik yang berkembang mengiringi kematiannya di tengah iklim politik Suriah yang cenderung tertutup. Sementara putra Asad lainnya yang juga menekuni karirnya di dunia militer adalah Maher al-Asad. Maher saat ini menempati jabatan yang cukup prestisius sebagai komandan intelijen Suriah (mukhabarat). Maher pula-lah yang saat ini aktif berada di barisan paling depan untuk mem-*back-up* pemerintahan Basyar di tengah gejolak politik Suriah yang kian memanas seiring meluasnya gerakan perlawanan rakyat Suriah terhadap rezim Basyar akhir-akhir ini dan meletus pertama kali di Kota Dar'a dan Banias.

Sejak enam tahun sebelum kematiannya, Hafez al-Asad terlibat aktif mengembangkan keterampilan putra keduanya dalam kerangka suksesi baik pada aspek kompetensi maupun pengalamannya di dunia militer. Pasalnya, Basyar lebih dahulu menekuni pendidikannya pada kedokteran mata di Inggris. Karir Basyar bergerak cepat, baik pada posisi militer, partai maupun pemerintahan. Setelah diangkat menjadi kapten pada tahun 1994, dua tahun kemudian Basyar

dipromosikan untuk memperoleh pangkat letnan kolonel. Pada Januari tahun 2000, ia dianugerahi pangkat kolonel dan lima bulan kemudian, tepatnya bulan Juni di tahun yang sama karirnya melejit kencang. Basyar diangkat menjadi jenderal bintang tiga dan langsung diberi kepercayaan untuk mengomandani angkatan bersenjata Suriah. Sementara di sisi lain, posisi Basyar di lingkungan partai politik pun diyakini sebagai tiket yang memudahkan baginya untuk meraih karir selanjutnya. Partai Ba'ats dan posisi Basyar sebagai komandan wilayah merupakan kendaraan politik yang paling penting bagi Basyar untuk memegang tampuk kepemimpinan Suriah. Komandan wilayah merupakan organ yang sangat penting dalam Partai Ba'ats. Konstitusi Suriah pun memosisikan komandan wilayah sebagai batu loncatan bagi seseorang ke puncak kekuasaan. Konstitusi Suriah pula yang memberikan jalan yang lapang bagi Basyar untuk diangkat menjadi Presiden Suriah pasca Hafez al-Asad, setelah salah satu butir kriteria pencalonan presiden yang mensyaratkan usia 40 tahun dirubah menjadi 34 tahun, sesuai dengan usia sang calon presiden (Bronson, 2000, h. 91-105).

Dalam konteks politik Lebanon, peralihan kepemimpinan Suriah dari Hafez al-Asad ke Basyar al-Asad dipahami oleh rakyat Lebanon dari perspektif perubahan politisasi Lebanon oleh Suriah, yaitu munculnya harapan-harapan baru di kalangan rakyat Lebanon terhadap perubahan situasi politik di Lebanon. Sebelumnya, Suriah menancarkan pengaruh politiknya secara signifikan di Lebanon sejak pecahnya perang saudara di Lebanon sepanjang 1975-1990 yang mengakibatkan negara kehilangan kontrol keamanan. Digagas oleh Hafez al-Asad, Suriah berperan penting membantu Lebanon memulihkan keadaan pasca perang. Dalam periode pasca perang itu, Suriah menjalankan kontrol keamanan, menangani pelayanan sosial dan persoalan ekonomi (Salem, 2006, h. 2). Meskipun Kesepakatan Thaif 1989 antara lain menyerukan terhadap penarikan pasukan asing dari Lebanon, namun kehadiran Suriah di Lebanon tetap berlanjut atas persetujuan secara diam-diam dari pemerintahan George W Bush dengan alasan untuk menjaga stabilitas dalam negeri Lebanon. Setelah mengirim tentara ke Lebanon, Asad memperlakukan Lebanon bak negara koloni. Dalam banyak hal, Damaskus sangat berperan menentukan arus politik yang berkembang di Lebanon, termasuk posisi-posisi dalam jabatan, bahkan untuk pejabat tinggi

setingkat presiden sekalipun. Untuk menopang ambisinya, Suriah mendominasi seluruh masyarakat sektarian Lebanon. Di antara orang-orang Kristen adalah Presiden Lebanon Emile Lahoud, komandan pasukan Lebanon Michel Suleiman, 'Umar Karami dari kalangan Sunni Tripoli dan Perdana Menteri Lebanon antara 1990 dan 1992, sedangkan Juru Bicara Parlemen Nabih Birri mewakili kepentingan Suriah dalam komunitas Syiah.

Meskipun harapan-harapan itu sesungguhnya sudah tumbuh sebelumnya ketika Hafez memegang kendali, namun dalam artian menjadi kesadaran kolektif yang berwujud kepada gerakan bersama seiring perubahan kondisi sosial politik yang terjadi baik di Suriah maupun Lebanon, tampaknya baru muncul dan dirasakan secara kuat manakala terjadi pergantian presiden di Suriah. Dalam hal ini, sebagian besar rakyat Lebanon berharap agar kenaikan Basyar al-Asad menjadi Presiden Suriah dapat dijadikan momentum untuk meluruskan kembali hubungan patron-klien antara rezim Suriah dan Lebanon. Alasan yang dibangun dan memberikan dasar atas persepsi ini adalah; *pertama*, Basyar dipandang tidak terlalu ideologis atau cenderung temperamental untuk terus mempertahankan kontrol Suriah secara mutlak atas Lebanon. Karena itu, mereka sangat berharap pihak Damaskus bersedia menerapkan pendekatan yang lebih lunak dibanding sebelumnya. Alasan *kedua*, sebagai figur baru di kancah politik Timur-tengah yang terus bergejolak, Basyar dinilai belum menjadi cukup kuat untuk menghancurkan pihak-pihak yang mengambil sikap oposisi atas kewenangannya di Lebanon (Gambill, 2001, h. 41-49).

Harapan rakyat Lebanon seakan berbanding lurus dengan pernyataan awal yang dikemukakan Basyar saat pidato pelantikannya sebagai Presiden Suriah. Basyar sempat menyoroiti hubungan Lebanon-Suriah dalam pidatonya dan menyatakan tentang pentingnya reformasi hubungan Suriah-Lebanon sebagai "model hubungan antara dua negara-negara Arab" dan dikatakannya pula; "belum sempurna, karena itu membutuhkan banyak upaya untuk mencapai hubungan yang ideal demi kepentingan bersama, dan hal itu dapat dilakukan dengan cara menjawab kebutuhan dan aspirasi kedua negara." (William, 2005, h. 33-34).

Namun faktanya, perubahan yang sempat dijanjikan Basyar jauh panggang dari api. Pada prakteknya, Basyar tidak mampu menghadirkan semangat

perubahan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Sebagaimana tradisi yang sudah berkembang sebelumnya, tindakan represif justru pola yang digunakan Basyar untuk mengelola kebijakan yang diambil pada sisa semester pertama pemerintahan Presiden Lahoud. Suriah mengendalikan Lebanon melalui tiga organisasi, yaitu jaringan intelijen militer Suriah yang berbasis di Anjar di kawasan Lembah Bekaa Lebanon, mesin keamanan Pemerintahan Lahoud yang dikomandani oleh Kepala Direktorat Keamanan Umum Lebanon Jamil al-Sayyid, dan pihak penghubung tertentu yang dekat dengan gerakan Hizbullah dengan aparat militer yang canggih serta bebas dari kontrol apapun pihak Pemerintah Lebanon (William, 2005, h. 33-34). Suriah juga memperoleh dukungan kuat dari dua partai politik Syiah, yaitu Hizbullah dan Amal. Sementara Basyar sendiri memposisikan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah sebagai penasihat jika bukan mentor. Sebelumnya, Hafez al-Asad sendiri lebih memandang Hizbullah sebatas instrumen politik belaka. Karena itu, jika ia masih hidup dapat dipastikan tidak akan pernah menyetujui pola hubungan Suriah-Hizbullah yang dikembangkan anaknya. Basyar mendukung penuh pergerakan Hizbullah yang tetap berkeinginan untuk menjadi pemain regional setelah penarikan Israel. Karena itu, untuk memfasilitasi berlanjutnya konfrontasi Hizbullah dengan Israel, Suriah dan Hizbullah menyoroti kawasan pertanian Sheba' yang diklaim sebagai milik Lebanon namun diduduki oleh Israel sejak tahun 1967

Puncaknya, empat tahun kemudian Basyar justeru mengesampingkan Konstitusi Lebanon. Pada bulan Agustus 2004, Presiden Suriah Basyar al-Asad dianggap banyak pihak telah melakukan penghinaan terhadap kedaulatan Lebanon. Hal itu terjadi ketika Basyar memerintahkan agar Konstitusi Lebanon dirubah sehingga memungkinkan bagi klien Suriah, Emile Lahoud untuk menjalani masa jabatan presiden yang ketiga kalinya. Tepatnya, pada 3 September 2004, parlemen Lebanon menyetujui sebuah amandemen Konstitusi Lebanon dengan persentase 96 berbanding 29 (tiga absen) dalam rangka mengokohkan posisi Presiden pro-Suriah Emile Lahoud dengan perpanjangan masa jabatan selama tiga tahun untuk alasan yang luar biasa, sebab Konstitusi Lebanon sebelumnya menetapkan limit waktu jabatan presiden adalah selama enam tahun. Ironisnya, keputusan parlemen Lebanon tersebut diambil hanya

selang satu hari setelah DK PBB mengadopsi Resolusi 1559 yang menuntut rasa hormat pihak manapun atas kedaulatan dan konstitusi Lebanon, penarikan semua pasukan asing dari Lebanon dan pembubaran semua milisi. Artinya, Suriah dan sekutunya di Lebanon telah memilih tantangan dunia internasional dengan menunjukkan sinyal yang kuat bahwa Suriah tidak bersedia melepaskan hegemoninya atas Lebanon.

Di mata Suriah, Lahoud adalah aset terbesar yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam konteks kelanggaran kekuasaan, meski sesungguhnya ia adalah seorang pemimpin yang lemah tanpa basis kekuasaan riil baik di dalam negeri Lebanon maupun dunia Internasional. Karena itu sering dikatakan bahwa tidak ada yang akan benar-benar berubah pada Lebanon, sampai Presiden Emile Lahoud, boneka Suriah, secara total meninggalkan Lebanon. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan Rafiq Hariri, maka yang terakhir ini memiliki hubungan sangat dekat dengan Saudi Arabia dan negara-negara penting di Barat, khususnya Perancis. Menurut informasi yang disampaikan Tim Pencari Fakta PBB yang dibentuk pasca peristiwa pembunuhan Rafiq Hariri, ketika Hariri menolak keras usulan Basyar tersebut, ia mengatakan kepada Hariri bahwa oposisi terhadap Lahoud adalah sama saja dengan menentang diri Basyar sendiri (*Executive Summary* Laporan Peter FitzGerald, 2005).

4.4 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559

Setelah sebelumnya beberapa resolusi tentang situasi politik di Lebanon, yaitu Resolusi 425 (1978) dan 426 (1978) yang diadopsi 19 Maret 1978, Resolusi 520 (1982) yang diadopsi 17 September 1982 dan Resolusi 1553 (2004) yang diadopsi 29 Juli 2004, maka pada pertemuan ke 5028 yang dilaksanakan tanggal 2 September 2004, Resolusi 1559 diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Tercata sembilan negara yang memberikan suara dukungan, yaitu Angola, Benin, Chile, Perancis, Jerman, Rumania, Spanyol, di Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara enam negara lainnya menyatakan abstain, yaitu Aljazair, Brazil, Cina, Pakistan, Filipina dan Rusia. Resolusi tersebut disponsori oleh Perancis dan Amerika Serikat. Kerjasama antara kedua negara tentang masalah di Timur Tengah ini tampak signifikan ketimbang jalan yang harus ditempuh keduanya dalam kasus

invasi AS ke Irak tahun 2003 dimana Perancis menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka. Sementara khusus tentang Lebanon sendiri, Perancis tampaknya menyimpan catatan kesejarahan tersendiri, mengingat ia pernah memperoleh mandat Liga Bangsa-Bangsa tahun 1919-1943.

Resolusi ini menyerukan kepada Lebanon untuk membangun kedaulatan penuh di atas seluruh tanah Lebanon dan memerintahkan kepada seluruh pasukan asing untuk menarik diri dari Lebanon serta menghentikan campur tangan dalam internal politik Lebanon. Dalam hal ini, pasukan asing dimaksud seringkali merujuk kepada Suriah, meski sesungguhnya Israel termasuk di dalamnya. Resolusi ini juga menyerukan kepada semua milisi Lebanon dan non-Lebanon untuk membubarkan diri dan menyatakan dukungannya kepada proses pemilihan yang bebas dan adil (*Resolution 1559*, 2004).

Sebagaimana menjadi pesan politik yang dimuat dalam Perjanjian Taif 1989, sesungguhnya Resolusi 1559 tidak saja menyerukan kepada seluruh pasukan asing yang tersisa untuk menarik diri dari Lebanon, melainkan juga pembubaran dan perlucutan senjata semua milisi Lebanon dan non-Lebanon. Sebagai tindak lanjut atas resolusi tersebut, Lebanon telah meminta kepada Israel untuk menarik diri dari sengketa Shebaa dan bukit-bukit Kfar-Shouba dan mengembalikan tahanan Lebanon di Israel sebagai wujud pelaksanaan sepenuhnya Resolusi 1559. Sementara untuk membubarkan sayap militer Hizbullah sekaligus melucuti senjatanya, Lebanon tampak jelas menghadapi dilema politik yang cukup sulit karena dapat mengarah kepada kondisi sosial politik yang tidak kondusif dan bukan tidak mungkin akan menyulut kembali perang saudara. Dalam hal ini, tidak saja pihak Lebanon sendiri yang dianggap mengabaikan dan melanggar ketentuan resolusi, namun juga pihak Suriah yang tetap bertahan dengan kebijakannya atas kehadiran kekuatan militer negara tersebut di Lebanon.

Persoalan kepatuhan terhadap Resolusi 1559 merupakan masalah menonjol dalam politik Lebanon. Perdana Menteri Fouad Siniora pernah menyatakan bahwa pemerintah Lebanon menganggap senjata Hizbullah merupakan persoalan domestik dan pemerintah akan melindungi sayap militernya. Di sisi lain, Hizbullah sendiri memosisikan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan

kelompok perlawanan Lebanon yang memiliki hak untuk tetap bertahan dalam kerangka perlawanan menghadapi Israel. Pemimpin Druze Walid Jumblatt menambahkan bahwa jika mengacu kepada resolusi internasional, Hizbullah termasuk dalam kategori kelompok perlawanan dan bukan milisi. Pernyataan Jumblatt ini diberikan mengingat ia terlibat dalam aliansi pemilihan dengan Hizbullah selama pemilu parlemen tahun 2009. Dalam perkembangan terakhir, Jumblatt sendiri meminta kekuatan Hizbullah untuk diintegrasikan ke dalam tentara Lebanon dan dengan sendirinya menyerahkan senjata yang dimilikinya kepada pemerintah (*The Daily Star Beirut*, 17/01/2006).

Pada Juli 2006, Siniora pernah menyatakan bahwa pendudukan Israel di kawasan Shebaa Lebanon, sesungguhnya telah memberikan kontribusi sekaligus menjadi alasan yang memadai bagi kehadiran senjata Hizbullah. Menurutnya, masyarakat internasional semestinya dapat mendorong pihak Israel agar menghentikan pendudukannya di kawasan Shebaa. Dengan demikian, pemerintah Lebanon dapat memecahkan masalah senjata Hizbullah (AP Beirut, 20/07/2006). Baik Suriah maupun Lebanon sepakat bahwa Shebaa berada di dalam wilayah Lebanon, namun Israel menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan perbatasan Syria, sehingga area tersebut tidak tercakup oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 425. Pada gilirannya, kontroversi muncul setelah penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan di Lebanon Selatan pada 24 Mei 2000. Pada tanggal 18 Juni 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa Israel telah menarik pasukannya dari Lebanon sesuai dengan amanat Resolusi 425. Suriah dan Lebanon membantah pernyataan PBB tersebut dan menyatakan bahwa masalah penarikan pasukan Israel dari Lebanon belum selesai. Isu pendudukan peternakan Shebaa inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Hizbullah untuk meningkatkan serangan lanjutan terhadap Israel.

Atas perkembangan tersebut, pada awal Oktober 2004, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan melaporkan kepada Dewan Keamanan tentang kurangnya kepatuhan terhadap Resolusi 1559. Annan menegaskan bahwa sudah saatnya, setelah 14 tahun perang saudara berakhir dan empat tahun setelah penarikan Israel dari Lebanon, maka semua pihak hendaknya melupakan sisa-sisa masa lalu. Penarikan kekuatan asing dan perlucutan senjata milisi akan menutup sejarah

peristiwa kelam Lebanon. Karena itu, maka pada Resolusi 1583 yang diadopsi pada 28 Januari 2005, DK PBB memberikan seruan baru kepada Pemerintah Lebanon untuk memperluas kewenangannya atas seluruh wilayah Selatan sepenuhnya, termasuk melalui penyebaran kekuatan angkatan bersenjata dan keamanan Lebanon untuk memastikan suatu lingkungan yang tenang di seluruh daerah.

Intinya, kesuksesan Revolusi Cedar sesungguhnya tergantung kepada pendirian politik Lebanon itu sendiri. Jika politisi Lebanon benar-benar ingin mempromosikan demokrasi, maka mereka harus mengambil langkah-langkah efektif untuk melucuti senjata Hizbullah dan memutuskan hubungan dengan mantan rezim pendudukan Suriah. Sebaliknya, jika tindakan ini tidak diambil, maka Revolusi Cedar tidak menyimpan makna apapun bagi politik Lebanon ke depan.

4.5 Pembunuhan Mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri

Peristiwa yang dapat dinilai sebagai tragedi politik paling dramatis dalam kehidupan politik Lebanon era 2000-an adalah pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri. Peristiwa tersebut tidak saja melengkapi rangkaian cerita pembunuhan yang menjadi tradisi dalam politik domestik Lebanon, namun sisi hal lain yang memiliki makna yang bersejarah dan sangat penting adalah ketika ia menjadi titik kulminasi kemarahan rakyat Lebanon atas pengaruh yang dirasakan akibat pendudukan Suriah di Lebanon selama hampir tiga dekade. Kerapuhan sendi-sendi kehidupan bernegara telah menjadi titik tolak bangkitnya semangat sekaligus gerakan perubahan yang memberikan warna baru yang signifikan dalam politik Lebanon sesudahnya.

Hariri tewas mengenaskan dalam sebuah tragedi pembunuhan pada 14 Februari 2005 ketika bahan peledak yang setara dengan sekitar 1000 kg TNT diledakkan dan menghancurkan konvoi kendaraan yang ditumpangnya saat melaju melewati St George Hotel di ibukota Lebanon Beirut. Peristiwa tersebut menewaskan 21 orang, termasuk mantan Menteri Perekonomian Bassel Fleihandi dan beberapa pengawal Hariri, serta melukai hampir 100 orang. Jenazah Hariri

dikebumikan bersama dengan jenazah pengawalnya yang meninggal dalam pengeboman tersebut, di lokasi dekat Masjid Mohammad al-Amin.

Hariri dihormati di kalangan para pemimpin internasional. Ia merupakan teman dekat Presiden Perancis Jacques Chirac. Chirac adalah salah satu pejabat asing pertama yang menunjukkan ungkapan belasungkawa kepada janda Hariri secara pribadi di rumahnya, di Beirut. Mengiringi kematian Hariri, sejumlah upaya pembunuhan lainnya dengan pola pemboman juga dilakukan terhadap beberapa tokoh anti-Suriah. Antara lain, pada bulan Juni, seorang kolumnis surat kabar terkemuka Samir Kassir dan mantan pemimpin Partai Komunis George Hawi tewas akibat bom mobil dengan jenis bahan peledak yang sama dalam insiden Hariri, menyusul kemudian adalah Gebran Tueni, seorang editor surat kabar *an-Nahar* Lebanon yang pernah menerbitkan sebuah surat terbuka pada 23 Maret 2000 kepada Basyar al-Asad selaku pewaris rezim Suriah dan menyerukan agar Suriah segera menarik pasukannya dari seluruh kawasan Lebanon (Pipes, 2000, h. 21-27). Ironisnya, upaya pembunuhan juga menimpa sejumlah orang yang mencoba menyelidiki kematian Hariri, yaitu Elias Murr, Mei Chidiac, dan Samir Shehade. Sementara empat bulan kemudian, mantan menteri dan anggota parlemen Lebanon, Marwan Hamadeh berhasil selamat dari serangan bom mobil pada 1 Oktober 2004. Selanjutnya Pierre Amine Gemayel ditembak di siang hari bolong oleh 3 sampai 4 orang bersenjata di pinggiran utara Beirut pada 21 Nopember 2006 (Rafiq al-Hariri's Biography, 2008).

Bukan persoalan yang mudah melakukan telaah terhadap penyebab kematiannya, sebab untuk yang ke sekian kali, sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa pembunuhan sebelumnya yang menimpa sejumlah kalangan, motif politik selalu menjadi kabut yang paling efektif menutupi bahkan menghalangi pandangan publik atas kejelasan masalah yang menjadi penyebabnya. Namun demikian, pada kasus Hariri tampaknya orang dengan cepat menghubungkan berbagai even politik sebelumnya dengan peristiwa tersebut dan menyimpulkannya sebagai penyebab. Dalam keyakinan banyak orang saat itu, Suriah adalah sang pelaku. Karena itu, ratusan ribu pelayat di pemakaman Hariri di Beirut 15 Februari 2005 menyerukan agar Suriah secepatnya meninggalkan Lebanon. Massa menjadi marah dan menyerang markas Partai Ba'ats di Beirut dan pekerja-

pekerja Suriah di kota-kota lain, termasuk Tripoli dan Sidon (Pan, 2005). Bagi rakyat Lebanon saat itu, pangkal utama persoalan ada pada satu kata; Suriah. Ungkapkan perasaan anti-Suriah yang mendalam di kalangan rakyat Lebanon menyimpulkan bahwa tentara Suriah harus pergi. Demikian pula halnya, sikap politik dunia internasional yang dengan segera menghubungkan pembunuhan Rafiq Hariri dengan pendudukan Suriah di Lebanon. Alasan yang dibangun merujuk kepada dinamika politik Lebanon menjelang peristiwa pembunuhan terjadi. Bahwa sentimen anti-Suriah secara perlahan namun pasti semakin mengkristal di kalangan rakyat Lebanon. Tuntutan mereka semakin keras dan umumnya mengarah kepada pentingnya mendefinisikan kembali hubungan dengan Suriah. Pilihan yang diambil adalah mengubah atau mengakhiri sepenuhnya pendudukan Suriah di Lebanon. Meskipun demikian, saat itu pilihan yang terakhirlah yang lebih menjadi harapan rakyat Lebanon.

Diketahui, sebelumnya Hariri tampak gerah dengan sikap-sikap Suriah yang semakin menunjukkan sikap berkuasa secara berlebihan di atas tanah Lebanon. Dalam pandangannya, Suriah terlalu berlebihan bahkan cenderung memiliki ambisi agar segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan rakyat Lebanon selalu berada di bawah kendali dan kontrol negara tersebut. Lebih khusus lagi, Suriah merasa perlu membuat mekanisme kontrol yang sistematis terhadap apa yang dilakukan oleh kalangan politisi dan aparat Pemerintahan Lebanon sendiri. Misalnya, pada bulan Agustus 1999, melalui Direktur Jenderal Telekomunikasi, Suriah dan Lebanon menyepakati dibuatnya rute jaringan serat optik Lebanon melalui Suriah, sehingga memungkinkan bagi intelijen Suriah untuk dapat memonitor secara lebih mudah terhadap arus lalu lintas telepon dan internet. Kebijakan ini dilakukan tidak lama setelah Suriah diketahui menyadap telepon Rafiq Hariri dan lebih dari selusin anggota parlemen Lebanon secara ilegal (Rubin, 2005).

Atas perkembangan tersebut, Hariri mencoba menjauhkan diri dari rezim Asad dan mulai mengkampanyekan semangat reformasi dan demokratisasi. Misalnya ia pernah berpendapat bahwa meski hubungan ekonomi dengan Suriah harus ditingkatkan, namun bisa saja terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kini sedang dilakukan oleh orang Syria, dapat segera dilakukan oleh pekerja

Lebanon. Untuk menjaga ketersinggungan pihak Suriah, ia segera mengatakan bahwa hal itu dapat dibahas dalam suasana yang penuh keramahan dan persahabatan dengan Suriah (Gambill, 2001, h. 41-49)

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada tahun 2001, Hariri menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang penolakannya untuk menyerahkan anggota Hizbullah yang dituduh oleh AS sebagai teroris. Menurutnya, Hizbullah melindungi Lebanon dari pendudukan Israel dan ia menyerukan atas implementasi resolusi DK PBB terhadap Israel. Hariri pun tampak tidak gentar ketika dihadapkan kepada dua pilihan yang ditawarkan George W. Bush, bahwa "anda bersama kami, atau dengan teroris..." Ia berharap tidak ada konsekuensi apapun atas penolakannya, dan ia pun berjanji akan menyelesaikan persoalan Hizbullah saat tiba waktunya. Menurutnya, ia menentang seluruh aksi pembunuhan umat manusia, baik di Israel, Palestina, Syria atau Lebanon. Ia lebih percaya bahwa setiap persoalan akan dapat diselesaikan melalui meja dialog dan bukan dengan kekerasan. Menurutnya, dialog adalah solusi. Sementara sikap Hariri tentang Suriah, tampaknya ia mencoba mengambil pilihan yang rasional. Menurutnya, Suriah akan tetap tinggal di Lebanon sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap rakyat Lebanon. Namun demikian, manakala Suriah tidak lagi diperlukan, maka Lebanon akan meminta kepada mereka untuk pergi meninggalkan Lebanon (Wikipedia, 2011).

Pada 27 Agustus 2004, gangguan terhadap kedaulatan Lebanon mencapai puncaknya manakala Presiden Suriah Basyar al-Asad memanggil Perdana Menteri Rafiq Hariri ke Damaskus dan memerintahkannya agar Konstitusi Lebanon diamandemen sehingga memungkinkan bagi Emile Lahoud untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang dipegangnya hingga tiga tahun kemudian. Padahal Konstitusi Lebanon menyatakan bahwa jabatan presiden adalah enam tahun. Tindakan Suriah ini bukan hal yang mengejutkan, mengingat Presiden Lebanon itu merupakan sekutu setia rezim Suriah. Namun tentu saja, tuntutan Suriah tentang perubahan konstitusi membuat marah banyak pihak. Orang menilai bahwa hal itu merupakan bentuk provokasi yang sangat kasar dan vulgar dari sebuah kekuasaan yang ditunjukkan oleh rezim Suriah. Ketika Hariri menolak

keras, maka Basyar mengatakan kepadanya bahwa oposisi terhadap Lahoud “adalah sama saja dengan menentang diri Basyar sendiri.” (Rubin, 2005).

Pimpinan Druze Lebanon Walid Jumblatt yang saat itu menunjukkan sikap oposisi terhadap Suriah meyakini bahwa kemarahan rakyat Lebanon yang berujung kepada lahirnya Revolusi Cedar menyusul pembunuhan Rafiq Hariri adalah berawal dari ancaman Presiden Suriah Basyar al-Asad terhadap Hariri pada bulan Agustus 2004. Saat itu Basyar mengatakan kepada Hariri: "Lahoud adalah aku dan jika anda dan Chirac menghendaki agar aku keluar dari Lebanon, maka aku akan mematahkan Lebanon.” (William, 2005, h. 33-44). Jumblatt menduga ancaman Basyar itu akan berujung kepada kematian. Sesungguhnya, pihak Pemerintah Prancis sendiri menginginkan sebuah sikap pengertian dari Basyar atas kemerdekaan Lebanon dan sekaligus menghormati pengaruh Prancis di Beirut. Prancis menyambut Basyar pada kunjungan kenegaraan, utang Suriah dimaafkan, dan Suriah disponsori dalam negosiasi perdagangan yang menguntungkan dengan Uni Eropa.

Sementara masa jabatan kepresidenan akan segera berakhir, pihak Damaskus menjadi lebih kesal dengan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri, termasuk sikap penolakan Pemimpin Druze Walid Jumblatt tentang perpanjangan waktu itu. Suriah sempat mengutus pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah untuk membujuk Jumblatt agar ia menghentikan sikapnya, demikian pula Kepala Intelijen Militer Suriah, Ghazali menghubungi Jumblatt. Namun pemimpin Druze itu mengatakan bahwa ia tidak akan bernegosiasi dengan petugas keamanan Suriah atau pun Lebanon (*An-Nahar* London, 14/12/2004). Di sisi lain, rezim Suriah tidak melihat ada alasan yang cukup untuk bereksperimen mengangkat wakil Maronit lain sebagai klien untuk jabatan presiden. Bagi Suriah, Lahoud adalah segalanya. Sebagai mantan panglima militer Lebanon awal tahun 1990-an, memungkinkan bagi Lahoud untuk melakukan restrukturisasi aparat keamanan Lebanon sebagai upaya subordinasi menyeluruh untuk kepentingan Suriah.

Di tengah krisis politik akibat polemik perpanjangan jabatan presiden, tiba-tiba Hariri mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Hariri melaporkan bahwa ia telah menyampaikan pengunduran diri kepada pemerintah, dan ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi kandidat untuk kepala pemerintahan

berikutnya. Hariri mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon pada 20 Oktober 2004. Sehari setelah pengunduran diri Hariri itu, mantan Perdana Menteri Omar Karami pro-Suriah ditunjuk lagi sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya, Hariri bekerjasama dengan Damaskus meskipun tidak selalu nyaman. Ia mempertahankan politik keseimbangan dan lebih berkonsentrasi secara penuh kepada pembangunan kembali perekonomian dan infrastruktur Lebanon yang porak poranda akibat perang saudara, sementara rezim Suriah terus meningkatkan kontrol keamanan atas mereka. Atas realitas tersebut, Hariri tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima kesepakatan yang telah diambil. Sebab, sampai pendudukan AS di Irak, Washington tampaknya masih mendukung hegemoni Suriah di Lebanon. Namun, sejak tahun 2004, sesungguhnya Hariri menjadi tidak nyaman akibat konflik yang tak kunjung mereda dengan Lahoud dan perlakuan yang merendahkan dari seorang diktator muda Suriah. Padahal dalam catatan Hariri, Basyar tidaklah begitu berpengalaman dibanding ayahnya. Secara pribadi, Basyar pernah menyatakan bahwa: "perbedaan antara ayahku dan kakekku luar biasa sedikit. Sebaliknya, perbedaan antara aku dan ayahku sangat besar, apalagi antara aku dengan mereka yang lebih muda dari aku, tentu lebih besar lagi." (Zisser, 2005, h. 29). Di belakang layar, Hariri dilaporkan menyarankan penyusunan Resolusi 1559 bekerjasama dengan Chirac. Tujuan strategis yang dicapai oleh Hariri adalah keluarnya kekuatan Suriah dari Lebanon dan pemulihan kedaulatan Lebanon yang sesungguhnya. (*Al-Hayat* London, 21/02/2005).

Sementara di sisi lain, pada akhir tahun 2004, kalangan oposisi bersatu menjadi sebuah gerakan yang lebih vokal, terorganisir dan tumbuh secara substansial. Mereka memanfaatkan isu campur tangan Suriah dalam Konstitusi Lebanon sebagai motif perlawanan. Hal ini ternyata menarik perhatian dari para pemimpin politik yang sebelumnya bersekutu dengan Suriah seperti Walid Jumblatt bahkan Rafiq Hariri, termasuk pemimpin Kristen Maronit. Pada tanggal 13 Desember, Jumblatt mendukung koalisi oposisi yang luas. Komunike yang disusun oleh pihak koalisi berisi peringatan yang jelas kepada Suriah dan pemerintah Lebanon pro-Suriah, Perdana Menteri Karami. (*Al-Mustaqbal* Beirut, 14/12/2004).

Oposisi Lebanon membangun sebuah front Kristen-Muslim dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Mei 2005. Hariri diindikasikan berubah pandangan dan memberikan dukungan keuangan kepada oposisi dan telah menyatakan isyarat atas keinginannya untuk kembali ke dunia politik. Bagaimanapun, Hariri diprediksi dapat menjadi calon oposisi yang tangguh. Ia seorang karismatik, berpengalaman, kaya, dan mewakili Sunni perkotaan. Kehadiran Hariri di barisan oposisi Lebanon memberikan dorongan kekuatan yang signifikan sehingga sangat diperhitungkan oleh pihak lawan. Ia adalah politisi paling dinamis dalam komunitas Muslim Sunni dan seorang milyarder dengan kontak-kontak internasional yang luas. Ia memiliki pandangan jauh ke depan tentang pembangunan Lebanon dan faktor itulah salah satunya yang dapat menaikkan popularitasnya di mata rakyat Lebanon. Suatu waktu ia mengatakan kepada Duta Besar Iran untuk Perancis bahwa masalah di Lebanon "bukan Hizbullah, namun keberadaan Suriah dan operasi yang dilakukannya." (*Al-Hayat* London, 21/02/2005)

Untuk memenangkan pemilihan parlemen Mei 2005, Hariri membutuhkan kendaraan politik, yaitu pihak oposisi Lebanon, tetap bergabung dengan Resolusi 1559 dan membangun momentum melawan dominasi Suriah. Pada tanggal 2 Februari 2005, di bawah arahan Hariri, pihak oposisi mencoba melemahkan manuver Suriah tentang penugasan kembali kesepakatan Thaif, dan mengangkat secara luas isu penarikan penuh pasukan Suriah dan agen intelijennya dari Lebanon. Setelah 10 Februari 2005, utusan PBB ke Damaskus, Terje Roed - Larsen mengkhawatirkan atas keberadaan Hariri dalam bahaya fisik. Empat hari kemudian, sebuah ledakan besar di pinggir laut Beirut menewaskan Hariri dan sembilan belas orang lainnya (*The New York Times*, 15/02/2005).

Pihak oposisi menuntut pemecatan Jaksa Umum Adnan Adoum, Jamil al-Sayyid, dan lima Kepala Badan Keamanan Lebanon. Selain itu, mengharapkan pemerintah baru mulai mengatur jadwal pemilihan parlemen, serta penyelidikan internasional atas pembunuhan Hariri. Namun rezim Lebanon menolak dan mengabaikan tuntutan tersebut. Pada tanggal 1 Maret protes jalanan yang diikuti oleh kelompok Sunni, Kristen dan Druze memaksa pengunduran diri rezim Karami. Sementara Damaskus tampak percaya diri --andaikan benar Suriah

merupakan pelakunya-- seakan ia kebal dengan tuntutan dunia internasional, terutama kebijakan politik Amerika Serikat dan Prancis. Dalam sebuah pidato yang disampaikan di depan parlemen Suriah pada 5 Maret, Basyar menunjukkan ekspresi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia justeru meremehkan kelompok oposisi Lebanon yang ditudingnya mempergunakan tangan-tangan asing untuk mendukung aktivitas mereka (*Al-Hayat* London, 6/03/2005).

Dari sisi ini, tampaknya pemboman dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan teror terhadap kalangan oposisi Lebanon, menghancurkan koalisi oposisi yang baru saja dibentuk, sekaligus untuk menghalangi bahkan meniadakan sama sekali kesempatan Hariri sebagai pilar utama kelompok oposisi dalam Pemilu 2005. Tradisi politik yang selama ini terjadi di Lebanon tentang penuntasan kasus pembunuhan yang hampir selalu mereda tanpa bukti mengenai identitas pelakunya, seakan membuka ruang bagi upaya-upaya penyelesaian persoalan politik secara instan dengan cara pembunuhan.

Kini Rafiq Hariri telah dimakamkan di samping para pengawalnya, di belakang sebuah masjid besar di jantung kota Lebanon yang kemudian dikenal dengan Syuhada Square. Adegan pembunuhan itu hanya beberapa ratus meter dari tempat dimana ia dikuburkan sekarang. Situs pembunuhan laksana sebuah kawah raksasa yang penuh cairan logam, tampak seperti dibuat oleh meteorit. Sementara jalan pantai di depan St Georges Hotel ditutup.

BAB 5
REVOLUSI CEDAR DAN IMPLIKASINYA
PADA POLITIK SURIAH DI LEBANON TAHUN 2005-2010

5.1 Revolusi Cedar: Definisi Istilah dan Pengertian

Istilah Revolusi Cedar pertama kali diucapkan oleh Sekretaris Negara untuk Urusan Global Amerika Serikat, Paula J. Dobriansky dalam sebuah konferensi pers, 28 Februari. Saat itu, ia menyampaikan kebijakan politik luar negeri Pemerintahan Bush terkait peristiwa mutakhir di Lebanon. Menurutnya, "Di Lebanon, kita melihat tumbuhnya momentum bagi sebuah Revolusi Cedar yang mempersatukan warga bangsa, menjadi penyebab demokrasi sejati dan kebebasan dari pengaruh asing." Istilah ini digunakan untuk menarik perbandingan dengan Revolusi Rose di Georgia (2003), Revolusi Ungu di Irak (2003) dan Revolusi Oranye di Ukraina (2004). Kata *Cedar* sendiri mengacu pada lambang nasional, yaitu Cedar Lebanon, sebuah fitur pohon yang terdapat pada bendera Lebanon. Sesungguhnya, pohon cedar adalah lambang tradisional Kristen Maronit yang awalnya ditemukan dalam *al-Kitab* Kristen. Mazmur 92:12 menyebutkan: "orang benar berkembang seperti pohon palem dan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon." Menurut situs *Flags of the World*, pohon cedar dimasukkan ke dalam bendera Lebanon pada tahun 1943, ketika orang-orang Kristen merupakan penghuni mayoritas penduduk Lebanon (Morley, 2005).

Di dunia Arab terutama di Lebanon sendiri, istilah yang lebih dikenal dan digunakan secara umum adalah *Intifadlat al-Istiqlal* yang berarti "pemberontakan untuk kemerdekaan." Istilah ini diciptakan oleh pemimpin Gerakan Kiri Demokratik, Samir Kassir dan Hikmat 'Id. Keduanya menekankan istilah *intifadlat* atau intifadah untuk menyatakan pemberontakan dalam pengertian Arab dan menghubungkannya kepada intifadah Palestina, sementara istilah *istiqlal* digunakan untuk menekankan sisi pembebasannya. Saat demonstrasi besar-besaran 18 Februari di Beirut, kalangan oposisi sangat marah dengan pembunuhan

Hariri. Mereka menyerukan sebuah *intifadah* untuk kemerdekaan. Seorang mahasiswa peziarah Lebanon yang mengunjungi makam Hariri menyatakan bahwa; "kami datang untuk berterima kasih padanya dan memulai *intifadah* damai demi kebebasan Lebanon." (Morley, 2005).

Nama lainnya adalah *Spring Cedar* atau ربيع الأرز. *Rabi'ul arz* dalam bahasa Arab, merujuk kepada musim yang sedang berlangsung di Lebanon saat aksi protes pertama pecah, yaitu *musim rabi'* atau musim semi. Selain itu sebagai sebuah referensi kepada gerakan kemerdekaan dan kebebasan yang terkenal, seperti *Spring Praha* dan *Damascus Spring*. Adapun nama-nama yang digunakan oleh media lokal, seperti LBC dan Future TV untuk menggambarkan peristiwa ini adalah *Lebanon Independence (Istiqlal Lubnan)*, *Lebanon Spring (Rabi' Lubnan)*, atau hanya menyebut *Independence 05*.

Persoalan nama tidaklah sederhana, apalagi untuk gerakan rakyat dalam sebuah perjuangan. Faktanya, ia memiliki makna yang sangat penting dan biasanya mengacu kepada tujuan-tujuan yang dicapai. Bagi rakyat Lebanon, istilah *Intifadlat al-Istiqlal* merupakan *branding* yang mengakar kepada sejarah dan masa depan Lebanon itu sendiri. Jadi, dari sisi nama pun, ia sudah mengandung makna cita-cita dan harapan.

Penggunaan istilah *intifadat*, bagaimanapun akan membantu publik termasuk dunia internasional untuk memahami bagian khusus dari sebuah cerita perjuangan yang sedang berlangsung di Lebanon untuk cita-cita demokrasi yang ingin dibangun oleh rakyatnya. Karena itu, bagi rakyat Lebanon sendiri, tentu akan sangat berbeda antara istilah *Intifadlat al-Istiqlal* dengan Revolusi Cedar. Sangat mungkin, yang disebutkan terakhir ini tidak memiliki makna apapun bagi mereka. Di jalan-jalan kota Beirut, mereka menyebutnya "intifadah untuk kemerdekaan." Bahkan, tidak ada seorang pun kalangan pers Lebanon yang menggunakan istilah "Revolusi Cedar."

Mengapa kemudian pemerintahan Bush lebih memilih Revolusi Cedar dan tidak mengadopsi istilah intifadah? AS tentu memiliki alasan sendiri. *Intifadah* adalah istilah Arab yang memiliki makna khusus dalam konteks perjuangan bangsa Arab. Dari sisi ini saja, tentu AS tidak akan mengapresiasinya secara tepat. *Intifadah* sejak lama digunakan bangsa Palestina dalam perjuangan mereka

melawan pendudukan militer Israel. Israel sendiri merupakan sekutu setia AS di Timur-tengah. Dalam hal ini, ketika rakyat Lebanon menggunakan *Intifadah*, maka secara tidak langsung, posisi Suriah ekuivalensinya sama persis dengan Israel, yaitu dalam konteks pendudukan terhadap wilayah negara lain. Padahal performan Israel di hadapan bangsa Arab, sedemikian buruk, sementara Suriah sendiri pernah memperoleh legitimasi AS untuk pendudukannya selama hampir tiga dekade di Lebanon. Atas alasan kesejarahan ini pula, kemungkinan pemerintahan Bush merasa lebih cocok dengan istilah Revolusi Cedar.

5.2 Fokus dan Tujuan Revolusi Cedar

Revolusi Cedar memokus kepada persoalan utama, yaitu mengakhiri pendudukan Suriah di Lebanon yang telah berlangsung sekitar selama hampir tiga dekade, yaitu sejak tahun 1976. Selain itu, beberapa pihak di Lebanon memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya seruan atas kembalinya mantan Perdana Menteri Michel Aoun dari pengasingan sejak 1991, serta pembebasan mantan pemimpin Pasukan Lebanon Samir Geagea yang dipenjara. Adapun beberapa tujuan lainnya yang seringkali disuarakan dalam konteks Revolusi Cedar secara keseluruhan meliputi:

- a. Menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Lebanon dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan kebebasan;
- b. Mengusir Rezim Karami pro-Suriah;
- c. Memecat enam Komandan Pelayanan Keamanan Utama sekaligus Jaksa Negara;
- d. Penarikan mundur militer Suriah secara keseluruhan dan agen intelijen dari Lebanon;
- e. Mengungkap pelaku pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri;
- f. Menjalankan pemilu parlemen yang bebas dan demokratis pada musim semi 2005 tanpa campur tangan dari Suriah.

5.3 Bentuk-bentuk Aksi dan Polarisasi Sikap antara Pro dan Kontra

Sebagai sebuah gerakan perubahan, terdapat sejumlah organisasi dan kelompok sipil yang terlibat baik pro maupun kontra terhadap Revolusi Cedar, yaitu: *Qornet Shehwan Gathering*; *Citizen for a Free Lebanon*, sebuah organisasi non-pemerintah; *The Center for Democracy in Lebanon*, yaitu sebuah gerakan akar rumput non-pemerintah, dan *The Global Organization of Democratic Believers*, sebuah kelompok relawan yang terdiri dari berbagai latar belakang keagamaan. Adapun partai-partai politik utama yang terlibat dalam Revolusi Cedar, antara lain:

- a. *Democratic Renewal Movement* (Harakat al-Tajadod al-Dimokrati) yang dipimpin oleh Presiden Lahoud;
- b. *Democratic Left* (al-Yassar al-Dimokrati) yang dipimpin oleh Elias Atallah, mantan anggota parlemen dan mantan anggota partai komunis;
- c. *Free Patriotic Movement* (at-Tayyar al-Watani al-Hurr) yang dipimpin oleh Michel Aoun. Ia juga memimpin "Koalisi Perubahan dan Reformasi" koalisi dan merupakan salah seorang yang pertama kali menyuarakan tuntutan atas penarikan Suriah. Organisasinya meninggalkan Koalisi 14 Maret sebelum Pemilu 2005, yaitu setelah Jenderal Aoun kembali dari pengasingannya di Paris;
- d. *Future Movement* (Tayyar al-Mustaqbal), sebuah gerakan muslim Sunni yang dipimpin oleh Saad Hariri, anggota parlemen dan anak Rafiq Hariri;
- e. *Lebanese Forces* (al-Kuwwat al-Lubnaniyya), sebuah partai Kristen yang dipimpin oleh Samir Geagea, seorang tokoh anti-Suriah dan dipenjara selama 11 tahun oleh Suriah;
- f. *Lebanese Liberation Movement Leader*;
- g. *Lebanese National Bloc* (Hizb al-Kitla al-Wataniya), sebuah partai Kristen yang dipimpin oleh Carlos Eddé, keponakan dari mantan pemimpin Raymond Eddé. *Lebanese National Bloc* meninggalkan Koalisi 14 Maret pada bulan Juni 2009 setelah pemilihan parlemen;
- h. *National Liberal Party* (Hizb al-Wataniyin al-Ahrar), sebuah partai Kristen yang dipimpin oleh Dory Chamoun, anak mantan Presiden Camille Chamoun;

- i. *Phalangist Party* (al-Kataeb al-Loubnaniya), sebuah partai Kristen yang dipimpin oleh mantan Presiden Amin Gemayel;
- j. *Progressive Socialist Party* (Hizb al-Taqadummi al-Ishtiraki) yang dipimpin oleh pemimpin Druze: Walid Jumblat, anggota parlemen dan anak mantan pemimpin Kamal Jumblat; PSP meninggalkan Koalisi 14 Maret pada bulan Agustus 2009;
- k. *Armenian Democratic Liberal Party* (Hizb al-Ramgavar) yang dipimpin oleh Ogassapian Jean;
- l. *Social Democrat Hunchakian Party* (Hizb al-Henchag) yang dipimpin oleh Kalpakian Sebouh (*Encyclopedia of the Nations*, 2011)

Sementara sikap dukungan diberikan oleh mayoritas kelompok organisasi dan partai terhadap Revolusi Cedar, namun Hizbullah justru mengambil sikap yang berseberangan. Organisasi yang dipimpin oleh Hassan Nasrallah ini tetap bertahan untuk memberikan suara dukungan kepada Suriah. Alih-alih menolak, Hizbullah justru membangun persepsi bahwa Israel dan Amerika Serikat telah ikut campur tangan dalam urusan politik internal Lebanon. Tuduhan Hizbullah kepada kedua negara tersebut juga diikuti dengan kritikan yang keras terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559. Menurutnya, perlawanan tidak akan menyerah, karena Lebanon membutuhkan perlawanan sebagai bentuk pembelaan. Ia menambahkan tuduhannya kepada Israel sekaligus PBB bahwa seluruh butir-butir resolusi PBB-lah yang telah membuka ruang gratis bagi Israel selaku musuh untuk berbuat sesuatu, sehingga Israel-lah yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang terjadi. Israel harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atas segala tuntutan kejahatan yang dilakukannya.

Pada hari pembunuhan Hariri, malam harinya pihak oposisi segera melangsungkan pertemuan. Diskusi kelompok oposisi yang pertama kali itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pemerintah pro-Suriah dan Damaskus diyakini berada di balik aksi pembunuhan tersebut. Karena itu, mereka menyerukan penarikan pasukan Suriah dari Lebanon, serta menuntut perlindungan dunia Internasional untuk menangkap pelakunya, selain meminta pemerintah ilegal pro-Suriah mengundurkan diri. Empat hari kemudian, atau 18 Februari

2005, pihak oposisi meluncurkan aksi "Pemberontakan Damai" untuk memotivasi dukungan massa Lebanon agar bergerak dalam upaya membebaskan Lebanon. Selanjutnya, aksi massa mendukung kebebasan Lebanon semakin meluas dalam berbagai bentuk sehingga memaksa pemerintah pro-Suriah di Lebanon mengundurkan diri pada tanggal 28 Februari 2005.

Pada tanggal 21 Februari 2005, tepatnya satu minggu setelah peristiwa tragis terjadi, puluhan ribu demonstran Lebanon melangsungkan unjuk rasa di lokasi pembunuhan. Mereka jelas mendukung Revolusi Cedar. Mereka menyerukan sebuah tuntutan utama, yaitu diakhirinya pendudukan Suriah di Lebanon. Mereka menyalahkan Suriah dan Presiden pro-Suriah Emile Lahoud atas peristiwa pembunuhan yang terjadi. Pada minggu-minggu berikutnya, hampir setiap hari Senin, demonstrasi selalu diadakan di Martyrs Square Beirut. Pada setiap harinya rakyat Lebanon juga berkumpul di tempat ini. Para demonstran menyebut tempat ini sebagai Liberty Square. Sementara di belahan dunia lain, demonstrasi serupa juga dilakukan oleh para imigran Lebanon yang terdapat di berbagai kota di seluruh dunia, seperti di Sydney Australia, di mana lebih dari 10.000 orang demonstran berkumpul di kota ini. Kota-kota lain yang menyelenggarakan, antara lain San Francisco, Paris, Düsseldorf, Montreal, dan London.

Meluasnya demonstrasi di berbagai wilayah dengan tuntutan yang keras menyebabkan pemerintahan Perdana Menteri Omar Karami pro-Suriah mengundurkan diri pada 28 Februari 2005. Selain menyerukan agar segera diadakan pemilihan baru, ia juga mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar pemerintah tidak menjadi rintangan di hadapan mereka yang menginginkan kondisi yang lebih baik bagi negeri Lebanon. Puluhan ribu rakyat Lebanon yang berkumpul di Syuhada Beirut Square bersorak-sorai menyatakan kegembiraannya atas pernyataan Karami sambil meneriakkan: "Karami jatuh, giliran anda yang akan datang, Lahoud dan Bashar!" (*BBC News*, 28/02/2005). Selanjutnya, pada 15 April kelompok oposisi Lebanon memberikan dukungan kepada parlemen untuk memaksa Lahoud menunjuk seorang moderat dan sangat dihormati kalangan Syiah, Najib Miqati sebagai perdana menteri setelah Karami gagal membentuk pemerintahan. Pemerintahan baru menyerukan pemilihan parlemen

di daerah selama seminggu berturut-turut dan menyambut bantuan PBB dan Uni Eropa untuk memonitor pemilihan. Anggota parlemen dari kelompok oposisi tidak puas dengan hanya pengunduran diri Karami, dan terus menekan untuk penarikan militer Suriah secara penuh. Marwan Hamadeh, mantan menteri dan anggota parlemen yang selamat dari serangan bom mobil pada 1 Oktober 2004, berkata: "Saya menuduh pemerintah menghasut, lalai dan lemah. Setidaknya menutup-nutupi sebuah perencanaan, jika tidak mengeksekusi." (Bronson, 2000).

Di pihak lain, Suriah menerima dukungan dari Hizbullah. Sesungguhnya, kaum Syi'ah Lebanon tampak dilanda kekhawatiran atas implementasi Resolusi DK PBB1559 yang antara lain menyerukan kepada perlucutan senjata Hizbullah. Sebab hal itu akan meninggalkan mereka dalam bayang-bayang Israel dan masyarakat Lebanon lainnya. Karena itu, Hizbullah merasa perlu membangun jaringan yang kuat dengan Suriah. Hizbullah, telah lama memiliki tawar-menawar dengan Damaskus. Suriah mendukung peran regional Hizbullah melawan Israel di Lebanon, sementara Hizbullah sendiri di bawah dominasi Suriah di Lebanon. Karena itu, pada tanggal 8 Maret 2005, Hassan Nasrallah memobilisasi hampir semua pengikut Hizbullah dengan mengosongkan pinggiran selatan Beirut. Hizbullah membawa sekitar 500.000 demonstran tandingan ke pusat kota Beirut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa warga Suriah yang menjadi pekerja di Lebanon turut berpartisipasi memeriahkan aksi ini (*The Washington Post*, 11/03/2005).

Hizbullah menilai kerdil terhadap aksi yang dilakukan pihak anti-Suriah sebelumnya. *CNN* mencatat beberapa kantor berita yang memperkirakan jumlah demonstran sekitar 200.000 (*CNN*, 09/03/2005). *Associated Press* memperkirakan ada lebih dari 500.000 demonstran pro-Suriah, sedangkan *New York Times* memperkirakan hanya "ratusan ribu" saja (*The New York Times*, 08/03/2005). *Al-Jazeera* melaporkan angka 1,5 juta. Warga Syiah tersebut membawa gambar Presiden Suriah Basyar al-Asad dan sejumlah plakat dengan berbahasa Inggris, antara lain: "Tidak untuk Intervensi Amerika." Di samping menunjukkan sejauh mana dukungan populer untuk Suriah di Lebanon, para demonstran Hizbullah juga menegaskan penolakannya terhadap Resolusi 1559 yang menyerukan pembubaran semua milisi Lebanon karena mengancam kelangsungan sayap

militer Hizbullah. Nasrallah juga mengadakan demonstrasi di Tripoli dan Nabatiyé pada tanggal 11 dan 13 Maret 2005 (*The Washington Times*, 09/03/2005).

Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2005, satu bulan peringatan mengenang peristiwa pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri, pihak oposisi menyelenggarakan demonstrasi terbesar dalam sejarah Lebanon di pusat kota Beirut. Satu juta orang berkumpul untuk menandai satu bulan pertama sejak pembunuhan Rafiq Hariri. Jumlah yang besar ini mengidentifikasi dirinya kepada kelompok Kristen, Sunni, dan Druze dan sekitar dua kali lipat dari kapasitas mobilisasi kelompok Syi'ah sebelumnya. Hal ini juga dapat menunjukkan sebuah gambaran bahwa pihak oposisi dapat menguasai antara 60 sampai 70 persen pemilih pada pemilihan umum yang bebas dan adil. Mereka meneriakkan "Kebebasan, Kedaulatan dan Kemerdekaan" sambil membawa bendera Lebanon dalam ukuran besar. Mereka berbondong-bondong datang dari seluruh wilayah Lebanon, sehingga meluapnya jumlah partisipan menyebabkan sebagian peserta unjuk rasa tidak bisa memasuki kota karena lalu lintas terlalu padat. Para pengunjung rasa Lebanon menuntut penyelidikan internasional atas pembunuhan Hariri, pemecatan kepala keamanan yang didukung-Suriah di pemerintahan Lebanon, dan penarikan total Suriah dari Lebanon. Kegiatan demonstrasi diliput oleh media swasta, yaitu *Future TV*, salah satu perusahaan swasta yang dikendalikan oleh keluarga Hariri dan *Lebanon Broadcasting Corporation LBC*. Kegiatan serupa juga terjadi di Syuhada Square, yaitu situs makam Hariri dan pusat kota yang baru dibangun kembali, dimana sebagian besar melalui upaya Hariri (Rubin, 2005).

Perkembangan politik Lebanon saat Revolusi Cedar berlangsung, seakan mampu memetakan secara jelas kelompok mana saja yang pro dan kontra dari berbagai kekuatan politik yang ada. Namun sekali lagi, sebagaimana tampak terjadi pada banyak kasus dan peristiwa politik di berbagai tempat, kepentingan ke arah tujuan politik yang sama, acapkali menyatukan berbagai kekuatan politik yang berseberangan demi tercapainya tujuan-tujuan politik bersama. Namun demikian, manakala tujuan politik tercapai dan kepentingan politik dapat diraih, semuanya akan kembali kepada agenda politik masing-masing sesuai dengan

ideologi politik yang diperjuangkan. Demikian pula halnya, gambaran yang dapat ditemukan pada performan masing-masing kekuatan politik di Lebanon ketika mengusung semangat Revolusi Cedar tahun 2005. Bahkan dalam kasus Lebanon, perilaku politik tersebut semakin menjustifikasi mengerasnya watak politik sektarian yang mengabaikan begitu saja kepentingan politik yang lebih besar demi menjaga kepatuhan kepada kelompok dan golongan.

Dalam pandangan politik, Revolusi Cedar dapat dipahami sebagai gerakan sosial yang merupakan suatu upaya kolektif untuk melakukan suatu perubahan di tengah masyarakat. Mengacu kepada pandangan Horton dan Hunt (1989), Revolusi Cedar dapat diposisikan sebagai bagian dari gerakan reformasi (*reform movement*), yaitu suatu gerakan yang dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan atas beberapa kepincangan yang terjadi di tengah masyarakat. Gerakan ini menurut David F Aberle (1961), sebagaimana disebutkan Damsar (2010), termasuk ke dalam gerakan sosial reformatif (*reformative social movement*), yaitu suatu gerakan perubahan atau reformasi pada sisi bagian tertentu dari masyarakat. Revolusi Cedar tidak menuntut suatu perubahan radikal yang mengarah kepada pergantian sistem politik Lebanon, meskipun di antara tuntutan adalah pergantian pemerintahan. Karena itu, Revolusi Cedar dipandang kurang tepat jika diposisikan sebagai gerakan revolusioner (*revolutionary movement*), karena gerakan revolusioner mensyaratkan keharusan atas pergantian sistem sosial berangkat dari keyakinan bahwa reformasi yang berarti tidak mungkin terjadi bilamana sistem yang ada tetap bertahan.

5.4 Dukungan Dunia Arab dan Internasional

Negara-negara Arab umumnya memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi tuntutan rakyat Lebanon dalam Revolusi Cedar. Ketika Hafez al-Asad melakukan kunjungan ke Saudi Arabia dalam rangka konsultasi darurat dengan Raja Abdullah bin Abdel-Aziz, Basyar memperoleh penegasan agar Suriah harus segera mematuhi tuntutan Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana dilaporkan harian *Daily Star* bahwa Basyar diharapkan segera menghapus sebagian besar dari 15.000 tentara Suriah yang ditempatkan di Lebanon (*The Daily Star Lebanon*, 04/03/2005). Bahkan Iran selaku pelindung utama Hizbullah –kelompok yang

dianggap dekat dengan Suriah– tampaknya memisahkan diri dari Suriah. Sebuah sumber di Iran menyatakan bahwa Iran menyatakan dirinya akan mendukung Suriah dalam kepentingan konfrontasi dengan Israel. Namun Iran tidak siap mendukung kehadiran Suriah di Lebanon, karena dalam pandangan Iran, kedaulatan Lebanon sangatlah penting (*Al-Hayat* London, 21/03/2005).

Namun demikian, dalam kegiatan tahunan KTT Arab yang berlangsung pada tanggal 23 Maret di Aljazair, negara-negara Arab tidak secara tegas meminta Suriah untuk menarik pasukannya. Menteri Luar Negeri Aljazair Abdel-Aziz Belkhadem saat membahas konsensus di depan KTT menyatakan bahwa forum menyetujui tuntutan pelaksanaan Kesepakatan Taif 1989 (*BBC News*, 23/03/2005). Realitas yang paling kontroversial dari kegiatan KTT Al-Jazair ini adalah bahwa hampir setengah dari para pemimpin Arab tidak ikut menghadiri acara, dan krisis di Lebanon yang terjadi beberapa pekan sebelum acara tersebut tidak termasuk dalam agenda puncak.

Pada satu titik tampaknya ada kebingungan tentang sejauh mana Suriah bersedia untuk menarik diri dari Lebanon. Pemimpin Liga Arab Amr Moussa menyatakan bahwa Presiden Suriah Basyar al-Asad telah berjanji padanya perihal penarikan seluruh militer Suriah dari Lebanon secara bertahap selama jangka waktu dua tahun. Namun, beberapa waktu kemudian informasi tersebut memperoleh sanggahan dari pihak Suriah. Menteri Informasi Suriah Mahdi Dakhlallah mengatakan bahwa Amr Moussa salah mengerti tentang apa yang dimaksudkan oleh pemimpin Suriah. Dakhlallah menegaskan bahwa Suriah hanya akan memindahkan pasukannya ke Lebanon timur. Sejak itu, Suriah menyatakan bahwa Resolusi 1559 akan terpenuhi dalam hitungan bulan bukan tahun.

5.5 Penarikan Mundur Militer dan Agen Intelijen Suriah dari Lebanon

Kedekatan Suriah dengan Lebanon terjadi sejak pecahnya perang saudara di Lebanon sepanjang 1975-1990 yang mengakibatkan negara kehilangan kontrol keamanan, dan Suriah berperan penting membantu Lebanon memulihkan keadaan pasca perang. Suriah mengerahkan kekuatan militer sebanyak hampir 40.000 pasukan untuk memastikan peran politik Suriah di Lebanon berjalan efektif.

Dalam periode pasca perang itu, Suriah menjalankan kontrol keamanan, menangani pelayanan sosial dan persoalan ekonomi (Salem, 2010). Meskipun Kesepakatan Thaif 1989 antara lain menyerukan terhadap penarikan pasukan asing dari Lebanon, namun kehadiran Suriah di Lebanon tetap berlanjut atas persetujuan secara diam-diam dari pemerintahan George W Bush dengan alasan untuk menjaga stabilitas dalam negeri Lebanon.

Intervensi Suriah terhadap Lebanon bahkan diyakini mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara. Pada tanggal 20 Mei 1991, pemerintah Suriah dan wakilnya di Lebanon menandatangani "*Perjanjian Persaudaraan, Kerjasama, dan Koordinasi*" antara kedua negara "untuk mencapai tingkat tertinggi kerjasama dan koordinasi di semua aspek; keamanan politik, ekonomi, budaya, ilmiah, dan bidang lainnya... [dan untuk] memperluas dan memperkuat kepentingan bersama, sebagai penegasan atas hubungan persaudaraan dan jaminan atas tujuan bersama." Pada tanggal 1 September 1991, "*Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Lebanon-Suriah*" meligitimasi dominasi militer dan dinas keamanan Suriah di Lebanon. Dua tahun kemudian, sebuah "*Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi Ekonomi dan Sosial*" mengukuhkan sebuah program integrasi ekonomi yang dalam prakteknya hanya memposisikan Lebanon sebagai outlet bagi barang-barang Suriah dan tenaga kerja Suriah di Lebanon (Rubin, 2005).

Dari sisi substansi, intervensi Suriah atas politik Lebanon, dimana muatan utamanya adalah penguasaan atau dominasi, maka sesungguhnya dalam beberapa hal dapat diposisikan searah dan sebangun dengan tujuan-tujuan imperialisme, yaitu penguasaan atau dominasi yang terorganisasi secara politis. Bentuk imperialisme yang paling jelas, paling kuno dan juga paling kasar adalah penaklukan militer. Para penakluk besar sepanjang masa juga imperialis besar. Keuntungan cara ini adalah hasil penaklukan militer, dimana ia hanya dapat diubah oleh perang lainnya. Dominasi Suriah atas militer Lebanon juga telah melemahkan kekuatan militer Lebanon hingga sampai kepada batas dimana ia tidak memiliki kekuatan itu sendiri.

Hal lain yang paling mendasar dan berhubungan langsung dengan intervensi Suriah dalam politik Lebanon adalah persoalan kemerdekaan Lebanon dalam pengertian yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa kemerdekaan merupakan

aspek khusus dari sebuah kekuasaan tertinggi dari setiap bangsa. Kemerdekaan menuntut wujudnya sebuah kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, sehingga ia dapat dinyatakan sebagai bangsa tersebut merdeka, berdaulat dan tidak ada kekuasaan di atasnya. Sementara pada era campur tangan Suriah dalam politik Lebanon, negara Lebanon hampir tidak memiliki kuasa yang penuh dan bebas untuk mengelola urusan dalam dan luar negerinya, serta kebijakan apa yang akan dilakukan. Faktanya, Lebanon bahkan telah kehilangan haknya untuk menentukan maksud konstitusi negara tersebut yang mengakibatkan masa jabatan presiden harus bertambah, di luar apa yang semestinya. Padahal, jika sebuah bangsa benar-benar memiliki kekuasaan tertinggi di dalam wilayahnya, maka sejatinya tidak ada satu wilayah pun yang dapat disubordinasikan pada bangsa lain di dalam menggunakan kekuasaan tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2004, Amerika Serikat dan Perancis mensponsori Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559 yang menyerukan penarikan semua pasukan asing dari Lebanon, pembubaran milisi terutama sayap bersenjata Hizbullah dan mengadakan pemilihan presiden Lebanon yang berlangsung bebas dengan tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal. Resolusi 1559 ini sesungguhnya tidak secara jelas menyebutkan nama Suriah, namun target yang dimaksud tampaknya hampir disepakati terutama oleh rakyat Lebanon. Maka, implemmentasi resolusi tersebut menjadi sesuatu yang sangat signifikan pasca pembunuhan Hariri tahun 2005. Dalam pernyataan bersama, Presiden AS George W. Bush dan Presiden Perancis Jacques Chirac mengutuk pembunuhan dan menyerukan implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559 yang mengharuskan penarikan pasukan Suriah dari Lebanon dan melucuti kelompok Hizbullah yang berkembang di Lebanon Selatan.

Peristiwa tragis yang menimpa Rafiq Hariri telah memicu protes rakyat Lebanon dan menjadi bumerang, karena justru melahirkan tekanan besar dari berbagai pihak termasuk derasnya tekanan dunia Internasional kepada rezim Suriah untuk menarik diri dan meninggalkan Lebanon. Jauh sebelumnya, sesungguhnya upaya untuk hal itu sudah dan berulang kali dilakukan. Namun lagi-lagi Suriah hampir selalu memiliki cara untuk tetap bertahan. Suriah tampil meyakinkan atas keberhasilannya mengukuhkan kewenangannya atas Lebanon

selama hampir tiga dekade. Tahun 1982, misalnya, Presiden Lebanon Elias Sarkis pernah mengajukan permohonan resmi dalam pertemuan puncak Liga Arab di Moroko dimana ia meminta penarikan Suriah dari Lebanon (el-Hokayem, 2007). Strategi Suriah untuk menepis usulan Elias Sarkis adalah dengan cara mendorong Palestina untuk menciptakan gangguan di Lebanon Selatan yang dibutuhkan Suriah untuk menjaga kepentingannya di Lebanon. Sementara itu, mengusir semua orang Suriah dari Lebanon bukanlah persoalan yang mudah. Selain tentara, ada lebih dari satu juta pekerja Suriah di Lebanon. Jumlah ini akan terus membengkak jika ditambah dengan ribuan agen intelijen Suriah yang menyamar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Suriah yang sangat terintegrasi di tengah masyarakat Lebanon.

Pada awal 2005, sesungguhnya banyak cara yang dilakukan Suriah untuk menghindari pelaksanaan penuh Resolusi 1559 yang diadopsi setahun sebelumnya. Misalnya, Damaskus menemukan kembali klausul dalam Perjanjian Thaif yang membuka ruang yang lebih luas bagi Damaskus atas Lebanon. Jumblatt juga bereaksi atas berlanjutnya upaya penyempitan peran yang dilakukan rezim Lebanon terhadap Partai Sosialis Progresif yang dipimpinnya, akibat tajamnya kritik Jumblatt tentang posisi Suriah di Lebanon. Ia menolak konsep Suriah tentang "satu orang di dua negara," mengutuk penolakan Suriah atas hubungan diplomatik dengan Lebanon, serta menuntut sweeping terhadap badan-badan intelijen. Saat menyampaikan pidato di Universitas St. Joseph Beirut pada 26 Januari, sebagai sebuah ekspresi simbolis konvergensi Druze-Kristen, Jumblatt menyebut: "mafia Suriah-Lebanon yang sangat berbahaya. Tugas kita adalah memecah mafia ini. Kita harus menutup pintu gerbang Anjar [markas intelijen militer Suriah di Lebanon] untuk selamanya." (*An-Nahar* London, 27/01/2005).

Pada tanggal 2 Maret 2005, pemimpin Suriah Basyar al-Asad mengumumkan bahwa pasukannya benar-benar akan meninggalkan Lebanon dalam beberapa bulan ke depan. Menanggapi pengumuman tersebut, pemimpin oposisi Walid Jumblatt mengatakan bahwa ia ingin mendengar penjelasan yang lebih spesifik dari Damaskus tentang penarikan pasukan Suriah. Menurutnya, "pengumuman Basyar adalah isyarat bagus, tapi maksud 'beberapa bulan ke depan' itu agak kabur. Kita butuh jadwal yang jelas." (*BBC News*, 02/03/2005).

Penutupan dan evakuasi sebagian besar militer Suriah dan kantor intelijen serta pos pemeriksaan di sekitar ibukota dan di tempat lain, mungkin menunjukkan langkah konkret menuju penarikan penuh. Namun sesungguhnya tidak atau mungkin belum dilakukan penarikan penuh pasukan hingga Maret, meskipun Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice sempat menyatakan sikap optimis dan hati-hati atas tanda-tanda penarikan pasukan.

Pada tanggal 3 Maret, Jerman dan Rusia bergabung dengan mereka yang menyerukan agar Suriah mematuhi Resolusi 1559. Kanselir Jerman Gerhard Schröder mengatakan; "Lebanon harus diberi kesempatan dalam kerangka kedaulatan dan pembangunan. Ini hanya dapat dicapai dengan mematuhi Resolusi DK PBB yang menetapkan penarikan segera militer Suriah dari Lebanon." Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa Suriah harus menarik diri dari Lebanon. Namun demikian, siapapun harus bisa memastikan bahwa penarikan pasukan tidak mempengaruhi keseimbangan yang sangat rapuh, dimana Lebanon dikenal merupakan negara etnik yang sangat rumit (*The Daily Star Lebanon*, 04/03/2005).

Pada tanggal 5 Maret, pemimpin Suriah Basyar al-Asad mematuhi tekanan rakyat Lebanon dan dunia internasional dimana ia menyatakan dalam pidato televisi bahwa Suriah akan menarik pasukannya dari Lebanon dalam dua tahap. Pertama, pasukan ditarik ke Lembah Bekaa di Lebanon Timur, dan kemudian ke perbatasan antara Suriah dan Lebanon. Penarikan pasukan melibatkan sekitar 14.000 tentara dan memakan waktu sekitar tujuh minggu untuk menyelesaikannya. Namun demikian, Basyar tidak memberikan jadwal bagi penarikan pasukan lengkap Suriah dari Lebanon. Suriah memulai penarikan sebagian pasukannya dari Beirut dan Lebanon Utara pada tanggal 8 Maret 2005. Sementara demonstrasi rakyat Lebanon yang terbesar dalam catatan sejarah Lebanon dengan lebih dari satu juta demonstran mencapai puncaknya pada tanggal 14 Maret 2005. Mereka menyatakan protes keras terhadap pendudukan Suriah di Lebanon.

Pada akhir Maret 2005, pemerintah Suriah menarik sebagian besar pasukannya dari Lebanon dan membongkar semua pusat intelijen di Beirut dan Lebanon Utara. Selanjutnya, pada 2 April, Basyar mencoba mematuhi tuntutan

PBB dan berjanji atas penarikan penuh militer Suriah dari Lebanon pada akhir bulan. Perkembangan ini diperoleh setelah tekanan tiada henti disampaikan AS dan negara-negara Eropa, serta faktor lain yang lebih penting, yaitu pada 27 Maret, laporan PBB tentang "penyebab, kondisi dan konsekuensi pembunuhan Hariri" oleh Peter Fitzgerald, Deputy Komisaris Polisi Irlandia dan ketua tim kecil yang dikirim oleh Sekjen PBB Kofi Annan ke Beirut mulai dirilis. Laporan tersebut menuduh Suriah telah menciptakan suasana intimidasi sebelum pembunuhan dan mengecam Suriah dan petugas layanan keamanan di Lebanon telah berlaku lalai, memanipulasi bukti serta kurangnya keseriusan dalam memecahkan kejahatan pembunuhan. Laporan ini juga menyebutkan adanya ancaman fisik yang disampaikan Bashar kepada Hariri, serta merekomendasikan sebuah penyelidikan berskala internasional. Catatan lainnya adalah bahwa penyelidikan lebih lanjut disinyalir akan sia-sia tanpa penggantian Kepala Keamanan Lebanon (*Executive Summary* Laporan Peter Fitzgerald, 2005).

Pada 26 April 2005, setelah 29 tahun aksi militer di Lebanon, kantor berita internasional dan PBB melaporkan bahwa tentara Suriah yang terakhir dan agen intelijennya telah menyeberangi perbatasan dalam kerangka penarikan pasukan dari Lebanon. Pemerintah Suriah secara resmi memberitahukan kepada PBB bahwa ia telah menarik pasukannya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559 yang diadopsi pada bulan September 2004. Dalam sebuah surat kepada PBB, Menteri Luar Negeri Suriah Farouq al-Shara mengatakan bahwa negaranya secara resmi ingin menginformasikan bahwa pasukan Suriah ditempatkan di Lebanon atas permintaan Lebanon dan di bawah mandat Arab. Pada akhir April, seluruh kekuatan militer, aparat keamanan dan aset yang dimiliki telah diselesaikan (Zisser, 2005). Selanjutnya, pada 27 April 2005, seluruh rakyat Lebanon untuk pertama kalinya merayakan hari pertama kebebasan mereka dari Suriah.

Namun demikian, pada tanggal yang sama, *Washington Post* melaporkan bahwa Suriah sesungguhnya tidak menarik bagian yang paling penting dari mereka, yaitu bagian intelijennya di Lebanon. Gugatan ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice pada 25 Mei (*The Washington Post*, 27/04/2005). Sebelumnya, sebagai rasa simpati atas kepentingan demokratisasi di

Lebanon, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris menetapkan tenggat waktu 30 April 2005 bagi Suriah untuk menarik diri dari Lebanon. Dua puluh hari sebelum batas waktu itu, negara-negara tersebut mengirim lima kapal perang melalui Terusan Suez untuk menakut-nakuti Suriah agar tidak menghindar dari tuntutan tersebut. Akhirnya, Suriah secara resmi menarik diri dari Lebanon mengikuti batas waktu yang ditentukan (Phares, 2005). Sementara dari sisi lain, jika kebijakan politik Suriah meninggalkan Lebanon sebagai bukti bahwa Suriah mematuhi tuntutan Resolusi 1559, maka realitas politik sesudahnya masih menyisakan pemerintah Lebanon sebagai pelanggar resolusi karena menolak untuk membongkar milisi Palestina dan Hizbullah yang pro-Suriah, sebagaimana diamanatkan Resolusi 1559.

5.6 Pemilu Parlemen tanpa Campur Tangan Suriah

Pemilu parlemen Lebanon yang pertama sebagai bagian dari tuntutan Revolusi Cedar digelar pada bulan Mei-Juni 2005. Pemilu ini merupakan pemilihan pertama dalam tiga puluh tahun terakhir dengan tanpa campur tangan militer dan intelijen Suriah di Lebanon, dan pertama kali juga dipantau oleh PBB. Pemilu parlemen ini menguji kelompok kekuatan politik yang ada di Lebanon yang terbelah ke dalam dua kelompok besar pasca peristiwa Hariri. Kedua kelompok tersebut adalah pro-Suriah dan oposisi. Meskipun Suriah sudah meninggalkan Lebanon, namun tampaknya sebagian rakyat Lebanon memiliki pandangan tersendiri tentang posisi Suriah dan perannya di Lebanon selama ini. Sekalipun demikian, banyak analisis menyimpulkan atas kemungkinan kelompok oposisi yang memperoleh keuntungan politik yang besar, mengingat energi yang diperoleh dari rakyat Lebanon di tengah euforia kebebasan sekaligus saat itu. Karena itu, pihak oposisi diyakini berbagai pihak, akan memperoleh suara yang signifikan.

Kelompok pro-Suriah seringkali disebut sebagai Koalisi 8 Maret, sementara kelompok oposisi disebut Koalisi 14 Maret. Persaingan di antara keduanya sangat ketat dalam memperebutkan 128 kursi parlemen. Koalisi 8 Maret adalah merupakan koalisi dari berbagai partai politik di Lebanon yang dibentuk sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang dikuasai Koalisi 14 Maret. Koalisi ini secara

umum telah dianggap sebagai kelompok pro-Suriah. Istilah Koalisi 8 Maret merujuk kepada peristiwa 8 Maret 2005 ketika berbagai kelompok yang dimotori Hizbullah menyerukan demonstrasi massal di pusat kota Beirut sebagai tanggapan terhadap Revolusi Cedar. Para demonstran saat itu menyatakan rasa terima kasihnya kepada Suriah yang telah membantu menghentikan Perang Sipil Lebanon dan membantu menstabilkan kehidupan sosial politik Lebanon, sekaligus mendukung perlawanan Lebanon terhadap pendudukan Israel. Pilar utama dalam kelompok ini adalah Hizbullah, Gerakan Amal, Gerakan MARADA, dan Partai Nasionalis Sosial Suriah.

Koalisi 8 Maret terdiri dari Hizbullah, Gerakan Patriotik Bebas, Gerakan Amal, Federasi Revolusioner Armenia, Blok Skaff, Partai Ba'ath Sosialis Arab, Partai Nasionalis Sosial Suriah, Organisasi Nasserite Populer, Partai Tawhid, Partai Demokrasi Lebanon, Gerakan Penyatuan Nasserite, Partai Solidaritas, Gerakan Marada, Partai Demokrasi Arab, Partai Jaji, Partai Kesatuan, Gerakan Penggabungan Islam, Partai Dialog Nasional, dan Kelompok Islam.

Sementara Koalisi 14 Maret merupakan koalisi dari sejumlah partai politik dan independen di Lebanon yang menyerukan kepada kedaulatan atas seluruh wilayah Lebanon. Koalisi ini dipimpin oleh Saad Hariri, putra Rafik Hariri. Koalisi 14 Maret adalah koalisi partai politik anti Suriah yang sering juga dianggap sebagai pro-Barat. Namanya diambil dari Revolusi Cedar pada tanggal 14 Maret 2005, yang dipicu oleh pembunuhan mantan Perdana Menteri Rafik Hariri sebulan sebelumnya. Pimpinan koalisi pro-Barat tersebut adalah Saad Hariri.

Koalisi 14 Maret terdiri dari Gerakan Masa Depan Lebanon, Pergerakan Partai Sosialis, Tekanan Lebanon, Partai Demokrat Sosial Lebanon Kataeb, Partai Liberal Nasional, Gerakan Kemerdekaan, Blog Tripoli, Gerakan Kiri Demokrat, Gerakan Pembaharuan Demokrat, Partai Hungaria Demokrat Sosial Armenia, Partai Ramgavar Liberal Demokrat Armenia, Blog Lebanon, dan Gerakan Syiah Bebas. Pilar utama koalisi ini adalah Gerakan Masa Depan Lebanon di bawah pimpinan Saad Hariri, anak mantan perdana menteri terbunuh.

Seiring berjalannya perkembangan politik yang terjadi, dimana kepentingan politik selalu menjadi ideologi yang paling mengemuka, maka pengelompokan

sejumlah partai ke dalam Koalisi 14 Maret dan Koalisi 8 Maret menjadi tidak begitu kuat. Sebagai contoh, Gerakan Patriotik Bebas yang dipimpin Michael Aon, awalnya merupakan bagian dari Koalisi 14 Maret dan berpartisipasi dalam Revolusi Cedar, serta bergabung dengan demonstrasi massal pada tanggal 14 Maret 2005. Namun karena perbedaan pendapat, pada 6 Februari 2006, ia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Hizbullah dan dengan demikian berpindah dari Koalisi 14 Maret menjadi bagian dari Koalisi 8 Maret. Demikian pula halnya, Partai Sosialis Progresif yang bergabung dengan Koalisi 8 Maret pada Januari 2011. Sebelumnya, PSP merupakan salah satu pilar utama dari Koalisi 14 Maret. Langkah ini secara otomatis memberikan peluang kepada Koalisi 8 Maret untuk menjadi kelompok koalisi mayoritas di parlemen pada Pemilu Parlemen 2009 sehingga Koalisi 8 Maret saat ini memegang 68 dari 128 kursi di parlemen.

Selanjutnya, pada pemilu putaran pertama yang diadakan pada 29 Mei 2005 di Beirut, kelompok koalisi Hariri, Partai Sosialis Progresif dan partai-partai anti-Suriyah lainnya memenangkan 19 kursi. Pada putaran kedua yang diadakan pada 5 Juni di Lebanon Selatan dan Nabatyeh memenangkan 23 kursi. Pada putaran ketiga yang diselenggarakan pada 12 Juni di Beqaa dan Jabal Lubnan, kelompok Hariri memenangkan 17 kursi. Selanjutnya, pada putaran keempat yang diselenggarakan pada 20 Juni di Utara Lebanon, kelompok Hariri memenangkan seluruh kursi yang ada sebanyak 28 kursi. Dengan demikian, total kursi yang diperoleh kelompok Hariri sebanyak 72 dari 128 kursi Majelis Nasional yang diperebutkan, sebagaimana tergambar dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3:
Hasil Pemilu Majelis Nasional Lebanon, 29 Mei s.d 27 Juni 2005

Koalisi	Kursi	Partai/Kelompok	Rincian
Koalisi 14 Maret	69	<i>Mustaqbal al-Tayyar</i>	36
		<i>Hizb al-Taqadummi al-Isytiraki</i>	16
		<i>al-Quwāt al-Lubnāniyya</i>	6
		<i>Hizb al-Kataeb</i>	6
		Independen (Blok Tripoli)	3
		Democratic Renewal (Blok Tripoli)	1
		Democratic Left (Blok Tripoli)	1
Koalisi 8 Maret	57	<i>Harakat Amal</i>	14
		<i>Hizbullah</i>	14
		<i>al-Hizb al-Qawmi al-Sury al-Ijtima'i</i>	2
		Lain-lain	5
		<i>Tayyar al-Watani al-Hurr</i>	15
		<i>Skaff Bloc</i>	5
		<i>Murr Bloc</i>	2
Independen	2	Independen	2
Jumlah			128

Sementara pada Pemilu Juni 2009, berlawanan dengan sejumlah perkiraan dan dugaan banyak pembuat *polling* serta pengamat, hasil resmi pemilihan umum di Lebanon, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Ziad Baroud pada hari Senin, 8 Juni bahwa total kursi yang hampir sama juga diperoleh oleh masing-masing koalisi sebagaimana hasil pemilihan tahun 2005. Koalisi 14 Maret mengumpulkan 71 kursi dan melihat hasil Pemilu 2009 sebagai kemenangan moral terhadap Hizbullah yang memimpin Koalisi 8 Maret. Sedangkan, Koalisi 8 Maret yang dikenal juga sebagai kelompok oposisi dan dipimpin oleh Hizbullah dan Jenderal Michael Aoun memenangkan sisa 57 kursi. Mereka mengakui kekalahan itu dan mengatakan akan “menerima kehendak rakyat.” Dalam pidato yang disiarkan televisi pada tanggal 8 Juni, Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan, “Kami menerima hasil ini dengan sikap sportif dan demokratis, dan kami mengakui kelompok pemerintah telah

memenangi mayoritas parlemen.” Akan tetapi, Nasrallah juga menegaskan bahwa mayoritas parlemen bukan berarti mayoritas (suara) rakyat. Nasrallah menghubungkan kemungkinan pembentukan negara yang cakap sekaligus kuat pada kemauan kedua blok politik (Abdel Kader, 2009).

Tabel 4:

Hasil Pemilu Majelis Nasional Lebanon, 7 Juni 2009

Koalisi	Kursi	Partai/Kelompok	Rincian
Koalisi 14 Maret	71	<i>Future Movement</i>	26
		<i>Progressive Socialist Party</i>	11
		<i>Independents 14 de March</i>	13
		<i>Lebanese Forces</i>	8
		<i>Lebanese Social Democratic Party (Hizb al-Kataeb)</i>	5
		<i>Social Democrat Hunchakian Party</i>	2
		<i>Jamaa al-Islamiya</i>	1
		<i>Armenian Democratic Liberal Party</i>	1
		<i>Democratic Left Movement (ĥarakatu-l-yasāri-d-dimuqrāṭī)</i>	1
		<i>National Liberal Party (Hizbu-l-waTaniyyīni-l-aĥrār)</i>	1
Koalisi 8 Maret	57	<i>Free Patriotic Movement (Tayyar Al-Watani Al-Horr)</i>	18
		<i>Amal Movement (Harakat Amal)</i>	13
		<i>Hezbollah</i>	12
		<i>Lebanese Democratic Party (Hizb al-democracy al-lubnany)</i>	4
		<i>Marada Movement</i>	3
		<i>Armenian Revolutionary Federation (Tashnag)</i>	2
		<i>Syrian Social National Party (al-Hizb al-Qawmi al-souri al ijtima'i)</i>	2
		<i>Arab Socialist Baath Party</i>	2
		<i>Solidarity Party (Hizb Al-Tadamon Al-Lubnany)</i>	1
Jumlah			128

Faktanya, sejak pemilu Juni yang hasilnya adalah Koalisi 14 Maret yang didukung Barat dan Saudi Arabia tetap berkuasa dan mengantarkan Saad Hariri

menjadi Perdana Menteri, suasana politik Lebanon sedikit tenang. Di sisi lain, perkembangan parlemen dan pemilu kembali menggambarkan sejauhmana ekspresi politik di Lebanon bergantung kepada representasi sektarian. Ini bukanlah kondisi yang insidental, melainkan sesuatu yang sistemik, dimana di masyarakat Syiah dominasi kekuasaan berada di tangan duet Hizbullah-Amal, keluarga Hariri dan Gerakan Masa Depan-nya mengendalikan masyarakat Sunni, Walid Jumblat dan Partai Sosialis Progressif-nya mengepalai masyarakat Druze, sementara masyarakat Kristen berada dalam kekuasaan, baik Partai Kekuatan Lebanon Samir Geagea –yang masuk Koalisi 14 Maret– atau Gerakan Patriotik Merdeka Michael Aon –yang masuk Koalisi 8 Maret pimpinan Hizbullah. Meski polarisasi ini telah mengakibatkan meningkatnya kecenderungan politik konsensual di antara para pemimpin politik, hal ini juga semakin menajamkan politik sektarian, baik secara psikologis maupun praksis. Perkembangan ini terlihat jelas pasca kedua pemilu yang telah diselenggarakan.

Kesepakatan Doha, antara kedua koalisi politik utama yang menghasilkan terbentuknya pemerintahan nasional sementara, telah menyelamatkan Lebanon dari tubir perang sipil. Masalahnya, perjanjian tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah alternatif yang bersifat permanen bagi konstitusi atau Kesepakatan Taif tahun 1989 yang telah berhasil mengakhiri perang sipil Libanon yang berlangsung selama beberapa dekade. Kesepakatan tersebut telah menyediakan suatu kerangka gencatan senjata yang bersifat temporer sekaligus memelihara semua kepentingan partai-partai politik. Perjanjian itu juga telah membuka jalan untuk memilih presiden baru, membentuk sebuah koalisi pemerintahan serta mempersiapkan dasar hukum bagi pemilihan parlemen baru. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemilu tanggal 7 Juni dianggap bisa memberi harapan nyata bagi penyelesaian krisis politik sekaligus melegitimasi pemerintahan yang baru.

Kendati berkembang argumen-argumen yang bersifat sektarian dan komunitarian, pemilu telah lebih merupakan referendum kedaulatan ketimbang sekedar memilih orang untuk menjadi anggota parlemen baru. Inilah yang membuat tingginya polarisasi kampanye di kedua pihak. Faktor eksternal semakin memperparah polarisasi ini dengan menunjukkan dukungan mereka pada

salah satu pihak dengan lebih terbuka pada saat kampanye sedang berlangsung. Di bawah skenario yang terus berlanjut ini, konfrontasi antara Koalisi 14 Maret dengan pihak oposisi tidak akan bisa berakhir, kendatipun melalui berbagai cara serta tuntutan-tuntutan baru. Satu hal yang tidak akan berubah—kemauan keras Hizbullah untuk mempertahankan perannya sebagai angkatan bersenjata.

Koalisi 14 Maret benar-benar boleh merayakan kemenangannya: pihak oposisi tak lagi punya alasan untuk menggugat statusnya sebagai kelompok mayoritas di dalam parlemen baru. Pemilu tersebut telah memberi Koalisi 14 Maret sebuah mandat yang jelas. Pidato moderat Hariri yang disampaikan saat kampanye pemilu maupun saat deklarasi kemenangan Koalisi 14 Maret membuktikan bahwa ia memiliki kualitas sebagai pemimpin. Hal ini membuka jalan baginya untuk dicalonkan menjadi perdana menteri mendatang tanpa ada satu pertentangan pun dari pihak oposisi. Hal lain yang menjadi nilai tambah bagi Hariri adalah kemenangan ini terjadi di bawah UU Pemilu yang didesain oleh pihak oposisi untuk menjegalnya. Kekhawatiran Hizbullah menguasai parlemen serta membentuk pemerintahan yang baru memang telah berakhir. Akan tetapi, masih belum pasti apakah oposisi masih akan mempraktikkan kembali cara-cara lama atau tidak. Pemimpin oposisi dalam beberapa kesempatan telah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan perlawanan bersenjata dan kekuatan veto di pemerintahan yang baru.

Meski Koalisi Maret 14 menjadi mayoritas baru, tidak ada perubahan politik yang radikal. Koalisi diharapkan menawarkan untuk membentuk pemerintahan baru. Akan tetapi, pihak Koalisi 14 Maret telah memperlihatkan keengganannya untuk berbagi kekuasaan dengan pihak oposisi. Ketidaksepahaman mengenai masalah ini masih menjadi kendala utama bagi proses pembentukan pemerintahan dan mungkin malah kembali memunculkan krisis dan kekerasan jalanan seperti terjadi tahun lalu. Menurut sejumlah sumber di Koalisi 14 Maret, sebagai kompromi mungkin mereka akan memberikan hak veto itu kepada presiden Michel Suleiman, bukan kepada pihak oposisi. Tapi langkah ini nampaknya akan ditentang oleh Free Patriotic Movement (Gerakan Patriot Merdeka) pimpinan Michael Aoun yang sudah menuduh presiden telah bersekutu dengan kelompok mayoritas.

Masih ada peluang terbuka bagi Hariri untuk mengajak Nasrallah berdialog secara konstruktif untuk mendapatkan dukungannya guna membentuk pemerintahan baru dengan agenda yang terfokus pada reformasi politik dan pemerintahan. Yang perlu mendapatkan prioritas adalah undang-undang pemilu baru; sementara isu-isu kontroversial lainnya termasuk strategi pertahanan, masa depan ketahanan, serta persenjataan akan diserahkan kepada suatu forum dialog nasional. Jika mereka tidak dapat menghasilkan suatu kemajuan apa pun, kedua belah pihak akan menghadapi krisis baru yang akan membalikkan negara dalam suatu kondisi chaos dan tidak stabil (Abdel Kader, 2009).

Kedua hasil Pemilu 2005 dan 2009 tidak mampu mendukung sebuah pemerintahan Lebanon yang kuat. Saad Hariri yang menjadi perdana menteri setelah koalisi yang dipimpinnya memenangkan pemilu legislatif 2009 terpaksa harus menghadapi kenyataan. Pada Januari 2011, saat Saad Hariri selaku Perdana Menteri Lebanon melakukan kunjungan ke Washington, DC, Amerika Serikat dan melakukan pembicaraan empat mata dengan Barack Obama, situasi politik Lebanon berubah drastis. Pasalnya, 10 menteri anggota kabinet Hariri menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri. Belakangan, Adnan Sayyed Husein menjadi menteri ke-11 yang menyatakan mundur. Dengan mundurnya 11 orang menteri dari total 30 anggota kabinet, menyebabkan pemerintahan Saad Hariri tidak bisa dipertahankan. Sebab menurut sistem politik Lebanon, kabinet harus dibubarkan, apabila sepertiga anggotanya mengundurkan diri.

Mundurnya 11 menteri anggota kabinet Hariri merupakan reaksi atas penolakan Hariri terhadap permintaan mereka untuk menggelar pertemuan khusus para menteri dalam rangka membahas isu-isu kontroversial, terutama hasil investigasi PBB atas kasus pembunuhan Rafiq Hariri, 14 Februari 2005. Sejauh ini, PBB belum merilis hasil resmi, meski penyelidikan telah selesai dilakukan. Hanya saja, kabar yang beredar menyebutkan adanya keterlibatan pemimpin senior Hizbullah di balik pembunuhan mantan perdana menteri tersebut. Maura Connely, Duta Besar Amerika Serikat untuk Lebanon mengingatkan pihak-pihak yang bertikai di Lebanon untuk tidak menghalangi hasil apapun yang telah dicapai PBB, sebab menurutnya, temuan tersebut lebih bersifat hukum dan bukan politik.

Karena itu, kolapsnya kabinet Saad Hariri tidak akan mengubah apapun yang dihasilkan PBB (*GATRA*, 26/01/2011).

Di sisi lain, ketika Hizbullah masih memiliki kekuatan yang signifikan, baik secara politik maupun militer, maka secara tidak langsung, sesungguhnya Suriah masih membayangkan gerak politik internal Lebanon. Sebab dalam banyak hal, Hizbullah dapat diposisikan sebagai personifikasi kekuatan politik Suriah di Lebanon. Pada Pemilu 2005 dan 2009 Hizbullah memimpin sebuah koalisi yang dapat disebut sebagai kolisi pro-Suriah. Artinya, penarikan mundur militer Suriah dari Lebanon pada tahun 2005 belum dapat dimaknai sebagai keleluasaan dan kebebasan Lebanon dari intervensi politik Suriah dalam pengertian yang sesungguhnya. Ke depan, manakala masing-masing kekuatan politik tidak mampu membangun sebuah sinergi ke arah penyatuan visi politik yang kondusif bagi stabilitas politik Lebanon, maka sebagaimana selama hampir tiga dekade sebelumnya, campur tangan Suriah dalam politik Lebanon tidak lagi dimaknai sebagai intervensi, melainkan kebutuhan Lebanon terhadap politik penyeimbang yang menjadi mediasi atas berbagai konflik politik yang terjadi. Tampaknya, Lebanon belum mampu mengubah orientasi politik untuk kepentingan politik yang lebih luas, melainkan lebih mendahulukan kepentingan kelompok semata.

5.7 Posisi Suriah di tengah Penyelidikan Kasus Pembunuhan Rafiq Hariri

Sebagaimana diketahui bahwa Rafiq Hariri dibunuh pada 14 Februari 2005 ketika bahan peledak setara dengan sekitar 1000 kg dari TNT itu diledakkan saat konvoi kendaraan Hariri melaju melewati St George Hotel di ibukota Lebanon, Beirut. Peristiwa tersebut telah mengarahkan rakyat Lebanon kepada sebuah perubahan politik yang besar dan signifikan. Perubahan itu diawali dengan meluasnya protes besar-besaran dari rakyat Lebanon sehingga menarik perhatian dunia internasional, dan akhirnya memaksa Suriah untuk menarik pasukannya dari Lebanon pada April 2005. Kebangkitan semangat rakyat Lebanon, oleh pihak luar seringkali diidentifikasi sebagai Revolusi Cedar, meskipun rakyat Lebanon sendiri memiliki istilah tersendiri yang lebih substantif dari sisi makna, yaitu *intifadat al-istiqlal*. Suriah memang pihak yang pertama kali terimbas akibat kematian Hariri, mengingat peran politiknya selama hampir tiga dekade.

Suriyah harus menanggung beban dan kemarahan dunia internasional atas pembunuhan Hariri karena pengaruh kekuatan militer dan intelijennya yang luas di Lebanon.

Berbagai upaya penyelidikan atas pembunuhan pun dilakukan, terutama oleh badan PBB. Hasil penyelidikan itu tampaknya telah menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan mengarah kepada beberapa pihak sekaligus mengungkap misteri pelakunya. Temuan penyelidikan khusus atas pembunuhan Hariri rencananya dipublikasikan pada akhir tahun 2010 setelah selama lima tahun bekerja dan membuat kekhawatiran banyak pihak atas implikasi susulannya. Penyelidikan yang difasilitasi oleh PBB itu sesungguhnya dilakukan dengan fokus kepada pendalaman masalah bahan peledak, sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan mencegah kekerasan yang timbul yang berlanjut kepada krisis politik dan pertentangan sektarian yang mendalam. Sebab ditengarai, selama beberapa tahun selama penyelidikan berlangsung, perselisihan tentang bakal hasil pengadilan telah meningkatkan ketegangan antara Lebanon dan Suriyah dan antara Hizbullah dan Koalisi 14 Maret, yaitu sebuah koalisi partai-partai politik yang didukung Barat.

Beberapa jam setelah pembunuhan, jaksa Lebanon mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap enam warga negara Australia yang terbang meninggalkan Beirut menuju Sydney Australia, tiga jam setelah ledakan. Pihak Lebanon mengklaim bahwa kursi yang diduduki mereka positif meninggalkan jejak bahan peledak, dan mereka pergi tanpa bagasi. *The Australian Federal Police* mewawancarai sepuluh individu di Sydney pada kedatangan penerbangan. Pihak keamanan pelabuhan udara di Sidney dengan bantuan anjing terlatih berupaya menemukan bahan peledak pada kursi pesawat yang diduduki orang-orang tersebut. Sampel tiga orang yang diteliti dinyatakan negatif oleh Polisi Federal Australia. Dalam waktu 48 jam, Polisi Federal Australia membebaskan mereka semua dari keterlibatan pembunuhan (*ABC Radio*, 19/02/2005).

Sementara itu, langkah cepat lain diambil oleh badan dunia, PBB. Sebagai tanggapan atas permintaan dari Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengirim tim yang terdiri dari beberapa negara seperti Mesir, Maroko dan Irlandia, dan dipimpin oleh Wakil Komisaris Polisi Irlandia, Peter

FitzGerald untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan. Sebelum laporan FitzGerald dipublikasikan pun, Annan sudah menyatakan bahwa investigasi lebih lanjut yang lebih komprehensif mungkin diperlukan (*BBC News*, 23/03/2005). FitzGerald mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Lebanon atas kerjasamanya. Laporan FitzGerald tentang "penyebab, kondisi dan konsekuensi pembunuhan Hariri" menerangkan bahwa kehadiran Suriah di Lebanon sebagai salah satu faktor yang mendorong ketidakstabilan dan polarisasi yang mendahului upaya pembunuhan. Laporan ini juga mengkritik pemerintah Lebanon dan badan-badan intelijen atas penanganan penyelidikan internal dan menyebutnya cacat dan tidak meyakinkan. Sebaliknya, pemerintah Lebanon menggambarkan laporan itu sebagai "asing bagi realitas" dan mengkritik tim PBB ketika tidak melakukan upaya partisipasi pemerintah secara lebih luas dalam proses investigasi. Pemerintah menyatakan sepakat atas penyelidikan skala internasional lebih lanjut yang lebih komprehensif sebagaimana diusulkan Annan, namun dengan sebuah penegasan bahwa penyelidikan di masa depan harus bekerja sama dengan pemerintah. Pada konferensi pers, 25 Maret 2005, Menteri Luar Negeri Lebanon Mahmoud Hammoud mengatakan bahwa penyelidikan akan datang diharapkan bekerja dalam sebuah kerangka kerjasama dengan negara. Laporan FitzGerald memang tidak secara langsung menuduh Damaskus atau pihak lain terlibat, namun hanya mengatakan bahwa pemeriksaan menyeluruh dalam penyelidikan internasional lebih lanjut dapat mengidentifikasi pelakunya. Pemerintah Lebanon telah sepakat atas penyelidikan lanjutan, namun dengan catatan adanya partisipasi penuh pemerintah Lebanon, bukan supremasi lembaga tersendiri, sebagai rasa hormat atas kedaulatan Lebanon (*BBC News*, 25/03/2005).

Masyarakat Lebanon sendiri memiliki alasan masing-masing atas motif yang menyertai peristiwa tragis yang menimpa Hariri. Pimpinan Druze Lebanon Walid Jumblatt saat menunjukkan sikap oposisi terhadap Suriah meyakini bahwa kemarahan rakyat Lebanon yang berujung kepada lahirnya Revolusi Cedar menyusul pembunuhan Rafiq Hariri adalah berawal dari ancaman Presiden Suriah Basyar al-Asad terhadap Hariri pada bulan Agustus 2004. Saat itu Basyar mengatakan kepada Hariri: "Lahoud adalah aku dan jika anda dan Chirac menghendaki agar aku keluar dari Lebanon, maka aku akan mematahkan

Lebanon...” (MacFarquhar, 2005). Jumblatt menduga ancaman Basyar itu akan berujung kepada kematian. Di lain kesempatan, Jumblatt memberikan reaksi yang populer ketika ia ditanya. Menurutnya, ”siapa yang bisa meyakinkan rakyat Lebanon bahwa mesin intelijen Suriah tidak membunuh Hariri dan tidak mencoba membunuh Marwan Hamade? Faktanya, rakyat Lebanon dijatuhi hukuman mati dan Rustom Ghazali atau pejabat Suriah lainnya memutuskan pelaksanaannya.” (*An-Nahar* London, 25/02/2005). Namun demikian, komentar Jumblatt ini bukan tanpa kontroversi, mengingat sosoknya dalam dunia politik yang hampir selalu mengikuti arah angin, sebagaimana menjadi pengamatan banyak pihak. Kredibilitas Jumblatt dipertanyakan manakala ia dengan mudah berubah pendirian. Misalnya, ia adalah pendukung setia Suriah setelah Perang Sipil Lebanon, namun berbalik arah setelah kematian mantan Presiden Suriah Hafez al-Assad pada tahun 2000. Mendukung Koalisi 14 Maret pada Pemilu 2005 dan berpindah mendukung Koalisi 8 Maret pada Pemilu 2009. Komentar Jumblatt pun tidak dikonfirmasi dalam laporan PBB yang disiapkan FitzGerald.

Di pihak lain, pemerintah Amerika Serikat dan Perancis melihat pembunuhan Hariri sebagai dakwaan untuk Suriah dan rezim Lebanon. Karena itu, kedua pemerintahan tersebut bersikeras menuntut Suriah agar segera meninggalkan Lebanon. Dalam harian Kuwait *as-Siyasa*, dilaporkan bahwa Raja Abdullah dari Saudi Arabia pun sempat menyindir Suriah dan mengatakan; ”anda tidak tahu siapa yang membunuh Hariri? padahal seluruh dunia tahu.” (*As-Siyasa* Kuwait, 02/04/2005). Damaskus sendiri dan kliennya di Lebanon merasa perlu untuk menyelamatkan posisi mereka di tengah hiruk-pikuk politik Lebanon pasca pembunuhan Hariri dan dibentuknya penyelidikan internasional atas peristiwa tersebut. Pada 7 April 2005, Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 1595 yang menyerukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pembunuh Hariri. Sementara dalam bocoran kabel Kedutaan AS disebutkan bahwa Direktur Direktorat Jenderal Intelijen Mesir, Omar Suleiman melaporkan bahwa Suriah "sangat" ingin menghentikan penyelidikan pengadilan (*US Embassy Cables: Egypt Spy Chief Promises Pressure on Hamas*, 2008)

Ada sekian banyak indikasi yang mengarah terutama berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Suriah merupakan salah satu bagian yang paling

bertanggungjawab atas terciptanya kondisi yang mengantarkan kepada terbunuhnya Hariri. Faktanya, Hariri memang dalam proses membangun sebuah dukungan politik dari kelompok oposisi Lebanon pasca pengunduran dirinya akibat konflik yang tidak kunjung mereda terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Emile Lahoud yang dipaksakan dengan mengamandemen konstitusi. Namun, pandangan bahwa Suriah secara sengaja membunuh Hariri dan memprovokasi kecaman internasional bahkan di saat Washington menuduh Damaskus telah membantu pemberontak Irak, tentunya perlu didukung oleh berbagai pembuktian yang kredibel.

Condoleezza Rice pernah menyatakan bahwa AS memiliki bukti kuat dimana Jihad Islam telah merencanakan pembunuhan Hariri di wilayah Suriah dengan bantuan dan keterlibatan Damaskus (Raimondo, 2005). Pernyataan Rice membutuhkan telaah yang serius, sebab jika tidak, maka untuk yang ke sekian kali, dikhawatirkan publik akan kembali disuguhi sebuah informasi politik yang sangat jauh dari sisi kebenaran. Semisal kecanggihan Amerika Serikat menganalisis kesiapan Irak membuat senjata pemusnah massal dan hubungan Saddam Husein dengan al-Qaeda dan serangan teroris 9 / 11, yang belakangan dikecam banyak pihak sebagai informasi yang absurd.

Pada tanggal 26 Februari 2005, tim pencari fakta yang dibentuk PBB menyatakan bahwa Suriah dan rezim pro-Suriah di Lebanon harus bertanggung jawab atas peristiwa politik yang menyebabkan pembunuhan Hariri. Selain itu, menuduh pemerintah pro-Suriah di Lebanon menyekat penyelidikan dan menyembunyikan bukti-bukti untuk menutupi kejahatan. Pada tanggal 7 April 2005, Dewan Keamanan PBB memerintahkan sebuah penyelidikan internasional atas pembunuhan Hariri melalui resolusi 1595. Sebelumnya, penyelidikan yang dilakukan oleh Pengadilan Khusus Lebanon (UNIIC) yang dipimpin oleh penyidik independen Daniel Bellemare, dalam dua laporan pertamanya menunjukkan bahwa pemerintah Suriah mungkin berhubungan dengan pembunuhan itu.

Saad al-Hariri yakin bahwa komisi internasional yang dipimpin oleh jaksa Berlin Detlev Mahlis akan melacak pembunuh ayahnya. "Saya lihat ia sosok seorang Jerman yang tangguh." katanya. Sementara Presiden Lahoud menduga

bahwa kelompok fundamentalis Al-Qaidah atau Israel, bisa saja berada di belakang pembunuhan itu. Namun, Hariri menolak untuk berspekulasi secara terbuka, meskipun ia telah mengatakan secara pribadi, ia percaya bahwa agen intelijen Suriah, yaitu orang-orang yang berada di belakang layar Lebanon selama bertahun-tahun, mungkin adalah pihak yang paling bertanggung jawab. "Saya mendengar bahwa mata-mata dari Damaskus masih di negara kita," kata Hariri. "Mereka harus pergi. Saya harap Suriah menghormati kedaulatan kami seratus persen," imbuhnya (Follath, 2005).

Jika laporan penyelidikan memuat informasi lebih dari sekedar kecurigaan yang kabur atas keterlibatan agen Suriah, kemungkinan besar Hariri akan menggunakan laporan tersebut untuk memaksa lawannya keluar dari kantor Lahoud. "Aku menghitung jam sampai dia keluar dari kantor," kata Hariri (Erich Follath, 2005). Tegasnya, jika laporan tersebut berimplikasi kepada intelijen Suriah, maka Lahoud –yang diperpanjang masa jabatannya tiga tahun pada tahun 2004 sebagai tanggapan atas tekanan dari Damaskus–, dapat dipertimbangkan bahwa ia bertanggung jawab atas pembunuhan Hariri. Bagaimanapun, dalam posisinya sebagai presiden, ia bertanggung jawab atas semua layanan operasi intelijen di kawasan.

Sebaliknya, pemimpin Syria mengirimkan pesan yang kontradiktif, termasuk mengancam untuk melaksanakan sistem perlawanan atau *muqawamah*, sebagaimana yang dilakukan Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza dan Tepi Barat. Ia juga menyarankan bahwa jika tuntutan tentang penghentian penyelidikan pengadilan tetap tidak dipenuhi, Suriah bisa memainkan peran negatif di Tepi Barat dan Gaza, Irak dan Lebanon. Di Lebanon sendiri, setidaknya rezim Suriah telah menunjukkan ancaman mereka tidak sekedar mengertak. Daftar politisi Lebanon yang terbunuh sudah dan semakin bertambah panjang. Bashar juga tampaknya akan memberlakukan ancamannya pada 24 April 2007 kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon bahwa Suriah akan menyulut seluruh wilayah jika PBB membentuk pengadilan internasional untuk menyeret pejabat senior Suriah (Zisser, 2008, h. 35-40). Selanjutnya, kebijakan Rusia di kawasan tersebut dan pemberian bantuan persenjataan canggih juga memungkinkan bagi Bashar untuk memperkuat tantangannya.

Jauh sebelumnya, Bashar sendiri pernah memperingatkan bahwa ia akan menghancurkan Lebanon di atas kepala Hariri, jika Hariri mencoba menjauh dan bertentangan dengan keinginannya. Karena itu, maka banyak penilaian menyebutkan bahwa sejatinya pihak Suriah tidak lagi merasa harus meyakinkan apalagi menutup-nutupi upaya penyelidikan yang tengah dilakukan tim PBB yang dipimpin oleh seorang jaksa Jerman yang sangat cermat, Detlev Mehlis, dimana laporannya mempublikasikan keterlibatan rezim Suriah dan orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah versi laporan yang belum diedit, disebutkan sejumlah nama seperti adik Basyar yang bernama Maher, saudara iparnya, Assef Shawkat, dan pejabat tinggi badan intelijen Suriah (Ajami, 2009).

Sesungguhnya, jauh sebelumnya banyak pihak yang merasa perlu memberikan apresiasi saat Basyar al-Asad pertama kali naik ke puncak kekuasaan untuk menggantikan ayahnya. Ada banyak harapan termasuk dari dunia Barat terhadap kemunculan pemimpin muda dari Suriah itu. Salah satunya, adalah Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright saat turut hadir dalam upacara pemakaman ayahnya. Sekembalinya dari Damaskus, Albright menghadiahi Bashar dengan pujian. Menurutnya, "Bashar adalah seorang modernis pembaharu, dan bagian dari generasi internet." (Ajami, 2009). Namun kemudian Basyar dianggap keliru menilai perkembangan dunia di sekelilingnya. Jika Hafez, sang ayah mampu memperoleh hegemoni atas Lebanon selama hampir seperempat abad dengan tanpa pembunuhan langsung, maka si anak terpaksa harus kehilangan dominasinya dalam sekejap mata. Orang menilai lebih kepada persoalan cara, yaitu sebuah kelemahan dari pemerintah Suriah dalam mengorganisasikan pekerjaan. Basyar dinilai mengabaikan jaringan luas yang dibangun Hariri, baik dengan AS, Perancis termasuk Saudi Arabia. Maka implikasinya, penyelidikan atas pembunuhan Hariri mengarahkan tuduhan kepada rezim Suriah.

Pengadilan di bawah PBB dan berkedudukan di Den Haag berupaya melacak jejak Basyar al-Asad atas pembunuhan Rafiq Hariri. Setelah menjalin hubungan erat dengan sekutunya, Suriah era Asad senior, Hariri mencoba berlari dan berselisih dengan anaknya. Sementara itu, sejak lama para kritikus Lebanon tentang Suriah menghadapi kebiasaan yang sudah terpola, yaitu tewas diterjang

peluru pembunuh atau diledakkan oleh sebuah bom. Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan Hariri, peristiwa tersebut justru membantu mendorong Suriah agar keluar dari Lebanon. Dari sisi ini, tampaknya semakin meyakinkan bahwa pemboman merupakan upaya untuk melakukan teror terhadap kalangan oposisi Lebanon, menghancurkan koalisi oposisi yang baru saja dibentuk, sekaligus untuk menghalangi bahkan meniadakan sama sekali kesempatan Hariri sebagai pilar utama kelompok oposisi dalam Pemilu 2005. Tradisi politik yang selama ini terjadi di Lebanon tentang penuntasan kasus pembunuhan yang hampir selalu mereda tanpa bukti mengenai identitas pelakunya, seakan membuka ruang bagi upaya-upaya penyelesaian persoalan politik secara instan dengan cara pembunuhan.

Lain Suriah, lain pula Hizbullah. Menurut investigasi berita *Canadian Broadcasting Corporation*, tim investigasi khusus PBB telah menemukan bukti kuat atas tanggung jawab Hizbullah dalam pembunuhan itu. Laporan perkembangan terbaru yang disiapkan oleh Brammertz telah mengindikasikan bahwa bukti DNA yang dikumpulkan dari TKP menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan itu mungkin dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri dengan identitas seorang laki-laki muda. Pengadilan Khusus PBB untuk Lebanon telah melakukan upaya penyelidikan dan segera mengeluarkan rencana dakwaan dengan menuduh Hizbullah sebagai pelaku pembunuh Hariri (*Reuters*, 12/01/2011). Sebaliknya, Hizbullah justru menuduh Israel berada di balik peristiwa pembunuhan Hariri. Menurut pejabat Hizbullah, pembunuhan Hariri direncanakan oleh Mossad sebagai salah satu upaya mengusir militer Suriah dari Lebanon. Pada bulan Agustus 2010, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menyajikan bukti rekaman video pesawat mata-mata Israel. Menurutnya, Israel terlibat dalam pembunuhan Hariri (*CNN World*, 09/08/2010). Setelah terjadi pertengkaran antara staf pengadilan di sebuah klinik ginekologi pada Oktober 2010, Hizbullah menuntut agar pemerintah Lebanon menghentikan semua kerjasama dengan Pengadilan Khusus. Hizbullah mengklaim pengadilan telah melakukan pelanggaran atas kedaulatan Lebanon yang diarahkan oleh pemerintah Barat. Menyusul kemudian pada 1 November 2010, sebuah laporan yang dibocorkan oleh *al-Akhbar*, surat kabar Kiri menyatakan bahwa Hizbullah telah menyusun rencana untuk

pengambilalihan negara secara cepat, akibat rencana dakwaan terhadap anggotanya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Khusus PBB (*Stratfor Global Intelligence*, 02/11/2010). Laporan itu menyatakan bahwa Hizbullah melakukan simulasi rencana tersebut pada 28 Oktober.

The Special Tribunal for Lebanon atau pengadilan khusus untuk Lebanon menyimpulkan hasil penyelidikannya selama lima-tahun tentang pembunuhan Hariri dan telah melakukan penyidikan terhadap 12 orang anggota Hizbullah sehingga menyebabkan rumor yang beredar luas bahwa pengadilan khusus telah menargetkan Hizbullah sebagai pelaku. Hal ini ditepis oleh Hizbullah. Menurut pemimpinnya, Hasan Nasrallah, anggotanya disidik dalam posisinya sebagai saksi dan bukan tersangka (Rabil, 2007). Namun demikian, faktanya Lebanon benar-benar harus mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang terjadi jika Hizbullah benar-benar terlibat. Sebab banyak spekulasi yang telah berkembang manakala penyelidikan mengarah atau bahkan diarahkan kepada Hizbullah, maka hal itu akan menyebabkan kondisi yang sangat tidak stabil terhadap politik Lebanon. Tentu perkembangan tersebut tidak diinginkan, meski sesungguhnya ia telah membuat hiruk-pikuk politik Lebanon.

Di lain pihak, jika pengadilan secara resmi menyampaikan tuduhannya kepada Hizbullah, maka para politisi di Lebanon tentunya akan memberikan reaksi dengan berbagai cara. Sebab, dimasukkannya Hizbullah dalam pemerintahan saat ini dan rekonsiliasi antara Lebanon dan Suriah, mau tidak mau telah memaksa banyak politisi Lebanon untuk menjaga sikap mereka di hadapan kelompok Syiah. Dakwaan terhadap Hizbullah, paling tidak, memaksa politik Lebanon ke dalam posisi yang serba abu-abu. Di satu sisi, menjalin hubungan erat dengan Suriah, sementara di sisi yang lain mengecam Hizbullah. Jadi, dampak yang paling buruk dari hasil penyelidikan kasus pembunuhan Hariri, sesungguhnya adalah mengantarkan negeri Lebanon untuk kembali ke cara-cara penyelesaian dengan kekerasan. Bahkan sekalipun perdamaian ingin dipertahankan di Lebanon, maka warna politik Lebanon adalah perdamaian dengan segala kesibukan para politisinya mengurai benang rumit pertentangan, sebagaimana kebiasaan sebelumnya.

Tegasnya, manakala penyelidikan berimplikasi kepada Hizbullah, maka kekhawatiran akan konflik lainnya terus meningkat. Dakwaan terhadap Hizbullah telah lama dianggap sebagai salah satu hasil penyelidikan yang paling sulit dihadapi dari sisi imbas, jika dikaitkan dengan persoalan politik internal lainnya. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengakui bahwa kelompoknya akan didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Sejak rumor tentang dakwaan tersebut berkembang, Nasrallah telah menyatakan bahwa pengadilan dan penyelidikan yang dilakukan tidak kredibel dan sangat dipolitisir. Nasrallah berpendapat bahwa pengadilan merupakan rencana yang didukung Barat untuk tujuan-tujuan tertentu. Ia mengatakan bahwa selama beberapa tahun pertama saat penyelidikan berlangsung, Suriah menerima sebagian besar perhatian. Namun, setelah hubungan antara Damaskus dan Barat membaik, tiba-tiba fokus persoalan bergeser ke Hizbullah. Nasrallah menyatakan bahwa ia akan mengungkapkan bukti bahwa Israel bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Namun faktanya ia hanya menunjukkan cuplikan pengintaian udara oleh pesawat Israel di Beirut dan pegunungan sekitarnya yang sering dikunjungi oleh Hariri. Dia menambahkan bahwa ada pola penerbangan yang tidak biasa dari Israel yang dilakukan pada hari pembunuhan, selain bahwa agen Israel telah mengunjungi lokasi pemboman Hariri satu hari sebelum pembunuhan itu. Terkait hal ini, jaksa pengadilan, Daniel Bellemare telah meminta pihak berwenang di Lebanon untuk meminta Hizbullah menyediakan penelitian atas bukti yang disajikan (Paul Salem, 2010).

Perdana Menteri Saad Hariri, putra mantan pemimpin, berada di bawah tekanan yang berat untuk mengabaikan hasil-hasil pengadilan dan kemungkinan dakwaan. Nasrallah sendiri telah mendorong pemerintah untuk menolak hasil-hasil penyelidikan dan mengambil kebijakan yang lebih dekat kepada kepentingan Hizbullah. Namun, sejauh ini Hariri berdiri cepat. Ia membela posisi pemerintah dan menuntut penghormatan resmi dan dukungan untuk pengadilan. Bagaimanapun, Hariri dihadapkan kepada pilihan yang sulit, antara potensi runtuhnya pemerintah dan konflik sektarian dengan keadilan atas kematian ayahnya. Di lain pihak, masyarakat internasional khususnya Eropa dan Amerika Serikat menginginkan agar pengadilan segera merilis kesimpulan penyelidikan.

5.8 Politik Lebanon dan Politik Suriah di Lebanon pasca Revolusi Cedar

Tepat satu tahun setelah Revolusi Cedar bergema di seluruh wilayah Lebanon, pada April 2006 Presiden AS George W. Bush menyatakan bahwa ia sangat mengapresiasi terhadap apa yang menjadi semangat Revolusi Cedar di Lebanon. Sebab ratusan ribu orang yang berupaya mengungkapkan keinginannya dengan turun ke jalan, tentu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Menurutnya, "pemerintahan AS sangat mendukung keinginan rakyat Lebanon untuk memiliki pemerintahan yang mau melayani kebutuhan mereka, yaitu pemerintahan yang merdeka dan berdaulat." (Josh Block, 2010, h. 2-42).

Banyak pihak meyakini bahwa pemerintahan Bush dengan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice sebagai operator di lapangan, sesungguhnya sangat berkepentingan untuk mengangkat kasus Lebanon sebagai contoh sukses kebijakan AS di Timur-tengah. Tampaknya, Bush ingin mengalihkan atau tepatnya, menggantikan perhatian dunia internasional dari Irak ke Lebanon setelah kebijakannya di Irak tahun 2003 dipandang hanya dibangun di atas asumsi-asumsi politik yang tidak meyakinkan. Belakangan bahkan dunia semakin meyakini bahwa kebijakan Bush di Irak dengan menggulingkan Saddam Husein ternyata tidak berpijak kepada fakta politik yang sesungguhnya. Klaim atas Saddam Husein membangun jaringan dengan al-Qaidah dan Irak membangun senjata pemusnah massal ternyata sangat sulit untuk dicarikan bukti kebenarannya.

Sejak awal, Pemerintahan Bush dan Chirac mendukung Revolusi Cedar di Lebanon. Persoalannya, apakah Suriah benar-benar telah meninggalkan Lebanon, dan apakah campur tangan Suriah dalam politik Lebanon pasca Revolusi Cedar sudah dapat dijamin tidak akan terjadi sebagaimana sebelumnya? Pertanyaan ini sejatinya memperoleh jawaban yang meyakinkan. Sebab rentang waktu hampir tiga dekade diasumsikan sebagai waktu yang sangat memungkinkan bagi Suriah untuk membangun sistem yang kuat bahkan dengan dukungan legitimasi dari Konstitusi Lebanon itu sendiri dalam kerangka menjaga dan melanjutkan kepentingan politik Suriah. Dalam hal ini, paling tidak, ada dua kemungkinan yang terjadi. Jika Suriah benar-benar telah meninggalkan Lebanon dan Lebanon juga telah mampu membangun kedaulatan negaranya dan mengisi kemerdekaan

yang sesungguhnya dengan pembangunan di segala bidang kehidupan, baik sosial, politik maupun ekonomi, maka cita-cita Revolusi Cedar berarti dapat tercapai dengan baik. Sebaliknya, meskipun Suriah sudah meninggalkan Lebanon, namun campur tangan Suriah dalam politik Lebanon masih tetap berjalan, baik karena kebutuhan dan kepentingan Suriah, maupun karena kebutuhan dan kepentingan Lebanon, atau bahkan karena kepentingan kedua-duanya, Suriah dan Lebanon. Maka, kemungkinan yang kedua ini tidak saja menihilkan semangat Revolusi Cedar bahkan lebih jauh lagi, dapat melukai perasaan rakyat Lebanon yang merindukan kebebasan dan kedaulatan yang sesungguhnya di atas tanah airnya.

Gejala yang mengemuka atas kemungkinan kedua di atas, sebenarnya sudah dapat diamati bahkan hanya beberapa waktu kemudian setelah Revolusi Cedar berlangsung pada Maret 2005. Gejala tersebut dengan mudah dipahami dari fakta politik yang dihasilkan oleh Pemilu Parlemen Lebanon tahun 2005 yang diselenggarakan hanya beberapa pekan setelah peristiwa tragis pembunuhan Hariri. Saat itu banyak pengamat menganalisis dan menyimpulkan atas kemungkinan kelompok Koalisi 14 Maret yang dipimpin Saad Hariri yang memperoleh keuntungan politik yang sangat besar, mengingat energi yang diperoleh dari rakyat Lebanon di tengah euforia kebebasan dari Suriah, sehingga pihaknya diyakini memperoleh suara yang signifikan.

Namun faktanya, perolehan suara hasil Pemilu Parlemen 2005 tidak dapat menjadi indikator yang signifikan yang dapat meyakinkan publik bahwa Revolusi Cedar benar-benar efektif menutup riwayat campur tangan Suriah di Lebanon. Koalisi 8 Maret yang dipimpin Hizbullah dan diidentifikasi sebagai kelompok pro-Suriah ternyata tetap mampu mengimbangi perolehan suara Koalisi 14 Maret. Ini artinya bahwa hasil Pemilu Parlemen 2005, jika dilihat dari sisi yang lain, maka dapat diarahkan kepada sebuah hipotesis bahwa prospek politik Lebanon ke depan atau pasca Revolusi Cedar masih tetap di bawah bayang-bayang warna politik Suriah. Tegasnya, Suriah masih tetap dapat menancapkan pengaruhnya di Lebanon, minimal dengan menjaga dan melindungi Hizbullah di Lebanon untuk kepentingan Suriah.

Selanjutnya, masalah Hizbullah sendiri sesungguhnya sudah merupakan persoalan tersendiri di Lebanon, apalagi jika dikaitkan kepentingan Suriah. Jika

Koalisi 14 Maret yang muncul pasca pembunuhan Hariri dan didukung oleh AS, Perancis dan Saudi Arabia mendukung implementasi Resolusi PBB 1559 secara penuh, maka Hizbullah mengambil kebijakan sebaliknya. Hizbullah dan sejumlah partai dan kelompok lain di Lebanon sepenuhnya menentang seluruh draft di dalamnya, selain menentang AS dan Barat, dan tetap bersekutu dengan Suriah dan Iran.

Pemerintahan Lebanon pun dihadapkan kepada pilihan yang menyulitkan dalam kasus Hizbullah. *Pertama*, Hizbullah tidak mungkin menerima untuk menyerahkan senjata beratnya, dimana sebelumnya merupakan alat kontrol keamanan di wilayah Selatan, apalagi mengakui kekalahan. Seperti halnya Hamas, Hizbullah melihat dirinya sedang menempuh perjuangan melawan Israel, sementara pengikutnya sendiri bersedia melakukan pengorbanan. Akibatnya, pemerintah dimana Hizbullah pun berada di dalamnya, berada dalam kondisi yang sulit dan di bawah tekanan untuk mengelola tingkat pertahanan. Jika pemerintah bergerak untuk mengimplementasikan Resolusi 1559, maka anggota pemerintahan dari kedua unsur, yaitu Hizbullah dan Amal akan menarik diri, sehingga pemerintahan akan jatuh dan negara dipastikan mengalami krisis lebih berat. Debat internal Lebanon tentang kekuatan Hizbullah sebagaimana diamanatkan Resolusi PBB 1559 menjadi tidak efektif bukan karena tidak ada kemauan, melainkan karena ketidakmampuan pihak Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah. Puncaknya, berdasarkan persetujuan yang diperoleh dalam Perjanjian Doha yang ditandatangani pada 21 Mei 2008, Hizbullah memiliki hak veto atas setiap keputusan pemerintah Lebanon, termasuk perlucutan senjatanya sendiri (Majalah *GATRA*, 26/01/2011, h. 68-69).

Kedua, tentara yang ditugaskan ke wilayah Selatan sesuai Resolusi 1559 merupakan daerah yang dengan 35 persen pengikut Syiah, tidak mungkin bisa menyatu dan menerapkan langkah-langkah yang jelas ditolak oleh Hizbullah. Jika Hizbullah dan komunitas Syiah tidak mau bekerja sama, maka pemerintah Lebanon tidak bisa memaksakan diri dengan kekerasan. Jika dipaksakan dan wilayah Selatan dikosongkan penduduknya maka ratusan ribu pengungsi Syiah akan memenuhi kota Beirut dan wilayah lain yang menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali, yaitu pertentangan sipil dan militer sekaligus sekaligus

meruntuhkan pemerintahan. Faktanya, Hizbullah jauh lebih siap untuk berperang dibanding kelompok lain di Lebanon, bahkan tentara Lebanon sendiri. *Ketiga*, di era krisis saat ini tensi Sunny-Syiah telah jauh meningkat, bersamaan dengan perang sipil Sunny-Syiah di Irak yang sedang membara dan menumbuhkan ambisi Iran di kawasan sekaligus ketakutan atas ambisi kekuasaan Sunny ala Saudi Arabia, Mesir dan Yordania.

Sebelumnya, pasca perang tahun 1990-an, kebijakan pemerintah Lebanon yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rafiq Hariri sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan Hizbullah. Hariri menempuh strategi rekonstruksi, pembangunan, pariwisata, dan investasi yang bergantung pada keamanan dan stabilitas dalam negeri serta upaya diplomasi dalam menghadapi pendudukan Israel, sementara Hizbullah menerapkan strategi militan perlawanan bersenjata dan konflik dengan Israel. Kedua model strategi ini hampir tidak pernah mencapai titik temu. Konflik antara Hizbullah and Israel telah mengguncang kepercayaan investor dan membiarkan para wisatawan pergi. Strategi yang kontradiktif ini pada akhirnya juga menjadi alasan utama Hariri tidak mampu mengelola lepas landas ekonomi pada tahun 1990-an. Dari sisi lain, ketegangan antara Hariri dan strategi Hizbullah juga mencerminkan perebutan kekuasaan antara komunitas Sunny dan Syiah di Lebanon (Salem, 2010).

Saat ini persekutuan Hizbullah dengan Suriah dan Iran adalah dalam rangka melawan Israel. Namun hal ini tidak berarti bahwa Hizbullah hanyalah sebuah boneka dari kedua rezim itu. Memang benar bahwa aliansi ini adalah kuat dimana Iran memberikan bantuan keuangan yang cukup besar dan senjata dan Suriah menyediakan bantuan logistik serta dukungan politik. Namun sejak lama, Hizbullah telah menunjukkan bahwa ia telah membuat keputusan strategis sendiri (el-Hokayem, 2007, h. 35-52). Keyakinan Washington bahwa tekanan militer terhadap Damaskus dan Teheran merupakan pukulan yang menentukan bagi Hizbullah adalah terlalu menyederhanakan masalah, dalam konteks hubungan antara Hizbullah dengan Iran dan Suriah. Sebab, tekanan terhadap Iran dan Suriah tidak menghilangkan permusuhan pendukung Hizbullah kepada Israel.

Hubungan Suriah-Hizbullah memasuki babak baru menyusul pergantian kepemimpinan Suriah. Hizbullah merupakan kelompok perlawanan dan partai

politik yang telah menuai sukses saat menghadapi Israel. Hizbullah memiliki peran penting dalam memberikan kepercayaan kepada Basyar bahwa ia memang benar-benar dibutuhkan dalam konstelasi politik kawasan, sehingga dengan begitu, Basyar merasa memperoleh kredibilitas dan legitimasi. Dengan mengasosiasikan dirinya dengan kekuatan Hizbullah, Bashar berharap bahwa ia dapat melawan persepsi yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa dirinya adalah salah seorang pemimpin yang lemah dan tidak mampu menyusun sebuah kebijakan yang strategis, setelah ia dianggap salah perhitungan dalam kasus Hariri.

Saat ini, Bashar terlihat sangat bergantung pada gerakan yang dimainkan Hizbullah. Karena itu, ia menjalin hubungan yang sangat erat dengan Hassan Nasrullah. Secara terbuka, Basyar mengungkapkan pendapatnya bahwa Hizbullah adalah kelompok perlawanan, bukan teroris sebagaimana dituduhkan AS dan Israel. Sebagaimana Hizbullah, Basyar juga mencoba menghidupkan lagi Pan-Arab dan menyatakan bahwa dirinya anti-Barat. Tampaknya, Suriah sekarang lebih banyak menuai manfaat dari kerjasama dengan Hizbullah, dibanding sebaliknya. Hizbullah bukanlah perpanjangan tangan Suriah, melainkan mitra strategis (el-Hokayem, 2007, h. 35-52).

Saat ini hubungan Suriah-Lebanon sudah sedemikian formal. Sebab sebelumnya, Suriah tidak menghendaki hubungan diplomatik formal dengan Lebanon. Hal ini pula tampaknya yang menjadi alasan mengapa rezim Suriah tidak membuka kedutaan besar di Beirut, sebab pertukaran duta besar akan menunjukkan pengakuan Suriah atas kemerdekaan Lebanon. Kondisi tersebut tetap berlangsung hingga akhir tahun 2008, yaitu manakala peta politik di kedua negara tersebut mengalami perubahan. Pada 15 Oktober 2008 kedua negara, Republik Arab Suriah dan Republik Lebanon dengan diwakili masing-masing oleh Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem dan rekannya dari Lebanon, Fawzi Sallaukh mengambil langkah penting yang bersejarah dengan meyeepakati dibangunnya hubungan diplomatik secara penuh oleh kedua negara (*Republika*, 16/10/2008). Setelah Suriah membuka kedutaan besar di Beirut dan menunjuk Michel Khoury sebagai duta besarnya, maka satu tahun kemudian bertepatan

dengan kunjungan Presiden Lebanon Michel Suleiman ke Perancis, Lebanon membuka kedutaan besar di Damaskus pada Maret 2009.

Namun demikian, terobosan koalisi pro-demokrasi di Lebanon yang dipimpin Saad Hariri tetap menghadapi tantangan yang serius manakala mereka tidak mampu menghadapi gerakan-gerakan politik yang diusung Hizbullah. Selain itu, mantan diktator Suriah, Hafez al-Asad pada masanya juga pernah menandatangani perjanjian dengan Lebanon pada tahun 1991 yang memberikan hak kepada kekuatan militer Suriah untuk menempati kembali wilayah Lebanon, pasca penarikan mundur militer Suriah dalam posisi dimana pemerintah Lebanon mendukung pendudukan Suriah tersebut. Perjanjian ini dipandang sangat efektif membuka jalan bagi Suriah untuk menempatkan kembali kekuatan militernya di Lebanon, jika Hizbullah mengelola sedemikian rupa gerakan-gerakan politik yang dapat memberi alasan bagi Suriah untuk kembali ke Lebanon.

Saat ini, tentu tidak ada lagi jalan lapang bagi Damaskus untuk kembali ke Lebanon. Namun demikian, Suriah dan kliennya masih bisa melakukan sesuatu atas orang-orang Lebanon yang meyakini kedaulatan tanah airnya, yaitu mereka yang tidak ingin memiliki hubungan dengan Suriah. Yang dimaksud adalah bahwa saat ini rezim Suriah memiliki kemitraan strategis dengan Hizbullah di Lebanon, sebuah organisasi dengan perangkat persenjataan yang cukup lengkap dan jumlah anggota yang tidak sedikit. Karena itu, ketika Suriah meninggalkan Lebanon, ada kekhawatiran dimana cerita lama tentang Lebanon akan terulang lagi, sementara pemerintah tidak memiliki otoritas. Hiruk-pikuk politik selama sekian tahun, tidak bisa dan bukanlah sebuah ukuran yang dapat dijadikan indikator dimana Lebanon sedang menuju kepada sebuah kehidupan demokrasi yang matang. Pasalnya, negara dibangun di atas kerapuhan sendi-sendi kehidupan bernegara itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa Lebanon merupakan mosaik masyarakat sektarian, di mana agama dan kelompok aliran menjadi identitas terpenting bagi kebanyakan orang Lebanon. Dalam hal ini, tokoh agama dan kelompok sangat ditaati dan masing-masing mengklaim apa yang mereka anggap paling benar untuk negaranya. Selanjutnya, dalam perspektif politik, polarisasi ke dalam kelompok dan aliran tersebut telah mengakibatkan

meningkatnya kecenderungan politik konsensual di antara para pemimpin politiknya, sehingga semakin menajamkan hadirnya politik sektarian, baik secara ideologis maupun praktis. Padahal Kesepakatan Taif 1989 yang mengakhiri perang saudara selama 15 tahun di Lebanon dan kini menjadi bagian dari Konstitusi Lebanon, telah menyerukan diakhirinya pemerintahan sektarian atau pemerintahan “komunitas.”

Mencermati perkembangan mutakhir politik Lebanon, paling tidak, lima tahun setelah Revolusi Cedar menjadi semangat kolektif rakyat Lebanon, selain pemerintah telah menyelenggarakan dua kali pemilihan umum, tampak ke permukaan bahwa hingga saat ini rakyat Lebanon tetap bertahan untuk jauh lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan golongannya di atas kepentingan nasional bangsanya. Indikator yang paling sederhana dan dapat dilihat dengan jelas adalah dinamika politik Lebanon pasca Pemilu Parlemen 2005. Pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi, digunakan sebatas untuk memetakan kelompok mana saja yang mendukung dan mana pula yang menolak terhadap Revolusi Cedar, hingga pada gilirannya memunculkan apa yang disebut dengan Koalisi 14 Maret dan Koalisi 8 Maret.

Sekat-sekat besar ke dalam Koalisi 14 Maret dan Koalisi 8 Maret ini tampak cukup efektif untuk mengontrol jalannya pemerintahan selama lima tahun terakhir, meski patut disayangkan ketika ia tidak digunakan untuk menjamin stabilitas pemerintahan yang kuat dan iklim politik yang kondusif dalam konteks kehidupan demokrasi yang sehat. Fakta politik yang dapat dicermati, ia lebih sering digunakan sebagai alat kekuatan tawar-menawar oleh sebagian kelompok dalam menghadapi tuduhan atas dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan Rafik Hariri. Hasil penyelidikan tim pencari fakta atas pembunuhan Hariri yang difasilitasi PBB, akan jauh lebih berpengaruh efek susulannya terhadap stabilitas politik Lebanon, jika ia mengarah kepada Hizbullah, sebuah kekuatan politik yang memang berada di Lebanon dan menjadi bagian dari pemerintahan Lebanon sendiri. Sebaliknya, manakala tuduhan tersebut mengarah kepada Suriah, maka ia tidak akan lagi menjadi persoalan domestik Lebanon, melainkan sudah menjadi bagian dari persoalan dua pemerintahan yang berbeda. Jika kemungkinan yang terakhir ini yang terjadi, hal itu tidak pula dapat menjamin menguatnya

nasionalisme rakyat Lebanon menghadapi Suriah sebagai *common enemy*, sebab, sekali lagi, Suriah telah menyiapkan instrumen politiknya dengan cukup baik di Lebanon dengan memosisikan Hizbullah sebagai mitra strategis untuk kepentingan jangka panjang Suriah di Lebanon.

Faktor Hizbullah di Lebanon pasca Revolusi Cedar bukanlah persoalan sederhana dan tidak bisa dianggap remeh. Hizbullah dengan kekuatan militernya yang mengagumkan dapat memainkan irama politik Lebanon untuk dua kepentingan politik yang berlainan. *Pertama*, manuver politik Hizbullah dilakukan dalam kerangka kepentingan politik Hizbullah sendiri, dan *kedua*, manuver politik Hizbullah dilakukan dalam konteks kepentingan politik Suriah di Lebanon. Sebagai contoh konkret dari bagian pertama, Hizbullah telah berhasil menegaskan pentingnya posisi politik kelompoknya bagi pihak lain, saat melakukan gerakan politik yang menyulitkan bagi pemerintahan Saad Hariri, akibat mundurnya 11 menteri dari anggota kabinet Hariri pada awal Januari 2011 yang lalu. Dengan mundurnya 11 orang menteri dari total 30 anggota kabinet, menyebabkan pemerintahan Saad Hariri tidak bisa dipertahankan. Sebab menurut sistem politik Lebanon, kabinet harus dibubarkan, apabila sepertiga anggotanya mengundurkan diri.

Beberapa tahun sebelumnya, Hizbullah melakukan hal yang sama. Pada bulan November 2006, seluruh anggota Kabinet Lebanon dari kelompok Syiah menyerahkan surat pengunduran diri mereka sebagai upaya untuk menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada pemerintah. Hasilnya, konsensus dasar bagi sebuah tata pemerintahan yang sah tidak lagi ada. Pemerintah Lebanon memilih untuk memerintah tanpa dukungan Syiah. Walaupun ada beberapa alasan yang menyebabkan pengunduran diri para menteri Syiah tersebut, keputusan pemerintah tersebut memperkuat kembali anggapan bahwa kepentingan-kepentingan Syiah tidak memperoleh perhatian serius. Karena itu, sangat penting artinya bagi masyarakat Syiah untuk membuktikan bahwa Lebanon tidak dapat diperintah tanpa dukungan mereka. 18 bulan kebuntuan politik merupakan hasilnya.

Tradisi ini bukan hal yang istimewa dalam politik Lebanon, dimana pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dan seringkali

disibukkan dan dibatasi lebih kepada manajemen krisis dalam waktu yang cukup lama dan untuk yang ke sekian kali dengan sekian banyak persoalan politik yang datang silih berganti. Contoh lainnya, tentu publik tidak dapat melupakan fakta politik lain yang lebih besar dan sangat penting dalam konteks perlawanan bangsa Arab melawan Israel, dimana Hizbullah terbukti telah mampu mengukuhkan jati dirinya sebagai salah satu kelompok perlawanan yang paling efektif menentang Israel. Hizbullah-lah tentara Arab pertama sejak tahun 1948 yang berhasil menyerang Haifa, kota pelabuhan di Israel, sementara bangsa Arab lain lebih menyukai hubungan 'harmonis' dengan Israel.

Di lain pihak, manuver politik Hizbullah untuk kepentingan politik Suriah di Lebanon sangat mungkin dilakukan mengingat posisinya sebagai mitra strategis Suriah dengan dukungan basis ideologi yang cukup kuat. Tak dapat disangkal bahwa jaringan politik Suriah di Lebanon dengan menempatkan Hizbullah sebagai kelompok utamanya, dikembangkan dari kombinasi ideologis, domestik dan faktor regional. Ketiga-tiganya menyatu dan menjadi alasan yang melatari berlanjutnya hubungan Suriah dengan Hizbullah yang diinisiasi oleh Asad senior sejak lama dan berlanjut hingga saat sekarang dengan pola hubungan yang sedikit berbeda. Tekanan dunia internasional kepada Suriah dan Hizbullah pasca Revolusi Cedar justeru mengantarkan keduanya kepada sebuah hubungan yang bermetamorfosa ke dalam hubungan strategis yang tidak lagi menempatkan Hizbullah sebagai mitra junior. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Suriah membutuhkan Hizbullah jika ia ingin kembali melanjutkan perannya dalam sejarah Lebanon. Di sini, Hizbullah bisa menjadi kuda trojan yang bisa mengawal Suriah kembali ke Lebanon.

Berdasarkan realitas politik di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam budaya politik Lebanon, keluhuran dan tanggung jawab masyarakat sipil Lebanon belum mampu mencerminkan ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Masyarakat Lebanon yang terpetakan ke dalam berbagai kelompok dan golongan, sebagai suatu ciri masyarakat yang plural, sesungguhnya merupakan sesuatu yang absah dalam konteks kehidupan demokrasi. Namun ia dapat dipandang tidak mencerminkan demokrasi partisipatif dan pluralistik, manakala masing-masing tidak mampu mewujudkan kehidupan bersama dalam sebuah komunitas dengan

menjaga dan menghidupkan nilai-nilai yang dianut bersama. Nilai-nilai itu adalah suatu sistem politik yang disepakati dan menjadi konsensus bersama. Ia tidak mengekang dan membatasi kemerdekaan individual untuk mengimplementasikan sikap-sikap politiknya, namun justru membuka seluas-luasnya partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Sebagai sebuah masyarakat yang plural, warga Lebanon sejatinya dapat saling berbagi dan menjaga kehidupan masyarakat yang kondusif.

Revolusi Cedar di Lebanon tidak atau mungkin belum mampu mendorong sebuah sistem politik yang stabil dengan ciri-ciri pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang jatuh bangun dalam sebuah kurun waktu tertentu, seiring perubahan dan perkembangan politik yang terjadi, bahkan tidak sesuai dan menyalahi Konstitusi Lebanon itu sendiri, menandakan tidak adanya konsensus di antara para warganya. Padahal stabilitas politik dan pemerintahan sangat dibutuhkan bagi pembangunan di segala bidang dan peningkatan kehidupan masyarakat. Dikatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomi yang stabil, erat hubungannya dengan indeks modernisasi, seperti derajat industrialisasi dan urbanisasi, termasuk tingkat melek huruf warganya.

Dalam konteks Lebanon, sebuah sistem pemerintahan yang stabil tampak jauh panggang dari api. Persoalan politik domestik yang tak kunjung reda, datang silih berganti dan menjadi agenda rutin bagi pemerintahan yang berkuasa. Karena itu, dapat diduga bahwa siapapun yang memegang tampuk pemerintahan, baik Koalisi 14 Maret maupun Koalisi 8 Maret, akan dihadapkan kepada persoalan yang sama. Hal ini akan tetap terjadi manakala inti masalahnya tidak sesegera mungkin diurai dan dicarikan solusinya. Pangkal persoalan, tampaknya adalah ketika pemerintahan tidak berpijak di atas masyarakat sipil yang terpadu dan kuat.

Di sinilah pentingnya budaya sipil dalam konteks budaya politik pluralistik. Sementara dapat dipahami bahwa orientasi politik, sikap dan tujuan warga negara Lebanon dari berbagai latar kelompok agama dan sosial yang berbeda, telah menjadi faktor dominan yang menyebabkan negara dan pemerintahan tidak kunjung mendapatkan legitimasi yang kuat dan sekaligus melaksanakannya. Padahal budaya politik menegaskan bahwa suatu sistem dibutuhkan untuk terlihat absah (*legitimate*) di depan para warganya. Legitimasi akan sulit diperoleh manakala budaya politik yang dikembangkan oleh warga Lebanon tidak mampu

mendasari suatu sistem pemerintahan. Sebaliknya yang mendasari keberhasilan suatu masyarakat sipil adalah nilai inti bersama dan rasa percaya sosial antara individu dan insitusi politik. Inilah yang dimaksud bahwa budaya politik merupakan perantara penting antara masyarakat sipil dan negara. Budaya politik menyediakan penghubung antara perilaku individu dan perilaku sistem. Dengan kata lain, budaya sipil yang mapan dicirikan oleh adanya keseimbangan antara rasa hormat warga negara kepada otoritas yang mapan di satu sisi dan keinginan mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses politik di sisi lainnya. Jadi, semestinya masyarakat sipil Lebanon, tidak melulu bersandar kepada kerangka hukum dan politik yang diberikan oleh negara, melainkan juga bagaimana mereka menjadi kekuatan penopang bagi kehidupan yang demokratis di Lebanon. Dikatakan bahwa demokratisasi akan sulit diwujudkan di tengah masyarakat yang enggan memelihara dan menghidupkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, Lebanon dapat diarahkan kepada sebuah negara demokrasi yang kuat, manakala warganya dapat memelihara tatanan perilaku politik bersama, kewarganegaraan universal dan penghargaan atas prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus representatif bagi seluruh kelompok sosial dan agama yang ada. Sebaliknya, manakala negara tidak mampu mengembangkan topangan kultural yang demikian, maka ia akan sangat rentan terhadap praktek otoritarianisme, dan hal ini sudah dipraktekkan di tengah politik Lebanon untuk waktu yang cukup lama.

Politik Lebanon ke depan akan memberikan harapan yang mencerahkan manakala tujuan dan orientasi politik dari masyarakat Lebanon yang plural dikembangkan ke arah budaya politik pluralistik, sehingga ia mampu menjadi penopang sistem pemerintahan yang kuat dan stabil berdasarkan konsensus yang disepakati bersama dan semua pihak mematuhinya. Sejauh ini, budaya multikultural Lebanon bukan alasan utama yang menjadi penyebab perpecahan etnik dan kultural dalam perang sipil yang cukup lama, melainkan lebih kepada persoalan keseimbangan politik kekuasaan. Perbedaan keyakinan agama pun tidak dan bukanlah pemicu konflik sipil, sekali lagi, lebih kepada konstelasi politik. Karena itu semestinya budaya multikultural Lebanon justeru menjadi kekayaan dan energi positif bagi warga Lebanon untuk menyelenggarakan

birokrasi pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan demokratis. Dalam hal ini, komunitas agama yang toleran dan kohesif tentu sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kondusif bagi stabilitas politik dan pemerintahan.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba (1984): *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terj. Sahat Simamora. Jakarta, Bina Aksara.
- Chilcote, Ronald H (2007): *Teori Perbandingan Politik*. Terj. Haris Munandar. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Damsar (2010): *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Faulks, Keith (2010): *Sosiologi Politik: Pengantar Kritis*. Terj. Helmi Mahadi. Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Kanto, Sanggar (2003): "Sampling, Validitas, dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif" dalam Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Raja GrafindoPersada
- Maliki, Zainuddin (2010): *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Mas'ood, Mohtar (2001): "Konsolidasi Menuju Demokrasi dan Peran Civil Society Organization" dalam Zainuddin Maliki (ed.). *Demokrasi Tersandera, Demokrasi Tersandera*. Yogyakarta, Galang Press.
- Moleong, Lexi J. (2006): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 219.
- Morgenthau, Hans J (2010): *Politik Antar Bangsa*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.
- Salim, Agus (2006): *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Sukmadinata, Nana Syaodih (2005): *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Yulianto, Mayor Ari (2010): *Lebanon: Pra dan Pasca Perang 34 Hari Israel vs Hizbullah*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal

- Ajami, Fouad (2009): "The Ways of Syria," dalam *Foreign Affairs*. www.foreignaffairs.com/articles/64972/fouad.../the-ways-of-syria.
- Block, Josh (2010): "The Cedar Resistance," dalam *Foreign Policy*. http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/11/the_cedar_resistance?page=0,1

- Bronson, Rachel (2000): "Syria: Hanging Together or Hanging Separately," dalam *The Washington Quarterly*, Autumn, h. 91-105. www.twq.com/autumn00/bronson.pdf.
- Daniel, Byman (2005): "Hezbollah Dilemma," dalam *Foreign Affairs*. www.foreignaffairs.com/articles/64234/daniel.../hezbollahs-dilemma
- Gambill, Gary C (2001): "Is Syria Losing Control of Lebanon?" dalam *The Middle East Quarterly*, Spring, h. 41-49. www.meforum.org/28/is-syria-losing-control-of-lebanon.
- Gambill, Gary C (2005): "Syria after Lebanon," dalam *The Middle East Quarterly*, Fall, h. 35-42. www.meforum.org/.../syria-after-lebanon-hooked-on-lebanon.
- El-Hokayem, Emile (2007): "Hizballah and Syria: Outgrowing the Proxy Relationship," dalam *The Washington Quarterly*, Spring, h. 35-52. www.twq.com/07spring/docs/07spring_elhokayem.pdf.
- Ismail, Muhamad Takiyuddin (2007): "Doktrin Bush: Satu Analisis Hegemoni Berideo-logi Gramsci" dalam *Jurnal e-Bangi*. Jilid 1, Januari-Desember.
- Phares, Walid (2005): "How the Lebanese Won Their Freedom Back," dalam *The Middle East Quarterly*. www.meforum.org/726/how-the-lebanese-won-their-freedom-back.
- Pan, Esther (2005): "Middle East: Syria and Lebanon," dalam *Council on Foreign Relations*. www.cfr.org/MiddleEast
- Rabbil, Robert G (2007): "Has Hisbullah's Rise Come at Syria's Expense?" dalam *The Middle East Quarterly*, Fall, h. 43-51. www.meforum.org/.../has-hezbollahs-rise-come-at-syrias-expense.
- Rubin, Michael (2005): "Lebanon's Tenuous Transformation," dalam *The Middle East Quarterly*. www.meforum.org/781/lebanons-tenuous-transformation.
- Rubin, Michael (2009): "The Enduring Iran-Syria Hezbollah Axis," dalam *Middle Eastern Outlook*, No. 6. www.aei.org/~/Home/Publications/RecentAEIOutlooks.
- Salem, Paul (2005): "Understanding Lebanon: The Predicament of the Lebanese Government," dalam *Carnegie Endowment*. www.carnegieendowment.org/files/mecrisiswebcommentary.pdf
- Salem, Paul (2010): "Relative Calm Before a Stormy Lebanese Fall," dalam *Carnegie Endowment*. www.carnegieendowment.org/publications/?fa=view&id=41376
- William, Harris (2005): "Bashar al-Assad's Lebanon Gamble." dalam *The Middle East Quarterly*, Summer, h. 33-44. www.meforum.org/730/bashar-al-assad's-lebanon-gamble
- Zisser, Eyal (2005): "Bashar al-Assad: In or Out of the New World Order?" *The Washington Quarterly*, h. 115-131. www.dayan.org/commentary/zisser_bashar.pdf

Zisser, Eyal (2008): "Where is Bashar al-Assad Heading?" dalam *The Middle East Quarterly*, Winter, h. 35-40. www.meforum.org/1819/where-is-bashar-al-assad-heading.

C. Koran dan Majalah

The Daily Star Beirut, 17/01/2006

Al-Hayat London, 21 Februari 2005.

Al-Hayat London, 21 Februari 2005.

Al-Hayat London, 6 Maret 2005.

Al-Hayat London, 21 Februari 2005.

Al-Mustaqbal Beirut, 14 Desember 2004.

An-Nahar London, 14 Desember 2004.

An-Nahar London, 27 Januari 2005.

An-Nahar London, 25 Februari 2005.

The New York Times, 15 Februari 2005.

As-Siyasa Kuwait, 2 April 2005.

The Washington Post, 11 Maret 2005.

"Annan considers new Hariri probe." *BBC News*. 23 Maret 2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4375325.stm

BBC News. 2 Maret 2005. *Assad pledges Lebanon withdrawal*. Lihat: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4310699.stm.

"Hezbollah rallies Lebanese to support Syria." *CNN*. 9 Maret 2005. <http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/03/08/lebanon.syria/index.html>.

"Hezbollah Leads Huge Pro-Syrian Protest in Central Beirut." *The New York Times*. 8 Maret 2005. <http://www.nytimes.com/2005/03/08/international/middleeast/08cnd-beirut.html>

"Hezbollah supporters stage massive pro-Syria rally." *The Washington Times*. 9 Maret 2005. <http://www.washingtontimes.com/news/2005/mar/9/20050309-120527-4599r/>

"Hezbollah and allies resign, toppling Lebanon government." *Reuters*, 12 Januari 2011. <http://www.reuters.com/article/2011/01/12/us-lebanon-hariri-resignation-idUSTRE70B26A20110112>.

"Hezbollah chief: Israel killed Hariri." *CNN World*, 9 Agustus 2010. http://articles.cnn.com/2010-08-09/world/lebanon.nasrallah.israel_1_hezbollah-leader-hassan-nasrallah-israelis?_s=PM:WORLD

"Ketika Koalisi Berakhir." *GATRA*, 26 Januari 2011, h. 68-69.

- “Lebanese ministers forced to quit.” *BBC News*. 28 Februari 2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4305927.stm
- "Lebanon asks AFP to investigate assassination of PM. *ABC Radio*, Sabtu, 19 February 2005. <http://www.abc.net.au/am/content/2005/s130649.htm>.
- “Lebanon Agrees to Hariri Inquiry.” *BBC News*, 25 Maret 2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4383321.stm.
- "Al-Rafiq Hariri's Biografi." Rafiq Hariri Foundation. http://rhf.org.lb/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=12
- “Saudi ruler demands rapid Syrian withdrawal.” *The Daily Star Lebanon*. 4 Maret 2005. <http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/Mar/04/Saudi-ruler-demands-rapid-Syrian-withdrawal.ashx#axzz1Okf6qNkW>.
- “Saudi ruler demands rapid Syrian withdrawal March.” *The Daily Star Lebanon*. 4 Maret 2005. <http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/Mar/04/Saudi-ruler-demands-rapid-Syrian-withdrawal.ashx#axzz1Okf6qNkW>
- “Suriah dan Lebanon Resmi Buka Hubungan Diplomatik.” *Harian Umum Republik*, 16 Oktober 2008.
- “Summits that showcase Arab disunity.” *BBC News*. 23 Maret 2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4376599.stm.
- “Syrian Intelligence Still in Lebanon.” *The Washington Post*. 27 April 2005. <http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/04/26/AR2005042601264.html>
- The Sidney Morning Herald*. 28 Mei 2005. Cedar Revolution moves towards free democracy. Lihat: <http://www.smh.com.au/news/World/Cedar-Revolution>

D. Website

- Abdel Kader, Nizar. (26 Juni 2009). *Prospek Pemerintahan Baru Lebanon*. <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25769&lan=ba&sp=0>
- Bannerman, Graeme. (21 Maret 2008). *Redistribusi Kekuatan di Lebanon*. <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=22813&lan=ba&sp=0>
- Brown, Trent. *Gramsci dan Hegemoni* dalam <http://links.org.au/node/1260>.
- Blanford, Nicholas. (22 September 2009): *In Fractured Lebanon, Starting Reconciliation at a Young Age*. <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=26372&lan=en&sid=1&sp=0>
- Esther Pan. (February 18, 2005). MIDDLE EAST: Syria and Lebanon. <http://www.cfr.org/middle-east/middle-east-syria-lebanon/p7851>
- Fadia Kiwan. (April 14, 2010). *Time for Change 20 Years after Lebanon's Civil War*. <http://www.lebanonwire.com/1004MLN/10041417CG.asp>.

- Follath, Erich. (7 Nopember 2005). *Lebanon after the Cedar Revolution Dancing on the Volcano*.
<http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,365104,00.html>
- Kassis, Maria-Rita. (14 January 2011): *Lebanon: Justice at the Price of Peace?*
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=29124&lan=en&sp=0>
- Kiwan, Fadia. (April 14, 2010). *Time for Change 20 Years after Lebanon's Civil War*. <http://www.lebanonwire.com/1004MLN/10041417CG.asp>.
- MacFarquhar, Neil (20 Maret 2005). *Behind Lebanon Upheaval, 2 Men's Fateful Clash*. <http://www.nytimes.com/2005/03/20/international/middleeast/20lebanon.html?ei=5094&en=441b692d8c0ef46a&hp=&ex=1111294800&partner=hhomepage&pagewanted=all&position>
- Maria-Rita Kassis. (14 January 2011). *Lebanon: Justice at the Price of Peace?*
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=29124&lan=en&sp=0>
- Moubayed, Sami. (15 July 2008): *Syria and Lebanon, More than just Neighbours*.
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=23530&lan=en&sid=1&sp=0>
- Morley, Jefferson (3 Maret 2005). "The Branding of Lebanon's 'Revolution'."
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A1911-2005Mar2.html>
- Raimondo, Justin. (3 Maret 2005). *Lebanon's Hollow 'Cedar Revolution.'*
<http://original.antiwar.com/justin/2005/03/02/lebanons-hollow-cedar-revolution/>
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559 dalam http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html.
- "Report of the UN Fact-Finding Mission to Lebanon inquiring into the causes, circumstances and consequences of the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri 25 February - 24 March 2005"
<http://www.lebanonwire.com/0503/05032701UNREP.asp>
- Stratfor Global Intelligence*. (2 Nopember 2010). "Hezbollah Threatens an 'Explosion' in Beirut Over Tribunal." http://www.stratfor.com/memberships/175137/analysis/20101102_hezbollah_threatens_explosion_beirut_over_tribunal
- <http://www.reuters.com/article/2009/03/16/us-Suriah-lebanon-idUSTRE52-F44L20090316>.
- <http://notesfromamedinah.com/2010/04/06/goodbye-cedar-revolution/>
- <http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,365104,00.html>
- <http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8181.doc.htm>. Resolution 1559 United Nation
- <http://original.antiwar.com/justin/2005/03/02/lebanons-hollow-cedar-revolution/>
- <http://www.carnegieendowment.org/publications/?fa=view&id=41376>

http://www.carnegieendowment.org/files/middleeastcrisis_july_061.pdf.
<http://www.meforum.org/781/lebanons-tenuous-transformation>.
<http://www.meforum.org/726/how-the-lebanese-won-their-freedom-back>.
<http://www.coherentbabble.com/PublicLaws/HR1828PL108-175.pdf>
<http://sangfanani.blogspot.com/2011/04/teori-hegemoni-gramscibag1.html>
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=26372&lan=en&sid=1&sp=0>
http://www.lgic.org/en/history_lebanon2005.php
http://www.aljazeera.com/me.asp?service_ID=7326
<http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/136139>
http://www.lgic.org/en/history_lebanon2005.php
<http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Lebanon-POLITICAL-PARTIES.html>

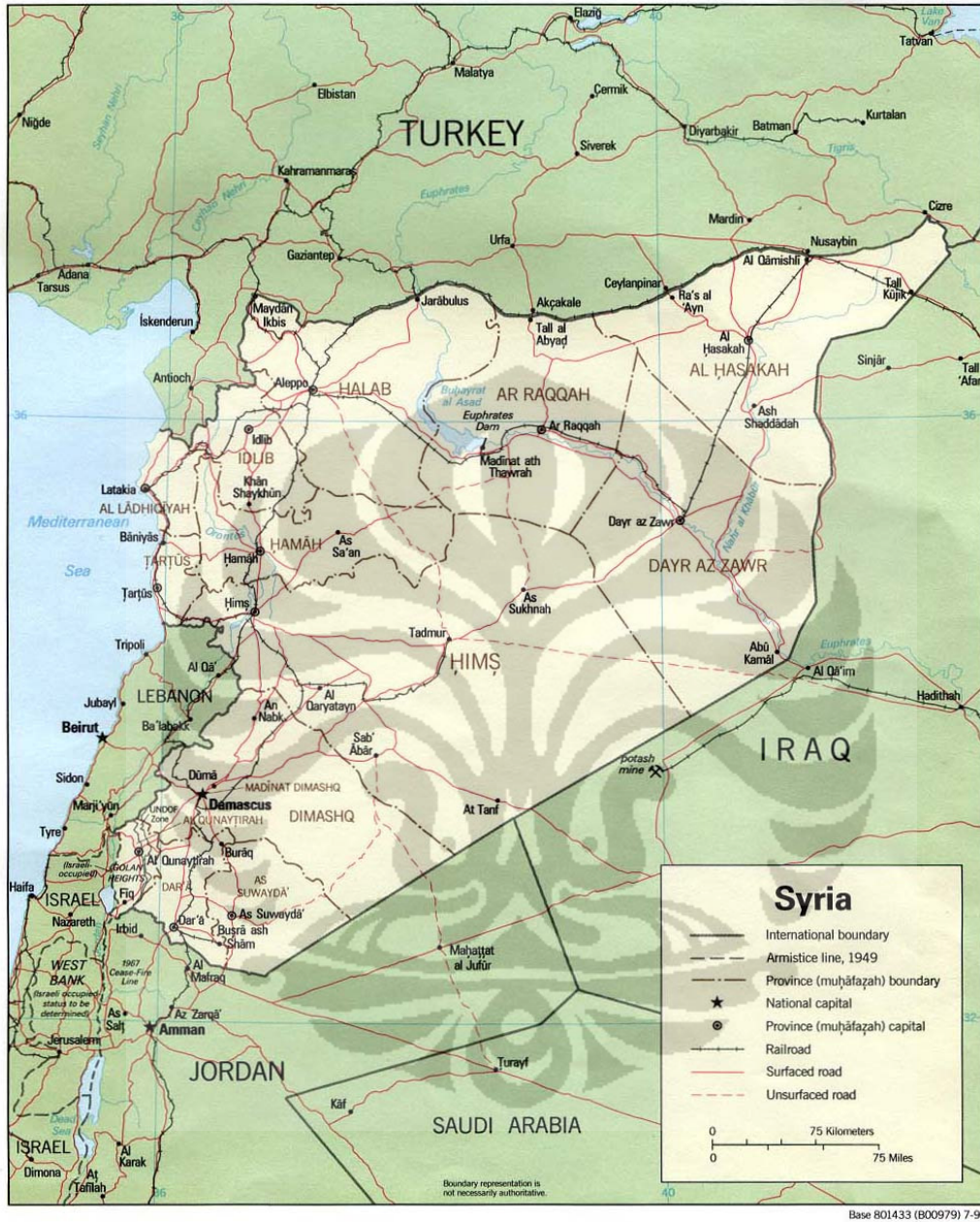


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Peta Lebanon



Lampiran 2: Peta Suriah



Lampiran 3: Konstitusi Lebanon

THE LEBANESE CONSTITUTION

The Lebanese Constitution, translated by Gabriel M. Bustros B.Sc. (Econ), London
BUREAU OF LEBANESE AND ARAB DOCUMENTATION 1973.

THE LEBANESE CONSTITUTION

promulgated on 23 May 1926
modified by the constitutional laws of:

17	October	1927
8	May	1929
9	November	1943
7	December	1943
21	January	1947

TITLE 1. - FUNDAMENTAL PROVISIONS

CHAPTER 1. - THE STATE AND THE TERRITORY

Article 1. - (as modified by the constitutional law of 9 November 1943, article 1)

Lebanon is an independent State, unitarian and sovereign. Its frontiers are those which now limit it:

IN THE NORTH: from the mouth of Nahr El Kebir, the line following the course of this river up to its junction with its tributary the Ouade Khaled at the height of Jisr El Kamar.

IN THE EAST: the top line separating the valleys of Ouade Khaled and the Ouade Nahr-El Assi (Orontes) and passing through the villages of Meayssra, Harbaana, Hait, Ebbech, Faissan, at the height of the villages Brifa and Matrebeh. This line follows the northern limit of the каза of Baalbeck, towards the Northeast and Southeast, then the Eastern limits of the cazas of Baalbeck, Bekaa, Hasbaya and Rashaya.

IN THE SOUTH: the present southern limits of the cazas of Tyre and Marjeyoun.

IN THE WEST: the Mediterranean Sea.

Article 2. - No part of the Lebanese territory may be alienated or ceded.

Article 3. - The limits of the administrative districts may not be modified except by law.

Article 4. - The Greater Lebanon is a Republic. Beirut is its capital city.

Article 5. - (As modified by the constitutional law of 7 December 1943, sole article).

The Lebanese flag is composed of three horizontal stripes two red ones framing a white one. The top of the white stripe is equal to double of each of the red stripes. In the center of the white stripe figures a green cedar tree the width of which occupies the third of the latter and which, at its top and base, touches each of the red stripes.

CHAPTER 2. - THE LEBANESE NATIONALS, THEIR RIGHTS AND THEIR DUTIES

Article 6. - The Lebanese nationality, the way it is acquired, is retained and forfeited, shall be determined by law.

Article 7. - All the Lebanese are equal before the law. They enjoy equal civil and political rights and are equally subjected to public charges and duties, without any distinction whatever.

Article 8. - Individual liberty is guaranteed and protected. No one can be arrested or detained except in accordance with the provisions of the law. No infringements and no sanctions can be established except by law.

Article 9. - Liberty of conscience is absolute. By rendering homage to the Almighty, the State respects all creeds and guarantees and protects their free exercise, on condition that they do not interfere with public order. It also guarantees to individuals, whatever their religious allegiance, the respect of their personal status and their religious interests.

Article 10. - Education is free so long as it is not contrary to public order and to good manners and does not touch the dignity of creeds. No derogation shall affect the right of communities to have their schools, subject to the general prescriptions on public education edicted by the State.

Article 11. - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943, article 2).

Arabic is the official national language. A law shall determine the cases where the French language is to be used.

Article 12. - All Lebanese citizens are equally admitted to all public functions without any other cause for preference except their merit and competence and according to the conditions set by law. A special statute shall govern Civil Servants according to the administrations to which they belong.

Article 13. - Freedom of expression by word or pen, freedom of the press, freedom of holding meetings and freedom of association are equally guaranteed within the framework of the law.

Article 14. - Domicile is unviolable. None can enter it except in cases provided by the law and according to the form it prescribes.

Article 15. - Property is under the protection of the law. None may be deprived of his property except for public utility, in cases established by the law and in return of prior and fair compensation.

TITLE II. - POWERS

CHAPTER I. - GENERAL PROVISIONS

Article 16. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, Article 1)

Legislature lies with a single assembly: the Chamber of Deputies.

Article 17. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, Article 2)

Executive power is entrusted to the President of the Republic who exercises it with the assistance of Ministers, according to conditions established by the present constitution.

Article 18. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, Article 50)

Initiative for legislation belongs to the President of the Republic and the Chamber of Deputies.

Article 19. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, Article 50)

In order that a law may be promulgated, it must have been voted by the Chamber.

Article 20. - Judicial power functioning within the framework of a statute established by law and ensuring essential guarantees to judges and the disputing parties is exercised by courts of different order and degrees. The law fixes the limits and the conditions of the magistrates' tenure of office. Judges are independent in the exercise of their functions. The awards and judgments of all courts are rendered and executed in the name of the Lebanese people.

Article 21. - Any Lebanese citizen aged 21 who meets the conditions of the electoral law is entitled to vote.

CHAPTER 2.- THE LEGISLATURE

Article 22. - (Abrogated by the constitutional law of 17 October 1927, article 50)

Article 23. - (Abrogated by the constitutional law of 17 October 1927, article 50)

Article 24. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

The Chamber of Deputies is composed of elected members: their number and conditions of their election are determined by the electoral laws in force.

Article 25. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

In the event of the dissolution of the Chamber of Deputies, the deed dissolving it must contain convocation of the voters for new elections which shall be held in conformity with article 24 and within a time-limit not exceeding three months.

CHAPTER 3. - GENERAL PROVISIONS

Article 26. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 3)

The Chamber and the Executive sit in Beirut.

Article 27. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

The Chamber member represents all the Nation. No imperative mandate may be given him by his electors.

Article 28. - (As modified by the constitutional law of 8 May 1929, article 1)

No incompatibility exists between a deputy's mandate and ministerial office. Ministers may be taken indistinctively either from the Chamber or from outside.

Article 29. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 6)

Cases of inaptness to the quality of deputy are determined by law.

Article 30. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

The Chamber of Deputies is solely competent to adjudicate the validity of its members' mandate. No mandate may be invalidated except by a two-thirds majority vote of the whole Assembly.

Article 31. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, Article 8)

Any sitting of the Chamber outside the legal time of session is illegal and null as a matter of course.

Article 32. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 9)

The Chamber convenes every year in two ordinary sessions. The first opens on the first Tuesday following the 15th March and terminates at the end of the month of May. The second opens on the first Tuesday following the 15th October. It is devoted before any other business to budget debate and vote. It lasts until the end of the year.

Article 33. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 10)

The opening and winding up of ordinary sessions take place as a matter of right on the dates fixed by article 32.

The President of the Republic may convene the Chamber to an emergency session. The opening and winding up of emergency sessions are fixed by decree.

The day's Agenda thereof is fixed by the decree of convocation.

The President of the Republic is bound to convene the Chamber of Deputies, if so requested by the absolute majority of its members.

Article 34. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 11)

The Chamber may not be validly constituted except with the attendance of the majority of the members legally composing it.

Resolutions are adopted by majority vote. In the event of a tie the matter under debate is rejected.

Article 35. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 12)

Debates in the Chamber are public. However, the Chamber convenes in secret committee upon Government request or of five of its members. It then decides if the debate must be resumed in public on the same subject.

Article 36. - Voting is expressed in a loud voice or by sitting and standing, except in the event of an election, in which case ballot is secret. On laws as a whole and on the matter of confidence voting is always by nominal call and in a loud voice.

Article 37. - (As modified by the constitutional law of 8 May 1929, article 2)

The right of every deputy to question the responsibility of Ministers is absolute during the ordinary and emergency sessions.

No motion of this nature may be debated and voted upon except five days at least after it has been tabled before the Chamber of Deputies and communicated to the Minister of Ministers concerned.

Article 38. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 14)

Any Bill which has not been rejected by the Chamber may not be tabled once more in the course of the same session.

Article 39. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 15)

No member of the Chamber may be prosecuted for his expression of opinions or votes during the term of his mandate.

Article 40. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 16)

No member of the Chamber may, while the session is in progress, be prosecuted or arrested for breach of the penal law - barring cases of flagrante delicto - except with the approval of the Chamber.

Article 41. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

When a seat in the Chamber has become vacant, the vacancy shall be filled within a time-limit of two months. The term of office of the new member shall run up to the expiry of the term of office of his predecessor.

No steps shall be taken to fill the vacancy if the Chamber is less than six months away from the expiry of its powers.

Article 42. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

General elections for the renewal of the Assembly are held within the sixty days which precede the end of its term of office.

Article 43. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 19)

The Chamber drafts its own internal regulations.

Article 44. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

At the first sitting which follows every renewal and on the opening of the October session, the Chamber meeting under the presidency of its senior member, the two youngest members acting as secretaries, elects separately, by secret ballot and the absolute majority of the expressed votes, a president (Speaker), a vice-president, and two secretaries. At the third ballot, relative majority is sufficient.

In the event of a tie, the oldest is declared elected.

Article 45. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 21)

The members of the Chamber do not vote except if they attend the sitting; voting by proxy is not admitted.

Article 46. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 22)

Only the Chamber is entitled to maintain its own order, through the Speaker.

Article 47. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 23)

Any petition to the Chamber must be made out and communicated in writing. It is forbidden to hand in petitions in person or on the floor.

Article 48. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 24)

Indemnity to the members of the Chamber is determined by law.

CHAPTER 4. THE EXECUTIVE

Article 49. - (As modified by the constitutional laws of 8 May 1929, article 3, and 21 January 1947, article 2)

The President of the Republic is elected by secret ballot at a two-thirds majority of the votes, by the Chamber of Deputies. After the first ballot, absolute majority suffices. The President's term of office is of six years. He may not be re-elected except after a break of six years.

None is eligible as President of the Republic if he does not meet the conditions required to be eligible to the Chamber of Deputies.

Article 50. - Before entering upon his duties, the President of the Republic takes the oath of allegiance to the Lebanese Nation and the Constitution, before Parliament, in the following terms:

"I swear by Almighty God to observe the Constitution and the laws of the Lebanese people, to safeguard the independence of Lebanon and the integrity of its territory. "

Article 51. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 26)

The President of the Republic promulgates laws when they have been voted by the Chamber; he sees to their execution; he is vested with regulating powers though he may not modify the laws themselves nor exempt from their execution.

He has the power of pardon. Amnesties may not be granted except by law.

Article 52. - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943, article 3)

The President of the Lebanese Republic negotiates and ratifies treaties. He brings them to the knowledge of the Chamber as soon as the interest and safety of the State permit.

Treaties involving State finances, trade agreements and in general treaties which cannot be denounced at the end of each calendar year, are not definitive except after they have been voted by the Chamber of Deputies.

Article 53. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

The President of the Republic appoints and dismisses the Ministers among whom he designates a President for the Council of Ministers; he nominates to all posts for which the mode of appointment is not otherwise determined by law; he presides over national official functions.

Article 54. - Each of the acts of the President of the Republic must be counter-signed by the Minister or Ministers concerned, except however in the case of the nomination or revocation of a Minister.

Article 55. - (As modified by the constitutional law of 8 May 1929, article 4)

The President of the Republic may, by motivated decree taken on the favourable advice of the Council of Ministers, dissolve the Chamber of Deputies, before the expiry of its term of office.

In this case, the electing bodies are gathered as provided in article 25 and the new Chamber is convened within the fifteen clear days following the proclamation of the election results.

Article 56. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 30)

The President of the Republic promulgates laws within the calendar month which follows the communication to the Government of the law definitively passed; he must promulgate within five clear days those laws whose promulgation has been declared a matter of urgency by special vote of the Chamber.

Article 57. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 31)

Within the time-limit fixed for promulgation, the President of the Republic may once ask for a new debate which may not be denied him.

When the President of the Republic uses this right, he is not bound to promulgate a law unless this law has been passed by the Chamber after a second debate by absolute majority of the members legally composing this Assembly.

Article 58. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 32)

By decree already taken on the favourable advice of the Council of Ministers, the President of the Republic may render executory any project which has previously been declared urgent by the Government by the decree of transmission taken on the favourable advice of the Council of Ministers, and on which the Chamber has not adjudicated within the forty days following its communication to the Assembly.

Article 59. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 33)

The President of the Republic may adjourn the Chamber for a period not exceeding one month. He may not do so twice in the same session.

Article 60. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,

article 1)

The President of the Republic is not responsible for the acts of his functions except in cases of breach to the Constitution or high treason.

His responsibility for offences of common law is submitted to ordinary laws.

For such offences, as for breach of the Constitution and high treason he may not be impeached except by the Chamber of Deputies deciding by a two-thirds majority of the members of the whole Assembly; he is tried by the Higher Court provided in article 80. Public prosecutorship before the Higher Court is exercised by a magistrate appointed by the highest jurisdiction, with all the chambers meeting.

Article 61. - When indicted, the President of the Republic is suspended of his functions and the Presidency is vacant until the Higher Court adjudicates.

Article 62. - In case of vacancy of the Presidency of the Republic, for whatever reason this may be, executive power is exercised, provisionally, by the Council of Ministers.

Article 63. - The civil list of the President of the Republic is determined by law. During the President's tenure of office it may be neither increased nor reduced.

Article 70. - The Chamber of Deputies is entitled to arraign Ministers for high treason or for serious dereliction of their incumbent duties. Committal for trial may not be decided except by a two-thirds majority of the whole Assembly. A special law shall determine the civil responsibility of Ministers.

Article 71. - The Minister committed for trial is judged by the Higher Court.

Article 72. - The Minister relinquishes his post as soon as he has been committed for trial. A Minister's resignation does not preclude the initiation or pursuance of proceedings against him.

TITLE III. -

a) ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 73. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 38)

At least one month and at the latest two months before the expiry of the powers of the President of the Republic, the Chamber convenes on the invitation of its Speaker, for the election of a new President.

In default of a convocation, the meeting shall be held as a matter of right the tenth day before the end of the President's term of office.

Article 74. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927 article 39)

Article 64. - Ministers assume the higher management of all the State services pertaining to their respective departments. Each, within his competence, sees to the enforcement of the laws and regulations.

Article 65. - No one may be a Minister if he is not a Lebanese.

Article 66. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 34)

Ministers are severally responsible before the Chamber for the Government general policy and individually for their personal acts. The Government's overall program is prepared and presented to the Chamber by the President of the Council or by a Minister acting in his name.

Article 67. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 35)

Ministers may come to the Chamber without let or hindrance and make themselves heard whenever they please. They may seek the assistance of one or several Civil Servants of their department.

Article 68. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 36)

When, in conformity with article 37, the Chamber declares it has no confidence in a Minister, this Minister is required to resign.

Article 69. - (Abrogated by the constitutional law of 8 May 1929, article 5)

Should the presidency become vacant through death, resignation or any other cause, the Assembly meets immediately and as a matter of right to elect a new President. If at the time the vacancy occurs, the Chamber happens to be dissolved, the electoral bodies are summoned without delay and, soon after the elections are held, the Chamber meets as a matter of right.

Article 75. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 40)

The Chamber meeting to elect the President of the Republic constitutes an electing body and not a deliberating assembly.

It must proceed solely, without delay or debate, with the election of the Head of the State.

b) REVISION OF THE CONSTITUTION

Article 76. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 41)

The Constitution may be revised on the initiative of the President of the Republic.

In this event, the government shall table before the Assembly a draft constitutional law.

Article 77. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 42)

The Constitution may equally be revised on the initiative of the Chamber of Deputies. This right is exercised in the following manner:

In the course of an ordinary session and on the proposal of at least ten of its members, the Chamber may voice the desire, by a two-thirds majority of the members legally composing it, that the Constitution should be revised. The articles and questions covered by this desire are to be specifically enumerated and clarified.

The Speaker conveys the wish to the Government, requesting it to lay down a draft constitutional law.

If the Government approves the Assembly's desire, it must prepare the relevant draft law and table it before the Assembly within four months; if the Government is at variance with the Assembly, its desire is sent back for a further deliberation. If the Chamber maintains its desire at a three-quarters majority of the members legally composing it, the President of the Republic is at liberty, either to acquiesce to the Assembly's desire, or issue a decree of dissolution, and take steps for new elections within a time-limit of three months.

Should the new Assembly insist on the need for revision, the Government is compelled to acquiesce to the wish of the Assembly and to table a draft law within a time-limit of four months.

c) OPERATION OF THE ASSEMBLY

Article 78. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, Article 43)

When the draft constitutional law has been tabled before it, the Chamber must engage itself in no other business but that of revision, until the final vote.

It may not deliberate and vote except those articles and issues which have been set down for the sake of limitation and clarified in the project duly communicated.

Article 79. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 44)

The Chamber of Deputies, with a draft constitutional law before it, may not validly deliberate and vote except when a two-thirds majority of the members legally composing it attend. Deliberations are carried by a two-thirds majority of the members legally composing the Assembly.

The President of the Republic is bound to promulgate the constitutional law in the same conditions and forms as ordinary laws. He may within the time-limit fixed for promulgation, require a new deliberation. This shall equally be proceeded with by a two-thirds majority.

TITLE IV. - VARIOUS PROVISIONS

a) THE HIGHER COURT

Article 80. - (As modified by the constitutional Law of 17 October 1927, article 45)

The Higher Court is composed of seven deputies elected by the Chamber of Deputies and by eight of the highest Lebanese magistrates, selected by order of hierarchy or, at equal rank, by order of seniority, under the chairmanship of the top grade magistrate.

Verdicts of condemnation by the Higher Court are rendered by a majority of six votes. A law shall determine the procedure to be followed in this Court.

b) FINANCE

Article 81. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

Taxes are established for public utility. No taxes may be levied in the Lebanese Republic except in conformity with a uniform law applicable on the whole territory without exception.

Article 82. - No tax may be modified or suppressed except by virtue of a law.

Article 83. - Every year, early in the October session, the Government submits to the Chamber of Deputies, for examination and approval, the general budget of State revenue and expenditure for the following year. The budget is voted article by article.

Article 84. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 46)

In the course of the budget debate and the discussion of the Bills providing for the opening of supplementary and emergency credits, the Chamber may not increase the credits proposed in the draft budget or in the above-mentioned projects, either through amendment or through independent proposals. But once this debate is over, the Assembly may pass laws providing for new expenditures .

Article 85. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947, article 1)

No emergency credit may be opened except by special law.

However, when unpredictable circumstances have made urgent expenditures necessary, the President of the Republic may, by decree passed on the favourable advice of the Council of Ministers, open emergency or supplementary credits, or operate credit transfers. Such credits may not exceed 15,000 pounds per article.

The measures so edicted are submitted to the ratification of the Chamber at the first session following,

Article 86. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, - article 48)

If the Chamber of Deputies has not definitively dealt with the draft project before the expiry of the session devoted to the examination of the budget, the President of the Republic shall summon the Assembly to an extraordinary session expiring at the end of January to proceed with the budget debate; if at the end of that extraordinary session the budget has not been finalised, the President of the Republic may, by decree passed on the favourable advice of the Council of Ministers, make the draft budget executory in the form in which it was tabled before the Chamber.

The President may not exercise this power except if the draft budget has been tabled before the Chamber at least fifteen days before the beginning of the session.

In the course of that extraordinary session, taxes, contributions, duties, fees and other revenue continue to be levied as previously.

The expenditures of the month of January are initiated on the basis of the provisional twelfth of the preceding financial year, increased by permanent additional credits and reduced by the permanent credits withdrawn.

Article 87. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, article 49)

The final account of the finance administration for the closed financial year must be submitted to the Chamber and approved before the promulgation of the budget of the second financial year following that to which the account refers. An Audit Department shall be created by special law.

Article 88. - No public loan and no commitment likely to burden the Treasury may be transacted except by virtue of a law.

Article 89. - No concession aiming at the exploitation of a natural resource of the country or a public utility service, nor any monopoly may be granted except by virtue of a law and for a limited period.

TITLE V

Article 90. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 19 43, article 4)

Article 91. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 1943, article 4)

Article 92. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 1943, article 4)

Article 93 - Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947, article 2)

Article 94. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 1943, article 4)

TITLE VI. - FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Article 95. - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943, article 5)

As a transitory measure and for the sake of even justice and concord, the communities shall be equally represented in public posts and in ministerial composition, without damage to State interest resulting therefrom.

Article 96. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947, article 2)

Article 97. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947, article 2)

Article 98. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947, article 2)

Article 99. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947, article 2)

Article 100. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947, article 2)

Article 101. - As from 1 September 1926, the State of "Greater Lebanon" shall bear the name of "Lebanese Republic", without change or modification of any other kind.

Article 102 - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943, article 6)

All legislative provisions contrary to the present constitution are abrogated.

Sumber:

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/lebanon/lebanon-e.htm



Lampiran 4: Resolusi DK PBB 1559

United Nations
Security Council
Distr.: General

S/RES/1559 (2004)
04-49892 (E)

Resolution 1559 (2004)

Adopted by the Security Council at its 5028th meeting, on 2 September 2004

The Security Council

Recalling all its previous resolutions on Lebanon, in particular resolutions 425 (1978) and 426 (1978) of 19 March 1978, resolution 520 (1982) of 17 September 1982, and resolution 1553 (2004) of 29 July 2004 as well as the statements of its President on the situation in Lebanon, in particular the statement of 18 June 2000 (S/PRST/2000/21),

Reiterating its strong support for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized borders,

Noting the determination of Lebanon to ensure the withdrawal of all non-Lebanese forces from Lebanon,

Gravely concerned at the continued presence of armed militias in Lebanon, which prevent the Lebanese Government from exercising its full sovereignty over all Lebanese territory,

Reaffirming the importance of the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory,

Mindful of the upcoming Lebanese presidential elections and underlining the importance of free and fair elections according to Lebanese constitutional rules devised without foreign interference or influence,

1. Reaffirms its call for the strict respect of the sovereignty, territorial integrity, unity, and political independence of Lebanon under the sole and exclusive authority of the Government of Lebanon throughout Lebanon;
2. Calls upon all remaining foreign forces to withdraw from Lebanon;
3. Calls for the disbanding and disarmament of all Lebanese and non-Lebanese militias;
4. Supports the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory;
5. Declares its support for a free and fair electoral process in Lebanon's upcoming presidential election conducted according to Lebanese constitutional rules devised without foreign interference or influence;
6. Calls upon all parties concerned to cooperate fully and urgently with the Security Council for the full implementation of this and all relevant resolutions concerning the restoration of the territorial integrity, full sovereignty, and political independence of Lebanon;
7. Requests that the Secretary-General report to the Security Council within thirty days on the implementation by the parties of this resolution and decides to remain actively seized of the matter.

Lampiran 5: Kesepakatan Taif 1989 yang terkait Suriah

THE TAIF ACCORDS OCTOBER 22 1989

Excerpts

PART II: IMPOSING THE SOVEREIGNTY OF THE LEBANESE GOVERNMENT OVER ALL LEBANESE LAND

Given the agreement among the Lebanese parties on the existence of a strong and able state based on national reconciliation the national accord government shall outline a detailed security plan for a one-year period whose aim shall be: the gradual extension of the sovereignty of the Lebanese government over all Lebanese lands through the State's intrinsic resources. The general elements of the plan are as follows:

1. Declaration of the disbanding of the Lebanese and non-Lebanese militias and the transfer of weapons in their possession to the Lebanese government within six months of the rectification of the document of national reconciliation the election of a president the establishment of a national accord government and the constitutional ratification of the political reforms.
2. The strengthening of the internal security forces through the following measures:
 1. The opening of recruitment to all people of Lebanon without exception the training of recruits and their dispersal among the district units. Concurrently they will undergo regular and organized courses.
 2. The strengthening of the security apparatus in order to control border entries and exits by air sea and land.
3. The strengthening of the armed forces
 - a. The major task of the armed forces is to defend the motherland and when necessary to maintain public order when threatened when the internal security forces are unable to handle the situation alone.
 - b. The armed forces shall be used to help the internal security forces in maintaining security in circumstances to be decided by the government.
 - c. The armed forces shall be united trained and drilled to enable them to bear national responsibility against Israeli aggression.
 - d. When the internal security forces shall be fit to carry out their security missions the armed forces shall be returned to their bases.
 - e. The intelligence system of the armed forces shall be reorganized for sole military purposes.
4. The solution of the problem of Lebanese displaced persons

Every Lebanese national who has left his home since 1975 shall have the right to return to his point of departure. Laws will be passed to ensure this right and means of rehabilitation will be provided.

Given the aim of the Lebanese government to impose its control over all of Lebanese land through its own resources first and foremost by means of the internal security forces and on the basis of the ties of legitimate Lebanese forces in extending the sovereignty of the Lebanese government during a period of time not exceeding two years after the ratification to the national reconciliation document the establishment of the national accord government and the constitutional ratification of the political reforms. At the conclusion of this period the two governments - the Syrian government and the Lebanese national accord government - shall decide on the redeployment of the Syrian forces in the Bekaa area and the western Bekaa approaches in Dahr al-Baydar to the Khamana-al-Mudayraj-Ein Dara line. Should the need arise (for the forces to be deployed) in other locations this shall be decided by a joint Lebanese-Syrian military committee with the agreement of the two governments to determine the scope of the Syrian forces and the duration of their presence in these areas. The

agreement shall also define the relationship between these forces and the Lebanese authorities in the places they are stationed.

The Arab League "troika" committee is prepared to assist the two states in achieving this agreement should they so wish.

PART III: THE LIBERATION OF LEBANON FROM ISRAELI OCCUPATION

1. Renewed state control to the internationally recognized Lebanese border requires the following measures:

- a. The implementation of Resolution 425 and the other Security Council decisions referring to the complete removal of the Israeli occupation.
- b. Adherence to the armistice agreement signed on March 23 1949.
- c. Taking all necessary measures to liberate all Lebanese lands from Israeli occupation the extension of government sovereignty to all these lands the deployment of the Lebanese army along the border with Israel and the strengthening of the UNIFIL presence in southern Lebanon in order to ensure the Israeli withdrawal and to restore security and stability to the border area.

PART IV: LEBANESE-SYRIAN RELATIONS

Lebanon which has Arab affinities and an Arab identity maintains loyal ties of brotherhood with all Arab states. It maintains preferred relations with Syria based on the roots of close affinity history and common interests.

This is the bases for coordination and cooperation between the two states which shall sign agreements in various areas in such a manner as to realize the interests of both states within the framework of the sovereignty and independence of each.

On this basis and given that the security principles create the necessary climate for the development of these preferred relations Lebanon cannot serve as the source of a threat against Syrian security nor can Syria serve as the source of a threat against Lebanese security. Hence Lebanon shall not allow itself to serve as the transit point or base for any force state or organization interested in harming its own security or the security of Syria.

Similarly Syria which meticulously upholds the security independence and unity of Lebanon and the agreement between the two countries shall not allow any activity that threatens (Lebanese) security independence or sovereignty.

Sumber : <http://www.mideastweb.org/taif.htm>

Lampiran 6: Laporan Tim Pencari Fakta PBB atas Kasus Hariri

Report of the UN Fact-Finding Mission to Lebanon inquiring into the causes, circumstances and consequences of the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri
25 February - 24 March 2005

Executive Summary

On 14 February 2005, an explosion in downtown Beirut killed twenty persons, among them the former Prime Minister, Rafik Hariri. The United Nations' Secretary-General dispatched a Fact-Finding Mission to Beirut to inquire into the causes, the circumstances and the consequences of this assassination. Since it arrived in Beirut on 25 February, the Mission met with a large number of Lebanese officials and representatives of different political groups, performed a thorough review of the Lebanese investigation and legal proceedings, examined the crime scene and the evidence collected by the local police, collected and analyzed samples from the crime scene, and interviewed some witnesses in relation to the crime.

The specific 'causes' for the assassination of Mr. Hariri cannot be reliably asserted until after the perpetrators of this crime are brought to justice. However, it is clear that the assassination took place in a political and security context marked by an acute polarization around the Syrian influence in Lebanon and a failure of the Lebanese State to provide adequate protection for its citizens.

Regarding the circumstances, the Mission is of the view that the explosion was caused by a TNT charge of about 1000 KG placed most likely above the ground. The review of the investigation indicates that there was a distinct lack of commitment on the part of the Lebanese authorities to investigate the crime effectively, and that this investigation was not carried out in accordance with acceptable international standards. The Mission is also of the view that the Lebanese investigation lacks the confidence of the population necessary for its results to be accepted.

The consequences of the assassination could be far-reaching. It seems to have unlocked the gates of political upheavals that were simmering throughout the last year. Accusations and counter-accusations are rife and aggravate the ongoing political polarization. Some accuse the Syrian security services and leadership of assassinating Mr. Hariri because he became an insurmountable obstacle to their influence in Lebanon. Syrian supporters maintain that he was assassinated by "the enemies of Syria"; those who wanted to create international pressure on the Syrian leadership in order to accelerate the demise of its influence in Lebanon and/or start a chain of reactions that would eventually force a 'regime change' inside Syria itself. Lebanese politicians from different backgrounds expressed to the Mission their fear that Lebanon could be caught in a possible showdown between Syria and the international community, with devastating consequences for Lebanese peace and security. After gathering the available facts, the Mission concluded that the Lebanese security services and the Syrian Military Intelligence bear the primary responsibility for the lack of security, protection, law and order in Lebanon. The Lebanese security services have demonstrated serious and systematic negligence in carrying out the duties usually performed by a professional national security apparatus. In doing so, they have severely failed to provide the citizens of Lebanon with an acceptable level of security and, therefore, have contributed to the propagation of a culture of intimidation and impunity. The Syrian Military Intelligence shares this responsibility to the extent of its involvement in running the security services in Lebanon.

It is also the Mission's conclusion that the Government of Syria bears primary responsibility for the political tension that preceded the assassination of former Prime Minister Mr. Hariri. The Government of Syria clearly exerted influence that goes beyond the reasonable exercise of cooperative or neighborly relations. It interfered with the details of governance in Lebanon in a heavy-handed and inflexible manner that was the primary reason for the political polarization that ensued. Without prejudice to the results of the investigation, it is obvious that this atmosphere provided the backdrop for the assassination of Mr. Hariri.

It became clear to the Mission that the Lebanese investigation process suffers from serious flaws and has neither the capacity nor the commitment to reach a satisfactory and credible conclusion. To find the truth, it would be necessary to entrust the investigation to an international independent

commission, comprising the different fields of expertise that are usually involved in carrying out similarly large investigations in national systems, with the necessary executive authority to carry out interrogations, searches, and other relevant tasks. Furthermore, it is more than doubtful that such an international commission could carry out its tasks satisfactorily - and receives the necessary active cooperation from local authorities - while the current leadership of the Lebanese security services remains in office.

It is the Mission's conclusion that the restoration of the integrity and credibility of the Lebanese security apparatus is of vital importance to the security and stability of the country. A sustained effort to restructure, reform and retrain the Lebanese security services will be necessary to achieve this end, and will certainly require assistance and active engagement on the part of the international community.

Finally, it is the Mission's view that international and regional political support will be necessary to safeguard Lebanon's national unity and to shield its fragile polity from unwarranted pressure. Improving the prospects of peace and security in the region would offer a more solid ground for restoring normalcy in Lebanon.

I. Introduction

1. On 14 February 2005, an explosion in downtown Beirut killed twenty persons, among them the former Prime Minister, Rafik Bahaa-Edine Hariri. Also killed in the explosion were Yahya Mustafa Al-Arab, Mohammad Ben Saad-Eddine Darwish, Talal Nabeeh Nasser, Ziad Mohammad Tarraf, Omar Ahmad Al-Masri, Mohammad Riad Hussein Ghalayeeni, Mazen Adnan Al-Dahabi, Yamama Kamel Dhamen, Haitham Khaled Osman, Alaa Hasan Osfur, Zahi Haleem Abu Rujayli, Joseph Emile Aoun, Rima Mohammad Ra'ef Bezi, Ruad Hussein Haidar, Sobhi Mohammad Al-Khedhr, Abdu Tawfik Bu Farah, Abdel-Hameed Mohammad Ghalayeeni, Mahmud Saleh Al-Khalaf, Mohammad Saleh Al-Hamad Al-Mohammad. In addition to the killed, Farhan Ahmad Al-Isa is still missing and believed to be among the victims. Another 220 persons were injured.

2. On 15 February, the President of the Security Council issued a statement on behalf of the Council requesting the Secretary-General to "follow closely the situation in Lebanon and to report urgently on the circumstances, causes and consequences of this terrorist act". The Secretary-General announced on 18 February that he was sending a Fact-Finding Mission to Beirut to gather such information as necessary for him to report to the Council in a timely manner. After an exchange of letters between the Secretary-General and the President of Lebanon, a mission headed by Peter FitzGerald, a Deputy Commissioner of the Irish Police, Garda Siochána, and comprised of two police investigators, a legal advisor and a political advisor, was sent to Lebanon to gather facts about the causes, circumstances and consequences of the assassination. Additional experts in explosives, ballistics, DNA and crime scene examination were brought in on 6 March, in agreement with the Lebanese authorities, to examine the crime scene and the samples collected from it.

3. Since its arrival in Beirut on 25 February, the members of the Fact-Finding Mission (hereafter referred to as 'the Mission') met with a large number of Lebanese officials and representatives of different political groups, performed a thorough review of the Lebanese investigation and legal proceedings, examined the crime scene and the evidence collected by the local police, collected and analyzed samples from the crime scene, and interviewed some witnesses in relation to the crime. Since some of the persons interviewed by the Mission requested anonymity, this report does not include a full list of the interviewees. The Mission concluded its inquiry in Lebanon on 16 March 2005. The present report includes its findings and recommendations.

II. Findings

4. The findings of the Mission fall within three categories as defined by the Security Council: the causes, circumstances, and consequences.

A. Causes

5. The specific 'causes' for the assassination of Mr. Hariri cannot be reliably asserted until after the perpetrators of this crime are brought to justice. However, it is clear that the assassination took place

in a political and security context marked by an acute polarization around the Syrian influence in Lebanon and a failure of the Lebanese State to provide adequate protection for its citizens.

The political context

6. Lebanon has repeatedly served as a battleground for the parties to the Arab-Israeli conflict, with devastating impact on its national unity and independence, as demonstrated by its tragic civil war (1975-1990) and by various military campaigns on its soil. Syria had maintained a military presence in Lebanon since May 1976 with the consent of the Lebanese government. It also exerted political influence in Lebanese affairs, an influence that has significantly increased since 1990 and was sanctioned in 1991 by a treaty of "Brotherhood, Cooperation, and Coordination".

7. The Syrian presence in Lebanon remained generally unchallenged until Israel withdrew its forces from South Lebanon in 2000. Political figures started to voice their opposition to the continued Syrian influence and called for the implementation of the remaining provisions of the Taif Agreement (of 1989), which, if implemented, would have substantially reduced the Syrian presence in Lebanon to a possible complete pullout. Although Mr. Hariri carefully avoided this debate, his relations with President Emil Lahoud, who is generally described as Syria's favorite, were strained. As a prominent security official close to Syria put it to the Mission; the two men had repeated conflicts during Mr. Hariri's term (2000-2004) to a point that required "external intervention and mediation on a daily basis". The conflict between Mr. Lahoud and Mr. Hariri affected the latter's ability to run the government and to carry out his policies, sometimes to a point of paralysis. Mr. Hariri's difficulties with Mr. Lahoud were widely interpreted as a sign of Syria's mistrust in the former.

8. Mr. Lahoud's term in office should have ended in 2004, with no possibility of renewal according to the Constitution. Mr. Hariri was clearly hoping that the end of Mr. Lahoud's term would enable him to regain control over his government. However, during 2004, certain voices in Lebanon suggested amending the constitution in order to extend the term of Mr. Lahoud. This possibility became part of the debate over the Syrian presence in Lebanon and fueled it further. Given the distribution of seats in the parliament, a constitutional amendment required the support of Mr. Hariri's bloc, a support he was unprepared to lend. Moreover, were informed by reliable sources that Mr. Hariri had managed to obtain a commitment from the Syrian leadership not to extend Mr. Lahoud's term.

9. However, the Syrian leadership later decided to support an extension of the presidential term, albeit for three instead of six years. The pressure for the extension was considerable, divisive and with far reaching consequences. As a Lebanese official close to the Syrian leadership told the Mission, the Syrian decision sent a clear message to Mr. Hariri that he had to go: "there was no way the two of them could work together". Mr. Hariri met with President Assad in Damascus in a last attempt to convince him not to support the extension. The Mission has received accounts of this meeting from various sources inside and outside Lebanon, all of which claim to have heard the account of the meeting from Mr. Hariri himself shortly after the meeting took place. The Mission has no account of the meeting from Mr. Assad's side: the Syrian authorities declined the Mission's request to meet with him. The received testimonies corroborated each other almost verbatim.

10. According to these testimonies, Mr. Hariri reminded Mr. Assad of his pledge not to seek an extension for Mr. Lahoud's term, and Mr. Assad replied that there was a policy shift and that the decision was already taken. He added that Mr. Lahoud should be viewed as his personal representative in Lebanon and that "opposing him is tantamount to opposing Assad himself". He then added that he (Mr. Assad) "would rather break Lebanon over the heads of [Mr.] Hariri and [Druze leader Walid] Jonblatt than see his word in Lebanon broken". According to the testimonies, Mr. Assad then threatened both Mr. Hariri and Mr. Jonblatt with physical harm if they opposed the extension for Mr. Lahoud. The meeting reportedly lasted for ten minutes, and was the last time Mr. Hariri met with Mr. Assad. After that meeting, Mr. Hariri told his supporters that they had no other option but to support the extension for Mr. Lahoud. The Mission has also received accounts of further threats made to Mr. Hariri by security officials in case he abstained from voting in favor of the extension or "even thought of leaving the country".

11. On 2 September 2004, the Security Council adopted its resolution 1559, which, among other provisions, called upon "all remaining foreign forces to withdraw from Lebanon, and declared its support for a free and fair electoral process in Lebanon's upcoming presidential elections conducted according to Lebanese constitutional rules devised without foreign interference or influence". It is widely believed, inside and outside Lebanon, that Mr. Hariri lent active support to this resolution. Numerous sources in Lebanon informed the Mission that the Syrian leadership held Mr. Hariri personally responsible for the adoption of the resolution, and that this resolution marked the end of whatever trust existed between the two sides. On 3 September, the vote on the extension was brought to the Parliament. Mr. Hariri and his parliamentary bloc voted in its favor. Three ministers voted against it, among them Marwan Hemadeh, a close associate of both Mr. Hariri and Mr. Jonblatt. The amendment was passed, and Mr. Lahoud's term was extended for three years. On 9 September, Mr. Hariri announced his resignation.

12. Political tension reached a new height with that resignation. Additional number of political figures joined what later became labeled the 'opposition', which mainly called for a review of the Syrian-Lebanese relations. Some of the opposition leaders preferred to review these relations in line with SCR 1559, while others preferred to review them under the banner of the Taif Agreement. The upcoming legislative elections were widely seen as a turning point and it became apparent to all that the parties were preparing for a final showdown. Until the extension for Mr. Lahoud, the opposition was mainly composed of Christian politicians and groups. The decision by Mr. Jonblatt's bloc to join forces with them was a major development in so far as it expanded the opposition coalition beyond the sectarian dividing lines, especially in light of Mr. Jonblatt's traditional alliance with Syria. Mr. Hariri's resignation added more strength to the opposition by bringing in the large and influential Sunni community.

13. On 2 October, former minister Marwan Hemadeh narrowly escaped death when a bomb exploded next to his car. His guard was killed in the explosion. The attempt on Mr. Hemadeh's life sent shock waves throughout Lebanon and added to the ongoing polarization. The perpetrators of the assassination attempt were not identified, and a general feeling prevailed that they would not be. A loaded atmosphere dominated the Lebanese scene in which "everyone was under threat", as many security officials told the Mission. A wide range of people, inside and outside Lebanon, told the Mission that Mr. Hariri and Mr. Jonblatt feared for their lives and saw the attempt on Mr. Hemadeh's life as a part of the ongoing power struggle with the Syrian leadership.

14. Amidst the heightened tension, the consolidation of the opposition coalition continued, as well as the preparations for the upcoming legislative elections. Contacts and negotiations took place between Mr. Jonblatt and Mr. Hariri and with the exiled Maronite leader Mr. Michel Aoun. By the end of January 2005, there was a formidable power bloc emerging in Lebanon bringing together, for the first time, representatives of almost all political and religious communities, with the noted exception of the Shiite groups Amal and Hezbollah. This power bloc was independent from, if not hostile to, the Syrian influence and seemed confident of winning a clear majority in the upcoming elections. It also enjoyed the support of key players in the international community and seemed confident of its ability to force Syria to implement its outstanding commitment under the Taif Agreement and/or the SCR 1559. At the center of this power bloc one man stood as the perceived architect: the former Prime Minister Rafik Hariri. On 14 February, he was assassinated.

15. Clearly, Mr. Hariri's assassination took place on the backdrop of his power struggle with Syria, regardless of who carried out the assassination and with what aim. It is nonetheless important to keep in mind that only a proper investigation - not political analysis - could lead to the identification of those who ordered, planned and carried out this heinous crime. It would be a violation of the basic principles of justice to jump to conclusions about the perpetrators of the assassination without proper investigation, convincing evidence and a proper trial.

The security background

16. Mr. Hariri was unanimously described to the Mission as the "most important figure in Lebanese public life". His assassination, therefore, begs the question about the level of protection provided to him by the Lebanese security apparatus. The Lebanese security system is composed of multiple agencies. The Military Intelligence occupies a primary position in this setup; it covers areas of national

security, counter-espionage, counter-terrorism and a strike force. It also includes a department for communications interception. "General Security" covers areas related to foreigners, passports and borders, in addition to politically-based security issues. An 'Internal Security Force' includes both a police force and an information-gathering department. "State Security" is nominally responsible for politically-based security issues. The Republican Guard is mandated with protecting the President, under the overall authority of the commander of the Army. The Syrian Military Intelligence maintains a branch in Syria, with offices in various places including Beirut. Contrary to the affirmations made to the Mission by its chief, evidence and concurrent testimonies lead us to believe beyond reasonable doubt that this branch played a key role in Lebanese political life and had an active involvement with, if not direct supervision of, the management of security affairs in Lebanon.

17. According to rules and regulations in place, these different agencies coordinate with each other and are all members of a Central Security Council that meets once a month under the Chairpersonship of the Minister of Interior. However, numerous sources, including security officials, ministers and former presidents told the Mission that the practice follows a different pattern. First, coordination among agencies is almost nonexistent: the said Council is more a formality than a coordinating mechanism. Second, reporting lines follow personal and political loyalties rather than constitutional arrangements. Heads of security agencies report the substantive information to "those who appointed them, to whom they have loyalty", keeping only formalities and trivial issues to the Central Security Council. In addition, there is a severe lack of oversight and/or judicial review of the work of security agencies. For instance, the 'communication interception' department in Military Intelligence has 'standing authorization' to intercept whatever communication is deemed relevant by the department, with the sole endorsement of the head of the agency without any kind of external oversight or review. Similarly, it is apparent that there is very little, if any, accountability other than that of informal and extra-constitutional loyalties.

18. This setup partly explains the lack of trust the Lebanese people seem to have in their security agencies. Almost without exception, all those who spoke to the Mission, including some security officials, expressed doubts about the capacity and/or the will of the security agencies to provide security to political figures under threats. While some accused the security apparatus of outright involvement in threatening politicians, others said that the dominant culture is that politicians should protect themselves by their own means or, at best, that the security agencies did not have enough clout to protect the threatened. Many pointed to the fact that Lebanon had witnessed a great number of political assassinations over the last thirty years and that most of them remained unsolved to date.

19. After discussions with many security officials, including the heads of Military Intelligence, the 'Special Forces and Counter-Terrorism' department of the Military Intelligence, the 'communication interception' department of the Military Intelligence, the General Security, the Internal Security Forces, and the Republican Guard, the Mission came to the conclusion that there was a serious failure on the part of the Lebanese security apparatus to predict and prevent the assassination of Mr. Hariri. Despite widespread rumors of threats of physical harm against Mr. Hariri and/or Mr. Jonblatt, including the possibility of attempts on their lives and/or the life of members of their families, and despite the attempt on the life of former Minister Marwan Hemadeh, none of the security services had taken additional measure to protect any of them.

20. All of the security services deny having received information of a threat or a possible threat to Mr. Hariri, Mr. Jonblatt, or any of their families. However, everyone else outside the security services who talked to the Mission seemed aware of these threats. In addition, despite the acknowledged heightened tension, none of the security agencies had prepared an 'assessment profile' regarding the security of Mr. Hariri, "the most important political figure in Lebanon". None of the security agencies suggested, advised, or attempted to raise the level of protection provided to Mr. Hariri. Quiet the contrary, the close protection team provided to Mr. Hariri by the Internal Security Forces was reduced from approximately forty to eight persons shortly after he left office. Although this reduction was in line with the regulations, yet it constituted a stark negligence of the special circumstances at hand. At the moment of his assassination, Mr. Hariri's protection was ensured almost entirely by his private security team.

21. When the Mission discussed this aspect with Lebanese security officials, many of them argued that 'prevention' was an alien concept to the security management in Lebanon. This argument is inadmissible: prevention is an integral and important part of any functioning security system. In addition, this argument is also untrue: the Republican Guard informed us that they maintained periodic 'assessment profile' regarding the security of the President, including evaluating the level of threat and risk he is subject to based on their reading of the political situation, rumors, and the overall security situation. A functioning, credible, and professional security apparatus should have prepared, maintained, and updated a similar assessment profile in regards to the security of the 'most important political figure in Lebanon'.

22. Based on the above, it is the view of the Mission that the Lebanese security apparatus failed to provide proper protection for Mr. Hariri and therefore provided a convenient context for his assassination.

B. Circumstances

23. In gathering the facts related to the circumstances, the Mission identified the last movements of Mr. Hariri immediately before the assassination took place, determined the origin of the explosion and the type and weight of explosive used and reviewed the main avenues of the investigation undertaken by the Lebanese authorities based on accepted international standards. The review of the investigation includes the critical areas of; the management of the crime scene; the preservation of evidence; the investigation of the television network Al-Jazeera broadcast claiming responsibility of the attack; the investigation of the suspect bomber; the investigation of the suspect vehicle, and; general remarks on the investigation integrity.

The last movements of Mr. Hariri

24. On Monday the 14th of February 2005 at approximately 1230hrs, Mr. Hariri left the Parliament building in central Beirut and walked approximately seventy metres to a café (Place de l'étoile) in Nejme Square where he met with a number of people. At approximately 1250hrs he left the café accompanied by former Minister and member of Parliament Bassil Fuleihan. His security convoy consisted of six vehicles; 1st, a jeep with four local policemen (the lead vehicle); 2nd, black Mercedes with three private security guards; 3rd, black armour plated Mercedes being driven by Hariri accompanied by Mr. Fuleihan; 4th, black Mercedes with three private security guards; 5th, black Mercedes with three private security guards, and; 6th, black Jeep (an ambulance) bringing up the rear with three private security guards. Three of the Mercedes were equipped with high powered, signal jamming devices (4 GHz), which were operating at the time of the final journey. All of the vehicles were equipped with firearms and all of the security detail were trained.

25. The chosen route was communicated to the lead car only as Mr. Hariri was leaving the café. The convoy left Nejme Square and drove along Ahdab Street and on to Fosh Street. At the junction of Fosh Street and Seaport Street the convoy turned left and took the coast road towards Ain M'reisa and the St Georges Hotel.

26. At exactly 12:56:26 pm, Mr. Hariri's convoy was passing directly outside the St. Georges Hotel, a route that it had taken only six times in the preceding three months. A large explosion occurred and resulted in the death of Mr. Hariri, seven of his security detail and twelve other civilians in the immediate vicinity. Mr. Hariri was brought to the American University Hospital where his body was identified by his personal physician and by the legal physician appointed by the Government. Identification was made possible by body marks, X-ray and dental records. The cause of death was immediate brain injury resulting in cardiac arrest.

The explosion

27. The Mission has examined, analysed and carried out tests at the scene of the explosion over a seven-day period. Its view on the nature and type of the explosion is based on its experts' interpretation of four main elements: a) the dispersion, size and shape of fragments resulting from the

explosion; b) the size and shape of the crater created by the explosion; c) ballistics interpretations, and; d) interpretations of the damage to the buildings in and around the area of the explosion.

28. The analysis of the fragments caused by the explosion and of the shape and form of the crater gives indicators equally supporting hypotheses of a surface and of a subterranean explosion. However, the analysis of the damage caused to the buildings in and around the crime scene suggests a surface explosion. The evidence of heat wash on several metal fragments is a clear indicator of a high explosive charge; the fact that the Mission's experts found evidence of heat wash on fragments of vehicles and on fragments of metal shield holders placed in front of the St. George hotel supports the hypothesis of a surface explosion. Metal fragments found sticking in the side of cars indicate an explosion of a heavy vehicle and the dispersion of such fragments in this direction.

29. Many of the indicators pointing to a subterranean explosion, such as the fragments of the road asphalt, manhole and others found in upper floors of the St. George hotel, the impact on the vehicle roofs, and the damage to upper floors in the adjacent buildings, are not inconsistent with a surface large explosion.

30. After having conducted all the analysis and discussions of the samples collected, the Mission's experts came to the conclusion that it was most likely an explosion above the ground, that the explosive used was Trinitrotoluene (TNT) and of an approximate weight of 1000kg.

The Crime scene

31. The crime scene is located at Ain M'reisa, City of Beirut, outside the Hotel St. Georges. The immediate aftermath of the explosion was a scene of chaos, with multi-agency emergency services, media personnel and hundreds of passers-by and residents of Beirut arriving at the scene to help and observe. Removal of the deceased and injured began almost immediately. Much of the initial service was provided informally by persons who arrived at the scene prior to the arrival of the emergency services.

32. In the immediate aftermath of the explosion, on the 14th of February, the investigation of the crime fell within the jurisdiction of the Military Court and Judge Rasheed Mezhar of that Court undertook overall responsibility for the management and investigation of the crime, including crime scene management and preservation and collection of evidence by those competent local authorities. As an act involving the security of the state, the case was referred to the Judicial Council in implementation of the relevant national legislation and on the 21st February Judge Michel Abu Araj, Chief Judge of the Criminal Court, was appointed as the investigating Judge replacing Judge Rasheed Meshar.

33. Failure to carry out the most fundamental tasks associated with this responsibility became evident from the very outset when the following was revealed: a) The body of a person recovered on the 15th of February was deemed to have survived for approximately twelve hours after the blast, b) A body was located by accident and recovered on the 22nd of February 2005, c) A body was located by family members and recovered on the 1st of March 2005, d) One person has been reported missing and believed to be still at the scene of the explosion.

Preservation of evidence

34. Preservation of evidence, while vital to the success of any investigation, is secondary to the preservation of life and to the recovery of bodies. In this case as in any major emergency, the preservation of the scene was not the primary focus of those emergency service personnel who arrived to render assistance. However, after the initial chaos and the removal of the dead and injured, the security services under the direction and control of the investigating Judge, Rasheed Mezhar, should have cleared the area of people and prevented any other unauthorised access to the site. Having completed a detailed search of the area to ensure that all the dead and injured had been recovered, the site should have been sufficiently secured to preserve all available evidence. The authorities in charge failed to do this.

35. The Mission also identified the following shortcomings:

- a) On the 14th of February shortly before midnight, the six vehicles forming Mr. Hariri's convoy and one BMW (not connected with the convoy) were removed from the scene of the explosion and were taken to the Helou Police Barracks in the city of Beirut. Although the vehicles were covered after they had been removed, they were still now absent from their respective resting places on the site of the explosion, thereby preventing any ballistic analysis, explosive analysis and evidence gathering at the scene.
- b) Lebanese military, police and intelligence personnel, including explosives experts interfered with and removed items of possible evidential value without properly documenting, reporting or collating their activities.
- c) Apart from the initial media access to the site in the immediate aftermath of the explosion, the media were given official access to the site on the 15th of February by Judge Mezhar after the scene had been secured by the security services.
- d) The seat of the explosion (the resulting crater) was flooded with water in the days following the explosion after the local authorities/Police failed to prevent water from being turned on and released into the crater through the fractured pipes at the scene, thereby damaging or even eliminating vital evidence.
- e) Parts of a pickup truck were brought to the scene by members of the security services, some time after the incident, and were placed in the crater and were subsequently photographed and labelled as evidence.
- f) Up until the 6th of March 2005 the Mission observed large numbers of uniformed personnel and persons in civilian attire wandering around the scene, there was no record of persons entering or leaving the scene and no control over removal of or placing of items/samples at the scene.
- g) At a meeting with the local investigation' senior management team on the 8th of March 2005 members of the Mission requested a chronological report relating to the crime scene, i.e. access by personnel, evidence gathered, exhibits taken, tests carried out and general crime scene management. On the 15th of March 2005, the Mission was informed that such a report did not exist and could not be provided.
- h) There is strong evidence to suggest that the investigating judges were not in control of the investigation.
- i) Intelligence/Government agencies intruded on the site seemingly without judicial authority and subsequently failed to coordinate findings.

36 It is therefore the Mission's view that the crime scene was not properly managed or preserved and as a result important evidence was either removed or destroyed without record. Those responsible for the mismanagement should be held accountable.

Television network Al-Jazeera broadcast

37. At approximately 13:30hrs on the 14th of February 2005 the director and senior presenter at Al-Jazeera TV, Beirut, received a telephone call from a man whom he describes as having, poor Arabic, or just pretending to have poor Arabic. The caller stated that "The Nasra & Jihad Group in Greater Syria claims responsibility for the execution of the agent Rafik Hariri, in the name of the oppressed, the Nasra and the Jihad". Al-Jazeera broadcast this statement at approximately 14:00hrs. At 14:19:25 another male person called Al-Jazeera TV and speaking in "very good Arabic" said that a tape could be found in a tree near the United Nations, headquarters building, in Beirut. A member of Al-Jazeera staff was instructed to go to the location but failed to retrieve the videotape. A second Al-Jazeera staff member was sent to retrieve the videotape at which point a videotape was retrieved and subsequently handed to the director. At 15:27:37 a third call was made to Al-Jazeera TV at which time

another male voice asked why the tape had not been broadcast. The director informed the caller that the tape could not be broadcast until a decision had been made at Al-Jazeera headquarters in Qatar. The caller who was by this time shouting loudly threatened the director that he would regret not showing the tape. At 17:04:35 a final call was made to Al-Jazeera TV at which time the same male voice, very angry, asked the director if the tape would be broadcast or not. The director put the caller on hold and subsequently determined that the decision had been made to broadcast the tape, the caller was then told that he should watch the Television. The tape recording, which was broadcast by the Al-Jazeera network, showed a young bearded man claiming responsibility for the killing of Mr. Hariri on behalf of the group 'Nasra and Jihad Group of Greater Syria'. The person who appears on the recording has been identified as Ahmad Abu Adas, a resident of Beirut, aged 22 years.

38. On the same date, 14th February 2005 at 14:11:25 a consultant with Reuters news agency received a call from a male caller whom she describes as not having a Lebanese accent but "using a false Palestinian accent". She states that the caller who was shouting in an authoritative voice told her to "Write down, write down and don't talk", "we are the Nasra & Jihad group in greater Syria, on this day have given due punishment to the infidel Rafik Hariri so that may be an example to others of his sort". On the instruction of an employee (Reuters) the contents of this call were not released because the call could not be authenticated.

39. Of the five calls made to Al-Jazeera and Reuters, the location/origin has been established for four of those calls. All locations identified by police were public telephones in the city of Beirut. The placing of the video tape by a person or persons associated with the killing of Mr. Hariri provided the security forces with an important avenue of investigation. However, the investigation authorities did little to investigate this aspect. CCTV in two critical locations established by members of the Mission was never investigated, witnesses working in the area, identified by the Mission were not interviewed and the most basic investigations were not carried out. Those responsible for this element of the investigation displayed gross negligence.

The suspect

40. Ahmad Abu Adas, a male of Palestinian origin was born in Jeddah (Saudi Arabia) on the 29th of August 1982 and came to Lebanon with his family in 1991. He is the son of Taysir Abu Adas and Nehad Moussa Nafeh. He has two sisters, both living in Beirut, and one brother, who is presently residing in Germany. He was unemployed. Investigations show that at approximately 0700hrs on the 16th of January 2005 Ahmad Abu Adas left his home at Iskandarani Building 6, first floor, Arab University District in the city of Beirut and was officially reported missing on the 19th of January 2005.

41. Enquiries carried out by the Mission established that approximately three years ago Ahmad Abu Adas changed from being a carefree teenager to becoming a religious fundamentalist. Approximately one month prior to going missing Ahmad Abu Adas informed his family that he had met a new friend at the Al-Huri mosque, where he sometimes led the prayers. Information from Abu Adas' mother suggests that at approximately 2100hrs on the 15th of January 2005 the 'new friend' made a telephone call to the Abu Adas home and told him that he would be calling for him at 0700hrs on the 16th of January saying that he had a surprise for Ahmad. The mother claims that at approximately 0700hrs on the 16th of January someone called for Ahmad alerting him by blowing on a car horn outside the apartment, she further states that Ahmad who had already been up for prayer called to ask her for some money and that he took only 2000 Lebanese Lires (approximately one dollar and 33 cents) and said that he would only be a few hours. She also states that Ahmad asked her to apologise to another friend that he had made an appointment with on that date.

42. On the 14th of February 2005 The Abu Adas family were watching TV when Al-Jazeera broadcast the video tape showing Ahmad claiming responsibility for the killing of Mr. Hariri on behalf of the group "Nasra and Jihad in Greater Syria". At approximately 2030hrs on the 14th of February, the father, mother and younger sister surrendered themselves to the police at which time all three were arrested. The parents were detained for approximately seven days but the sister was released after the second day. The investigation into Ahmad Abu Adas included the arrest and interviewing of the family, interviewing of friends, examination of telephone records and a search of the home of his

parents where Ahmad also lived. Information from the investigation shows that Ahmad Abu Adas had a computer at his home which was seized as part of the investigation. The seized items included 11 video tapes, 55 CDs, 1 floppy disc and a computer hard drive. Other than subversive information/data allegedly found on the hard drive there is very little indication that Ahmad Abu Adas had subversive or violent tendencies.

43. The investigation into this aspect of the crime showed the following flaws:

a) The officers leading the investigation assured the Mission that Ahmad Abu Adas had internet access from his home and that the information contained on the hard drive of the computer had been downloaded directly onto the computer at the home of Ahmad Abu Adas. Enquiries carried out by the Mission have established that Ahmad Abu Adas did not have internet access from his home and could not have accessed the suggested sites from his personal computer. Enquiries carried out by the Mission indicate that the investigating security forces did not canvass or carryout enquiries at local cyber cafes with a view to determining the origin of the alleged data located on the computer of Ahmad Abu Adas.

b) There is little evidence to support the theory that Ahmad Abu Adas had militant/extremist tendencies.

c) There is no evidence that Ahmad Abu Adas had planned his departure or that he would not be returning at the time that he left home on the 16th of January 2005.

d) There is no intelligence available on the existence of the group "Nasra and Jihad in Greater Syria" before or after the explosion.

e) This assassination would have required access to considerable finance, military precision in its execution, substantial logistical support and would have been beyond the capacity of any single individual or small terrorist group. There is no evidence suggesting that Ahmad Abu could have the capacity to plan and execute this assassination on his own, nor did he have the financial capability. The suspect vehicle

44. A branch of HSBC bank is located close to the scene of the explosion. The bank operates its own CCTV security system which recorded the movements of the Hariri convoy immediately prior to the explosion but did not record the scene of the explosion itself. Copies of the recordings of this CCTV system were taken by a number of Lebanese security agencies some time after the investigation was initiated. On close scrutiny the recorded footage shows a white pickup truck entering the area of the explosion shortly before Mr. Hariri's convoy. The recording clearly shows that this white pickup truck is moving approximately six times slower than all other vehicles traversing the same stretch of roadway. A time series analysis shows that, for the 50 to 60 meters of road covered by the camera, a normal car takes 3 to 4 seconds to cover the distance while a large truck takes 5 to 6 seconds to travel the distance. The suspect white pickup truck takes approximately 22 seconds to travel the distance and enters the area of the explosion 1 minute and 49 seconds before the Hariri convoy. It is estimated that if the pickup truck continued at the same speed it would be exactly at the centre of the explosion approximately 1 minute and 9 seconds before the Hariri convoy. It is estimated that if the pickup truck had continued its journey at the same speed without stopping it would still have been affected by the force of the blast and would most probably have remained at the scene after the explosion. In order to have avoided the explosion this pickup truck would have had to speed up considerably, immediately after going out of view of the HSBC CCTV camera. There is no evidence to support this.

45. The Lebanese investigating officers have identified the existence of this pickup truck and its suspicious behaviour as an issue that gives rise to a major/critical avenue of investigation. They have identified the make and model of the suspect vehicle as a Mitsubishi Canter pickup truck (possibly 1995-1996 model). The investigations carried out by the Lebanese security forces have focused predominantly on determining the actual ownership of the truck by attempting to trace its ownership history through vehicle licensing records, border controls and manufacturing or dealership records. During searches for evidence at the site of the explosion the security forces have allegedly discovered

parts of a pickup truck which match the suspect vehicle and which bear evidence of having been involved in an explosion. The police have allegedly discovered in excess of 21 parts of this suspect vehicle in and around the area of the explosion. The main thrust of the security force investigation is focused on this one avenue of investigation. The Mission has determined that this truck, as viewed on the CCTV of the HSBC bank, actually existed and was at the scene as stated, immediately before the explosion, which claimed the life of Mr. Hariri. The Mission also accepts that the theory of this truck having been involved in of the assassination is a credible theory, requiring full and extensive investigation. The Lebanese security forces have recovered small parts of a Mitsubishi truck from the crater, and from the surrounding area of the explosion. They have recovered parts of a Mitsubishi truck from the sea adjacent to the explosion. The Mission recovered a piece of metal from the crater consistent with metal used in truck parts and bearing evidence which supports the theory of a surface/over-ground explosion.

46. However, the investigation into this aspect of the case has not been full or extensive, and in the opinion of the Mission, has been critically and fundamentally damaged due to the actions and inactions of the security forces on the ground, as follows:

a) Up to approximately one month after the assassination, little or no attempt had been made by the security forces to determine the movements of this suspect truck immediately prior to, or immediately after the explosion. This aspect of the investigation could have uncovered vital evidence including; the possible identity of the perpetrator or perpetrators, where the truck was parked immediately before the explosion and of critical importance, whether the truck continued on its journey and had no involvement in the assassination at all.

b) The Mission determined that little or no effort was made to determine whether the suspect pickup truck continued its journey and that there was little or no effort made to locate CCTV footage or witnesses on the route after the explosion.

c) The Mission can say with certainty that parts of a truck were brought to the scene of the explosion by a member of the security forces some time after the assassination and were placed in the crater and subsequently photographed in the crater by members of the security forces, thus creating serious suspicion and doubt about the actual involvement of this truck in the assassination and seriously damaging the credibility of the main line of investigation. This line of enquiry is now fundamentally damaged, with credibility issues and scope for legal challenge.

47. In sum, the manner in which this element of the investigation was carried out displays, at least gross negligence, possibly accompanied by criminal actions for which those responsible should be made accountable.

General assessment of investigation:

48. Apart from the deficiencies already indicated above, the Mission has noted the following flaws in the Lebanese investigation process:

a) There was a serious disconnect between the senior members of the local security force investigation team. b) There was a lack of coordination between the security force investigation team and the investigating Judges. c) There was a lack of focus and control by the senior management responsible for the overall investigation of the crime. d) There was a lack of professionalism in the overall crime investigation techniques employed. e) There was a total absence of intelligence information and there was little or no exchange of information between the various agencies engaged in the investigation. f) There was an absence of both technical capability and equipment necessary for such an investigation.

49. Based on all the above, it is the Mission's conclusion that there was a distinct lack of commitment to investigate the crime effectively, and that this investigation was not carried out in accordance with acceptable international standards. The Mission is also of the view that the local investigation has

neither the capacity, nor the commitment to succeed. It also lacks the confidence of the population necessary for its results to be accepted.

C. Consequences

50. The assassination of Mr. Hariri had an earthquake-like impact on Lebanon. Shock, disbelief, and anxiety were the most common reactions among the people with whom we spoke. Shock that what many thought to be practices of the past seem to be coming back. Disbelief at the murder of a man who people regarded as a 'larger than life' figure. And anxiety that Lebanon may be sliding back to chaos and civil strife as a result of that "earthquake". These feelings quickly melted together in a strong and unified outcry for 'the truth'. All those who talked to the Mission indicated that finding the truth about the assassination of Mr. Hariri comes as their utmost priority and that peace and tranquility in Lebanon cannot be restored without bringing this crime to an acceptable closure. Many reminded the Mission of previous political assassinations that were either not investigated properly or did not lead to convincing results. All of our interlocutors emphasized that this assassination was one too many, that what they described as "the culture of intimidation and brutal use of force" has to come to an end, and that the Lebanese people and their political leaders deserve to live free from fear, intimidation and the risk of physical harm.

51. The families of the victims were understandably still in shock when the Mission met with them. Mr. Hariri's family still cannot believe that a man who devoted his life to the service of his country could be simply eliminated while the truth about his murder hangs on an investigation the credibility of which is very much in doubt. The families of the other victims - the guards, the workers at the scene, the passers-by, and all those who lost their lives accidentally - are unable to comprehend yet what has happened or why. For all these people the talk about the capabilities of the security services, the coordination among them, or the political speculations of the populace only increase their pain. All they yearn for now is the truth, a way to bring this to closure and allow them to mourn their loved ones.

52. The families of the victims as well as political leaders from different political and communal backgrounds, including officials and members of the government, have all indicated that the formation of an international and independent investigation commission is the only way to find the truth about the assassination of Mr. Hariri. Some of our interlocutors accused the Lebanese and Syrian security services of involvement in the assassination, of willfully derailing the Lebanese investigation in order to cover up for the crime. Others, from the government side, indicated that an international investigation would be needed specifically to prove the innocence of the Lebanese security services, which cannot happen without external help given the diminished credibility of the Lebanese security services and investigators.

53. During our stay in Lebanon, ordinary people stopped us in the streets of Beirut and thanked us for our efforts to find 'the truth', urged us not to leave this matter unresolved, and reminded us of the importance of bringing the culprits to justice "for the sake of Lebanon". Posters in the streets of Beirut carry one word, in two languages: the truth, al-haqiqa. Politicians, officials in the government at all levels, and even some security officials, told us that finding the truth "this time" is crucial for restoring civil peace in the country, reducing the tension and allowing Lebanon to move toward normality.

54. In addition, the assassination of Mr. Hariri seems to have unlocked the gates of political upheavals that were simmering throughout the last year. Accusations and counter-accusations are rife and fuel a strongly polarized political debate. Some accuse the Syrian security services and leadership of assassinating Mr. Hariri because he became an insurmountable obstacle to their influence in Lebanon. They argue that his removal became necessary for Syria to retain control over the Lebanese political polity, especially if Syria was forced to withdraw its forces. The adherents of this theory affirm that the Syrian leadership would not mind being the 'obvious suspect' and that it has used similar tactics in the past with little or no concern about leaving traces. According to these sources, this attitude is part of Syria's pattern of coercive management of Lebanese affairs. Others claim that the Syrian leadership did not anticipate such strong reactions from the Lebanese people and the international community.

In their view the decision to eliminate Mr. Hariri was "a strategic miscalculation", not dissimilar to other miscalculations made by the Syrian government.

55. Syrian supporters counter by claiming that Mr. Hariri was assassinated by "the enemies of Syria"; those who wanted to create international pressure on the Syrian leadership in order to accelerate the demise of Syrian influence in Lebanon and/or start a chain of reactions that would eventually force a 'regime change' inside Syria itself. According to the adherents of this theory, the assassination of Mr. Hariri would be too gross a mistake for the Syrian leadership to make. Not only would Syria be the 'obvious suspect', but it would also be the obvious loser. Those who maintain this theory reminded the Mission that political assassinations are carried out not in revenge, but in order to lead to certain consequences. The consequences of Mr. Hariri's assassination are, in their view, obviously unfavorable to Syria.

56. The assassination quickly widened the gap between the Lebanese political factions and further polarized the political scene to a threatening level. Immediately after the assassination, the political spectrum was divided between 'opposition' and 'loyalty' camps, crystallizing around the position towards the current Lebanese government/president and the existing Syrian/Lebanese relationship. Two weeks after the assassination, large numbers of Lebanese took to the streets to express a combination of grief, anger, anxiety and political opposition to the Syrian involvement in Lebanese affairs. The protesters and the opposition leaders accused the Lebanese and security services of involvement in the assassination and called for the government to resign and for the Syrian troops and security assets to leave Lebanon. Although PM Karami had a majority in the parliament and was confident of winning a confidence vote, he listened to the voice of the street and announced his government's resignation while the demonstrators were still gathered not far from the Parliament.

57. The protestors and opposition leaders continued their campaign, calling for the dismissal of all the heads of security agencies, a Syrian withdrawal of its army and security assets, the formation of a 'neutral' government that would focus on preparing the upcoming legislative elections, and the establishment of an independent international investigation. The 'loyalty' quickly responded by taking to the streets on 8 March when at least half-a-million people demonstrated in support of the government and of Syria. Immediately afterwards, the Syrian President declared his government's intention to withdraw its forces to the Beqa'a valley in implementation of the Taif Agreement of 1989, and as well as further withdrawals up to the Syrian border. However, this announcement did not bring the debate over the Syrian presence to an end. Opposition leaders continued to show skepticism regarding Syrian intentions and required a timetable for the full pullout, with some calling for its completion before the legislative elections.

58. On 14 March, according to available estimates, more than a million people gathered in the main square of Beirut and chanted for the 'independence' of Lebanon, the creation of an independent, international investigation commission, the removal of the heads of security agencies, and the formation of a 'neutral' government to prepare for the upcoming elections. Fears of a constitutional void were voiced to the Mission, as well as fears of the inability to vote in an electoral law in time or to prepare adequately for the May legislative elections. Many suggested that international supervision of the elections would be necessary to ensure its fairness. They pointed out that a credible election would contribute to stabilizing the political situation. There are also fears of civil strife as the opposition and loyalty divide is worryingly loaded with inter-communal significance. These political upheavals carry threats to the peace and security of Lebanon, with obvious implications for stability in the region as a whole.

59. Moreover, Lebanese politicians from different backgrounds and allegiances expressed to the Mission their fears that Lebanon will become, once again, a battle ground for external forces. Many pointed to the long and tragic civil war as an example of external powers struggling for power through Lebanese actors. They underlined the fragility of the Lebanese polity and its limited ability to sustain pressure. Many political figures emphasized their worry that Lebanon will be caught in a possible showdown between Syria and the international community, with possibly devastating consequences for Lebanese peace and security. Lebanese political leaders across the board implored the Mission to call on the international community not to use Lebanon as a tool of pressure. As one interlocutor told the Mission; "the tool is too fragile, and would easily break".

III. Concluding remarks and recommendations

60. It is the Mission's view that the Lebanese security services and the Syrian Military Intelligence bear the primary responsibility for the lack of security, protection, law and order in Lebanon. The Lebanese security services have demonstrated serious and systematic negligence in carrying out the duties usually performed by a professional national security apparatus. In doing so, they have severely failed to provide the citizens of Lebanon with an acceptable level of security and, therefore, have contributed to the propagation of a culture of intimidation and impunity. The Syrian Military Intelligence shares this responsibility to the extent of its involvement in running the security services in Lebanon.

61. Secondly, it is also the Mission's view that the Government of Syria bears primary responsibility for the political tension that preceded the assassination of former Prime Minister Mr. Hariri. The Government of Syria clearly exerted influence that goes beyond the reasonable exercise of cooperative or neighborly relations. It interfered with the details of governance in Lebanon in a heavy-handed and inflexible manner that was the primary reason for the political polarization that ensued. Without prejudice to the results of the investigation, it is obvious that this atmosphere provided the backdrop for the assassination of Mr. Hariri.

62. Thirdly, it became clear to the Mission that the Lebanese investigation process suffers from serious flaws. Whether caused by lack of capabilities or commitment, this process is unlikely to reach a satisfactory conclusion. In addition, the credibility of the Lebanese authorities handling the investigation is questioned by a great number of Lebanese, in the opposition as well as in government. It is therefore the Mission's view that an international independent investigation would be necessary to find the truth. To carry out such an investigation, there would be need for a self-sufficient team, comprising the different fields of expertise that are usually involved in carrying out similarly large investigations in national systems, with the necessary support staff and resources, and knowledge of the legal and other systems involved. Such a team would need an executive authority to carry out interrogations, searches, and other relevant tasks. The team could be assisted and advised by Lebanese legal resources without prejudice to its independence. It is, however, more than doubtful that such an investigation team could carry out its tasks satisfactorily - and receives the necessary active cooperation from local authorities - while the current leadership of the Lebanese security services remains in office.

63. Fourthly, it is the Mission's conclusion that the restoration of the integrity and credibility of the Lebanese security apparatus is of vital importance to the security and stability of the country. A sustained effort to restructure, reform and retrain the Lebanese security services will be necessary to achieve this end, and will certainly require assistance and active engagement on the part of the international community. Based on the Mission's review of the current setup of the Lebanese security apparatus, six main areas have been identified as priorities for security reform; a) decoupling security from politics and establishing a professional service; b) nationalizing the security apparatus by disentangling it from external influence and by raising it above sectarianism; c) establishing a democratic police service, with special attention to the rule of law and human rights; d) establishing clear lines of reporting; e) capacity-building, and; f) introducing clear mechanisms for accountability and judicial oversight.

64. Finally, it is also the Mission's view that international and regional political support will be necessary to safeguard Lebanon's national unity and to shield its fragile polity from unwarranted pressure. Improving the prospects of peace and security in the region would offer a more solid ground for restoring normalcy in Lebanon.

Peter FitzGerald,
Head of the United Nations Fact-Finding Mission in Lebanon
New York, 24 March 2005

Sumber: <http://www.lebanonwire.com/0503/05032701UNREP.asp>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nunu Ahmad An-Nahidl
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 20 Oktober 1971
Alamat : Perum. Bumi Cibinong Endah Blok D 10 No. 27
Sukahati Cibinong Bogor
Telp. : 021-87907528 / 081316322953
E-Mail : an-nahidl@hotmail.com

Pendidikan :

(Formal)

1. MI Nahdlatul Ulama di Menes Pandeglang (1984)
2. MTs Nahdlatul Ulama di Menes Pandeglang (1987)
3. MA Nahdlatul Ulama di Buntet Pesantren Cirebon (1990)
4. Fak. Ushuluddin/Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996)
5. Fak. Pascasarjana/Kajian Timur-Tengah & Islam Universitas Indonesia (2011)

(Non-Formal)

1. Santri PP Buntet Cirebon (1988-1990)
2. Santri PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1991-1996)

Pengalaman Bekerja:

1. Pegawai Bid. Administrasi dan Tata Usaha KBRI Damaskus (2000)
2. Pegawai Bid. Pensosbud KBRI Damaskus (2001-2002)
3. Guru Sekolah Indonesia Damaskus, SID (2001)
4. Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat – Kementerian Agama RI (2004 – sekarang)

Jakarta, 20 Juni 2011

Penulis